



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025**





**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun, dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR
9 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi, berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang RPJP Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Sistematika Dokumen RPJPD adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJP dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan RPJPD.
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat untuk waktu sampai dengan tahun 2025.
- BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, tujuan serta sasaran setiap misi pembangunan.
- BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**
Diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (duapuluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.
- BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN**
Berisi kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJPD.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RTRW Provinsi, RTRW kabupaten, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI BANGKA BARAT,



Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**



YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI E

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.2/2015)**

Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Bangka Barat tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Nomor : 2 Tahun 2015

Tanggal : 3 Juni 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>viii</i>
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.1.1. Pengertian RPJP Kabupaten Bangka Barat	1 - 2
1.1.2. Alasan dan Proses Penyusunan RPJPD	1 - 3
1.1.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RPJPD	1 - 4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1 - 5
1.3. Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1 - 9
1.4. Sistematika Penulisan	1 - 10
1.5. Tujuan, Maksud dan Sasaran	1 - 11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2 - 1
2.1.1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 4
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat	2 - 5
2.1.4. Kondisi Umum Demografi Kabupaten Bangka Barat	2 - 8
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 - 11
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2 - 11
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial	2 - 21
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga	2 - 25
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2 - 26
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	2 - 26
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	2 - 61
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	2 - 75
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	2 - 75
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2 - 77

2.4.3. Iklim Berinvestasi -----	2 - 84
2.4.4. Sumber Daya Manusia -----	2 - 87
BAB 3 ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah -----	3 - 1
3.1.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 1
3.1.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 30
3.2 Isu Strategis -----	3 - 39
3.2.1. Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Bangka Belitung -	3 - 39
3.2.2. Penelaahan RPJP Nasional dan MP3EI -----	3 - 48
3.2.3. Penelaahan RPJP Daerah Lain -----	3 - 52
3.2.4. Isu-isu Strategis Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 54
3.2.5. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka Barat -----	3 - 59
BAB 4 VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA BARAT	
4.1 Metodologi Perumusan Visi dan Misi -----	4 - 1
4.2 Perumusan Visi -----	4 - 3
4.3 Perumusan Misi -----	4 - 4
4.3.1. Penjabaran Misi -----	4 - 8
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	
5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat -----	5 - 1
5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan -----	5 - 5
BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
6.1 Prinsip Kaidah Pelaksanaan -----	6 - 1
6.2 Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi -----	6 - 3
6.2.1. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bangka Barat -----	6 - 3
6.2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bangka Barat -----	6 - 3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Tabel 2.2	Curah Hujan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2003 – 2012).....	2 - 3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Verifikasi Pusat	2 - 8
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	2 - 10
Tabel 2.5	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2020	2 - 11
Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 13
Tabel 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 13
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013	2 - 14
Tabel 2.9	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	2 - 15
Tabel 2.10	Proyeksi PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025	2 - 16
Tabel 2.11	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bangka Barat (Juta)	2 - 17
Tabel 2.12	Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bangka Barat	2 - 18
Tabel 2.13	Rata-Rata Inflasi Sektoral Tahun 2009 – 2013	2 - 18
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 19
Tabel 2.15	Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat	2 - 19
Tabel 2.16	Indeks Ketimpangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 20
Tabel 2.17	Jumlah Kriminalitas yang Tertangani	2 - 21
Tabel 2.18	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 22
Tabel 2.19	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2009-2013	2 - 22
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 23
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bangka Barat	2 - 24
Tabel 2.22	Indikator Seni Budaya dan Olahraga	2 - 26
Tabel 2.23	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah.....	2 - 27
Tabel 2.24	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014.....	2 - 28
Tabel 2.25	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	2 - 29
Tabel 2.26	Rasio Dokter, Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	2 - 30
Tabel 2.27	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	2 - 30
Tabel 2.28	Jaringan Jalan Berdasarkan Kemantapan	2 - 32
Tabel 2.29	Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (%/KM)	2 - 32
Tabel 2.30	Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk.....	2 - 33
Tabel 2.31	Persentase Pemenuhan Air Bersih, Listrik, dan Sanitasi	2 - 33

Tabel 2.32	Rasio rumah layak huni	2 - 34
Tabel 2.33	Persentase permukiman layak huni.....	2 - 34
Tabel 2.34	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah.....	2 - 35
Tabel 2.35	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan.....	2 - 36
Tabel 2.36	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2 - 36
Tabel 2.37	Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat	2 - 37
Tabel 2.38	Uji KIR Angkutan Umum	2 - 37
Tabel 2.39	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	2 - 38
Tabel 2.40	Jumlah Koperasi dan KUD dan Anggota per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 39
Tabel 2.41	Jumlah dan Pertumbuhan Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014	2 - 39
Tabel 2.42	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 – 2014	2 - 41
Tabel 2.43	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	2 - 42
Tabel 2.44	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	2 - 43
Tabel 2.45	Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Tahun 2009-2014	2 - 43
Tabel 2.46	Jumlah Pelanggan Telepon dan Speedy di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012	2 - 44
Tabel 2.47	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2014.....	2 - 45
Tabel 2.48	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2010 s.d 2014	2 - 46
Tabel 2.49	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012.....	2 - 49
Tabel 2.50	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009-2013	2 - 50
Tabel 2.51	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013	2 - 51
Tabel 2.52	Indikator Seni Budaya dan Olahraga	2 - 52
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2009 s.d 2014	2 - 53
Tabel 2.54	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 s.d 2014	2 - 53
Tabel 2.55	Indikator Kinerja Pembangunan Fokus Urusan Wajib Pemerintah	2 - 54
Tabel 2.56	Jumlah Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008-2013 ...	2 - 62
Tabel 2.57	Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013	2 - 64
Tabel 2.58	Angka Produktivitas Pertanian di Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 65
Tabel 2.59	Proyeksi Produktivitas Pertanian di Kabupaten Bangka Barat	2 - 66
Tabel 2.60	Indikator Bidang Kehutanan Tahun 2012-2014	2 - 66
Tabel 2.61	Indikator Bidang ESDM Tahun 2012-2014.....	2 - 67
Tabel 2.62	Jumlah Produksi Bijih Timah Menurut Lokasi Penambangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 (ton).....	2 - 68

Tabel 2.63	Pantai/Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Bangka Barat	2 - 69
Tabel 2.64	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat	2 - 70
Tabel 2.65	Kontribusi Subsektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013 (%)	2 - 72
Tabel 2.66	Indikator Kinerja Pembangunan Fokus Urusan Pilihan Pemerintah	2 - 73
Tabel 2.67	Produktivitas per Sektor Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Bangka Barat	2 - 76
Tabel 2.68	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 s.d 2013	2 - 77
Tabel 2.69	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Bangka Barat	2 - 78
Tabel 2.70	Jumlah Kunjungan Kapal/Perahu, Lalu Lintas Barang dan Penumpang melalui Pelabuhan Muntok dan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 78
Tabel 2.71	Jumlah Bank dan ATM di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 - 2013	2 - 80
Tabel 2.72	Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013	2 - 82
Tabel 2.73	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, Komputer Desktop, Komputer Laptop.....	2 - 83
Tabel 2.74	Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 83
Tabel 2.75	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 84
Tabel 2.76	Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Barat	2 - 85
Tabel 2.77	Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Barat	2 - 85
Tabel 2.78	Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Barat	2 - 86
Tabel 2.79	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 86
Tabel 2.80	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	2 - 87
Tabel 2.81	Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 (persen)	2 - 88
Tabel 3.1	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan.....	3 - 1
Tabel 3.2	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan	3 - 4
Tabel 3.3	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	3 - 5
Tabel 3.4	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum	3 - 7
Tabel 3.5	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Penataan Ruang	3 - 8
Tabel 3.6	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan	3 - 10
Tabel 3.7	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perumahan	3 - 11

Tabel 3.8	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3 - 12
Tabel 3.9	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	3 - 13
Tabel 3.10	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM	3 - 14
Tabel 3.11	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	3 - 15
Tabel 3.12	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.....	3 - 16
Tabel 3.13	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	3 - 18
Tabel 3.14	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 - 19
Tabel 3.15	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3 - 20
Tabel 3.16	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perhubungan	3 - 21
Tabel 3.17	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	3 - 22
Tabel 3.18	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pertanian	3 - 23
Tabel 3.19	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3 - 23
Tabel 3.20	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Otonomi Daerah	3 - 25
Tabel 3.21	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 - 26
Tabel 3.22	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Sosial	3 - 27
Tabel 3.23	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kebudayaan	3 - 28
Tabel 3.24	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kearsipan	3 - 29
Tabel 3.25	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perpustakaan	3 - 29
Tabel 3.26	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan.....	3 - 30
Tabel 3.27	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pertanian	3 - 31
Tabel 3.28	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kehutanan	3 - 32
Tabel 3.29	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 - 33

Tabel 3.30	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pariwisata	3 - 35
Tabel 3.31	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Industri	3 - 36
Tabel 3.32	Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perdagangan	3 - 37
Tabel 3.33	Isu Strategis Internasional, Nasional, dan Provinsi	3 - 39
Tabel 3.34	Identifikasi Kebijakan Nasional.....	3 - 48
Tabel 3.35	Telaah Kebijakan RPJP Daerah Lain	3 - 52
Tabel 3.36	Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional, dan Kabupaten Bangka Barat	3 - 56
Tabel 4.1	Matriks Visi dan Misi	4 - 2
Tabel 4.2	Perumusan Visi	4 - 4
Tabel 4.3	Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat	4 - 5
Tabel 4.4	Perumusan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat	4 - 6
Tabel 4.5	Sinkronisasi Misi Jangka Panjang	4 - 7
Tabel 5.1	Misi, Tujuan Jangka Panjang, Sasaran Pokok, dan Indikator Pencapaian Pembangunan	5 - 2
Tabel 5.2	Tahapan Pembangunan Revisi Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2025.....	5 - 6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterhubungan Antardokumen Perencanaan	1 - 10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	2 - 3
Gambar 2.2	Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bangka Barat	2 - 6
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya	2 - 7
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 - 2013	2 - 8
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 dan 2012	2 - 9
Gambar 2.6	Penduduk Usia >10 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan (%)	2 - 10
Gambar 2.7	Angka Putus Sekolah Tahun 2009-2013 (%)	2 - 25
Gambar 2.8	Persentase Kepemilikan KTP dan KK Tahun 2010-2014.....	2 - 40
Gambar 2.9	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014	2 - 47
Gambar 2.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 - 2014	2 - 47
Gambar 2.11	Jumlah Sanggar Tari Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 – 2012	2 - 52
Gambar 2.12	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 -2014	2 - 63
Gambar 2.13	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Barat tahun 2011- 2014 (Ton)	2 - 63
Gambar 2.14	Produksi Tiga Komoditi Utama Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 (ton)	2 - 65
Gambar 2.15	Persentase Produksi Bijih Timah PT. TIMAH Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2013	2 - 68
Gambar 2.16	Pertumbuhan dan Jumlah Industri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014	2 - 71
Gambar 2.17	Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 - 2013 (ribu rupiah/bulan)	2 - 76
Gambar 2.18	Persentase Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Rata-rata Rumah Tangga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013	2 - 76

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Sesuai dengan Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen perencanaan dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), maupun pembangunan antar daerah.

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berisikan visi dan misi jangka panjang sebuah daerah dan juga memproyeksikan rencana pencapaian dan pembangunan dalam kurun waktu RPJPD tersebut berlaku. RPJPD memuat kajian dan analisis serta proyeksi terhadap 4 (empat) aspek pembangunan yaitu (1) pelayanan umum; (2) daya saing daerah; (3) kesejahteraan masyarakat; dan (4) demografi dan geografi. RPJPD ini kemudian harus dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD selama 5 tahun kepemimpinan seorang Bupati.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Perubahan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005–2025 merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Perubahan RPJPD ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun RPJMD tahun 2015-2020 (tahap 3) dan RPJMD tahun 2020-2025 (tahap 4). RPJMD tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

1.1.1 Pengertian RPJP Kabupaten Bangka Barat

RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat analisis dan proyeksi pembangunan berdasarkan aspek pelayanan umum, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan geografis demografis; penentuan isu-isu strategis serta permasalahan daerah, dan juga termasuk visi-misi serta panduan umum strategi pembangunan untuk jangka panjang.

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dokumen ini merupakan revisi dari RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 khususnya untuk kurun waktu 10 tahun ke depan yang memuat adaptasi terhadap perubahan yang terjadi dari kondisi sebelumnya pada rencana pembangunan. Penyesuaian rencana pembangunan terhadap dinamika kehidupan yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sangat perlu dilakukan karena berkaitan dengan faktor-faktor pembangunan yang akan menentukan arah dan keberhasilan dari rencana pembangunan itu sendiri.

1.1.2 Alasan dan Proses Penyusunan RPJPD

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah memberikan arahan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah dan untuk lebih memaksimalkan potensi-potensi sumber daya alam dan menjelaskan kondisi eksisting Kabupaten Bangka Barat serta visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan selama dua puluh tahun.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam perkembangannya, perubahan dan dinamika penting terjadi dan mempengaruhi beberapa asumsi pokok perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat; salah satunya diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang proses penyusunan RPJPD. Perubahan juga terjadi dalam konteks data yang ada, dimana perlu penyesuaian dalam hal proyeksi pencapaian serta penyesuaian terhadap perubahan arah kebijakan pembangunan nasional; termasuk dengan adanya standar *Millenium Development Goals*; MP3EI, dan juga akan hadirnya *ASEAN Economic Community*. Perubahan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 juga bertujuan untuk menciptakan keselarasan dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah antar level pemerintahan.

Dengan merujuk pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan terkait dengan perubahan kondisi yang terjadi. Selain keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menunjukkan perubahan penyusunan dan penyajian rencana jangka panjang, perubahan kondisi seperti kondisi fisik, sosial kependudukan, ekonomi, dan lain sebagainya menjadikan perlunya penyesuaian rencana pembangunan. visi, misi, dan arah pembangunan dengan adanya perubahan kondisi tersebut tentunya akan menjadi berbeda dengan visi, misi, dan arah kebijakan sebelumnya.

Kedudukan perubahan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Ketiadaan dokumen perubahan RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan pada tahapan pembangunan lima tahunan periode ke III (2015-2020) dan ke IV (2020-2025), sehingga akan menjadi sulit untuk menjaga kesinambungan dari antar periode pembangunan lima tahunan.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya: dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusunan Dokumen RPJPD diawali dengan persiapan penyusunan, pelaksanaan forum SKPD, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), perumusan rancangan akhir serta penetapan peraturan daerah.

1.1.3 Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RPJPD

Dalam penyusunan RPJP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005–2025 dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teknokratis

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode ini merupakan proses keilmuan untuk

memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja.

b. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk mengakomodasi ide dan gagasan setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Bangka Barat (pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan masyarakat). Proses partisipatif ini dilakukan melalui FGD (*focused group discussion*) tematik, serta *in-depth interview* dengan aktor penting yang mampu memberikan pandangannya terhadap pembangunan Kabupaten Bangka Barat.

c. Pendekatan Politis

Pendekatan Politis dilakukan melalui jaring pendapat dengan Bupati Bangka Barat serta DPRD Kabupaten Bangka Barat melalui sesi FGD untuk menampung saran dan masukan.

d. Pendekatan atas-bawah (*top-down*).

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas-bawah (*top-down*) dilakukan dengan mengakomodir aturan hukum yang bersifat *top down* (kebijakan pusat yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah) untuk menciptakan keterkaitan yang erat antar dokumen perencanaan tingkat pusat dan daerah. Secara teknis pelaksanaan pendekatan *top down* dilakukan dengan menggunakan metode sinergitas terhadap dokumen perencanaan pada tingkatan di atasnya. Metode sinergitas melalui penyalarsan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional serta provinsi dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat. Revisi RPJPD ini juga akan mensinergikan terhadap dinamika global seperti ASEAN *Economic Community* dalam proses penyusunannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat antara lain dijabarkan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 06 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 01 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

1.3 Hubungan Antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

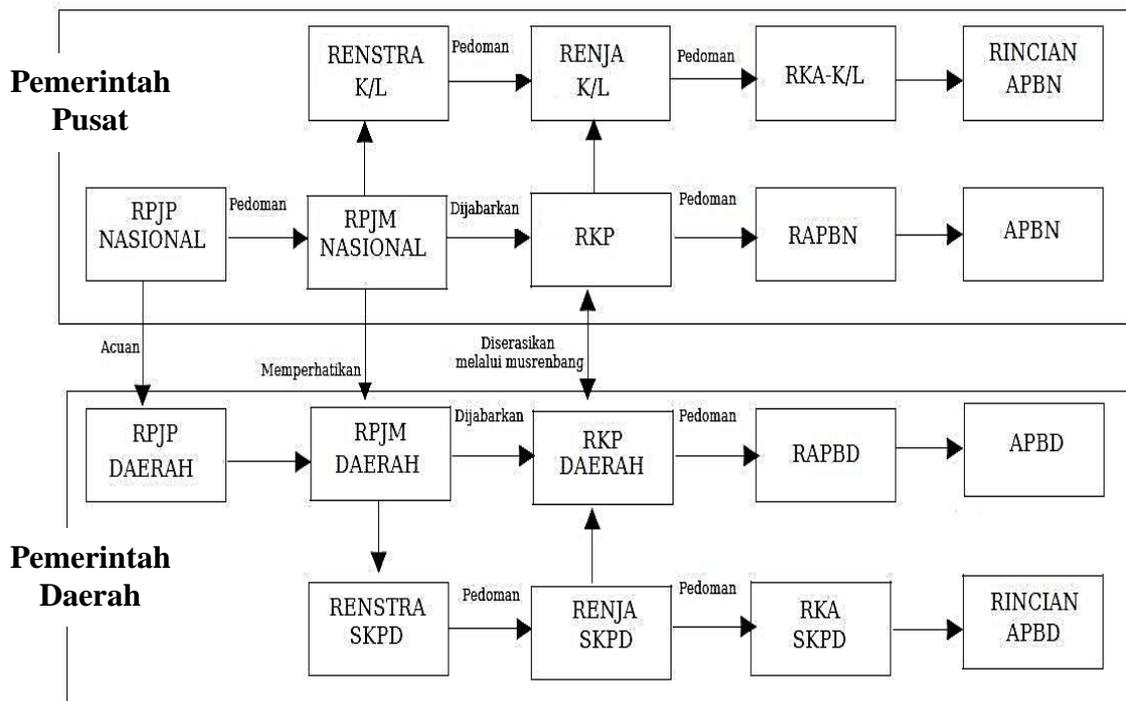
Perubahan RPJPD Kabupaten Bangka Barat disusun dalam rangka melakukan berbagai penyesuaian dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun (2005-2025). Dalam Penyusunan RPJP ini disusun dengan :

- a. Mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
- b. Berpedoman pada RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034;
- c. Memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Bangka Barat akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahunan. Kemudian, RPJMD Kabupaten Bangka Barat tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, dokumen ini memuat rencana tahapan-tahapan dalam pembangunan jangka panjang berdasarkan prioritas pembangunan yang berkembang sampai saat ini dan juga memuat ketercapaian pembangunan yang diukur dengan indikator pembangunan.

Secara ringkas, keterkaitan antara RPJPD dengan rangkaian dokumen lainnya, yaitu mulai dari RPJPN, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD sampai dengan penyusunan APBD dapat digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram alur seperti dibawah ini :

Gambar 1.1 Gambar Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan, dalam sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Bangka Barat ini meliputi enam bab yang terdiri dari:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta tujuan, maksud dan sasaran.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi 10 tahun terakhir sampai dengan titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 10 tahun ke depan.

BAB 3 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis yang berisi permasalahan beserta faktor-faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah dan juga isu strategis pembangunan.

BAB 4 VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA BARAT

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Bangka Barat, memuat perumusan visi dan misi Kabupaten Bangka Barat untuk 10 (sepuluh) tahun mendatang.

BAB 5 ARAH PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KABUPATEN BANGKA BARAT

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan terkait pemanfaatan RPJPD serta dalam penyusunan RPJMD.

1.5 Tujuan, Maksud, dan Sasaran

RPJPD Kabupaten Bangka Barat disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun, yang dimaksudkan untuk memberikan arahan dan juga sebagai acuan bagi seluruh komponen pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta bersama masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat. RPJPD Kabupaten Bangka Barat menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan juga arahan rencana pembangunan lainnya.

Sedangkan tujuan penyusunan revisi RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 adalah untuk melakukan penyempurnaan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan terhadap ketentuan perundangan dan kondisi terkini, serta mengintegrasikan kajian tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2015-2025.

Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut maka dalam penyusunan perubahan RPJPD ini ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut.

1. Terumuskannya visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2005-2025 sebagai penyempurnaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2005-2025 sebelumnya.
2. Terumuskannya tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2015-2025.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi, dan sinergisitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana pembangunan suatu daerah harus disusun berdasarkan pertimbangan karakteristik dan kondisi daerahnya supaya pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah daerahnya, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pada bagian ini dijabarkan secara menyeluruh gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat yang meliputi kondisi umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik baik fokus layanan wajib maupun pilihan, dan juga dari aspek daya saing daerah. Dalam setiap bagiannya akan dijabarkan kondisi terkini dari masing-masing aspek yang dibahas.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta perubahan jumlah, komposisi, distribusi penduduk (demografi) Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang relatif baru karena dibentuk pada era desentralisasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003.

Secara administratif, sejak tahun 2011 Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 60 Desa. Kecamatan Simpang Teritip memiliki wilayah terluas yaitu 27,54% dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Parittiga memiliki wilayah terkecil yaitu sebesar 11,47% dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1.	Muntok	3 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		4 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100,00

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

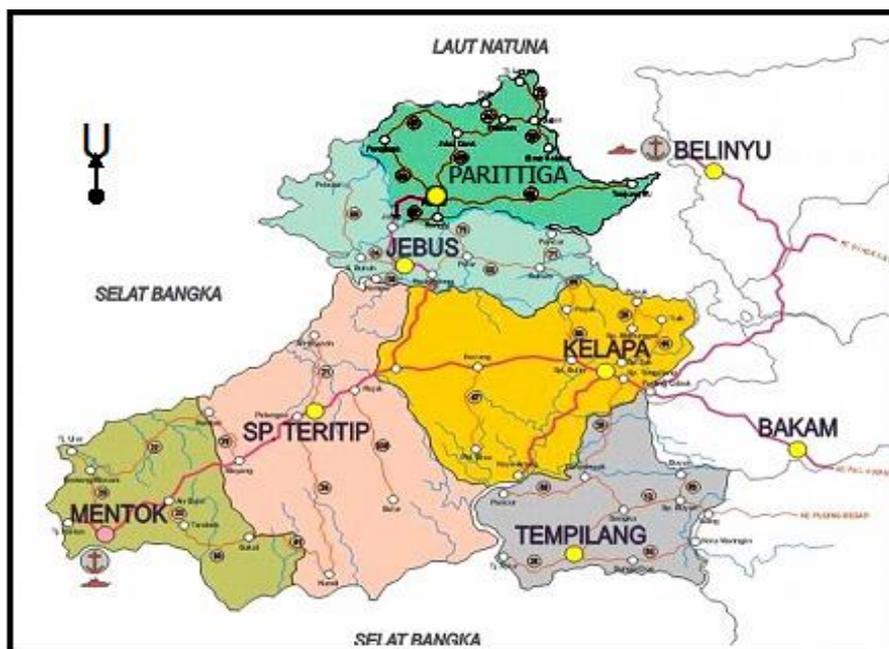
2.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 memiliki luas wilayah 284.886,05 ha. Kabupaten Bangka Barat memiliki 23 pulau namun penduduk hanya berdomisili di pulau induk (Pulau Bangka). Secara keseluruhan, ekosistem pesisir yang ada berupa *estuaria* (muara sungai), hutan bakau, dan pantai berpasir. Pada ekosistem *estuaria* dan hutan bakau, cenderung didominasi fungsi lindung, sementara pada ekosistem pantai berpasir cenderung potensial sebagai obyek wisata alam.

Secara geografis Kabupaten yang terbagi ke dalam enam kecamatan ini terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Bangka.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Bappeda Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Pada umumnya, sungai-sungai di Kabupaten Bangka Barat berhulu di perbukitan dan bermuara ke laut. Sungai – sungai tersebut belum dimanfaatkan untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan di laut. Dengan curah hujan yang cukup tinggi, tingkat persediaan air baik air tanah maupun air permukaan sangat memadai. Berdasarkan data curah hujan, Kabupaten Bangka Barat hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun). Namun, dari kualitas air mengalami penurunan akibat kerusakan lingkungan.

Tabel 2.2 Rata-rata Curah Hujan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006-2013

Tahun	Curah Hujan (mm per bulan)
2006	163,2
2007	146,72
2008	177,10
2009	155,43
2010	287,03
2011	241,57
2012	168,1
2013	236,6
Rata-Rata	196,97

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2013, Tahun 2014

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten yang dijuluki “Lumbung Timah” ini memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan menuju pusat-pusat ekonomi regional Asia Tenggara seperti Singapura, Johor dan Kuala Lumpur (Malaysia), serta Bangkok (Thailand). Dengan memanfaatkan posisi yang strategis ini, bahkan dengan penetapan Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka peluang kerjasama jasa dan perdagangan (intra-regional) dengan Palembang (Sumatera Selatan), Batam (Kepulauan Riau), Jakarta (DKI Jakarta), dan Pontianak (Kalimantan Barat) sangat terbuka lebar.

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI Tahun 2011-2025), salah satu koridor yang utama adalah Koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi. Pada tahun 2012 Kabupaten Bangka Barat ditetapkan sebagai salah satu daerah Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dalam MP3EI. KPI merupakan satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/ kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan. Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang posisinya sangat strategis karena merupakan pintu gerbang penghubung antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Koridor Sumatera. Jika peluang ini dimanfaatkan secara efektif dan optimal maka Kabupaten Bangka Barat akan memainkan peran yang sangat strategis sebagai pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala Kabupaten Bangka Barat, skala Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skala Provinsi Sumatera Selatan, dan skala nasional.

Dengan adanya potensi-potensi tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat meliputi:

a. Kawasan strategis provinsi :

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kec. Muntok).

2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
 3. Kepentingan Fungsi dan daya Dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.
- b. Kawasan strategis kabupaten:**
1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
 - Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang.
 - Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas ; "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok
 - Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
 2. Kepentingan sosial dan budaya
Kawasan strategis yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.
 3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Kritis di sekitar "Kolong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

1) Daerah Berpotensi Banjir/Genangan

Pada dasarnya Kabupaten Bangka Barat jarang terjadi banjir yang besar. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat adalah di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok meliputi Kampung Tanjung,

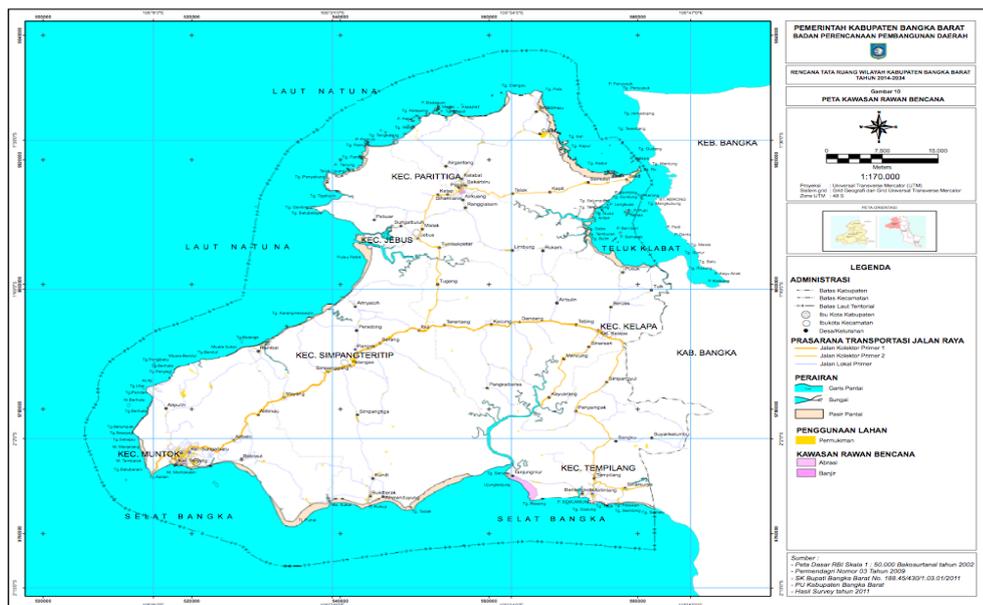
Kampung Ulu, dan Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Sungai Daeng, Kampung Culong, Ibukota Kecamatan Parittiga, dan Desa Belo Laut.

2) Daerah berpotensi bencana abrasi/pengikisan tanah oleh air laut

Sebagian wilayah Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi. Beberapa daerah/desa berpotensi abrasi antara lain adalah:

- Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- Desa Belo Laut Kecamatan Muntok;
- Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga;
- Desa Bakit Kecamatan Parittiga;
- Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang;
- Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang;
- Dusun Pala Kecamatan Parittiga;
- Desa Blembang Kecamatan Parittiga;
- Teluk Rubiah Kecamatan Muntok;
- Batu Rakit Kecamatan Muntok;
- Muntok Asin Kecamatan Muntok; dan
- Tungau Kecamatan Simpangteritip.

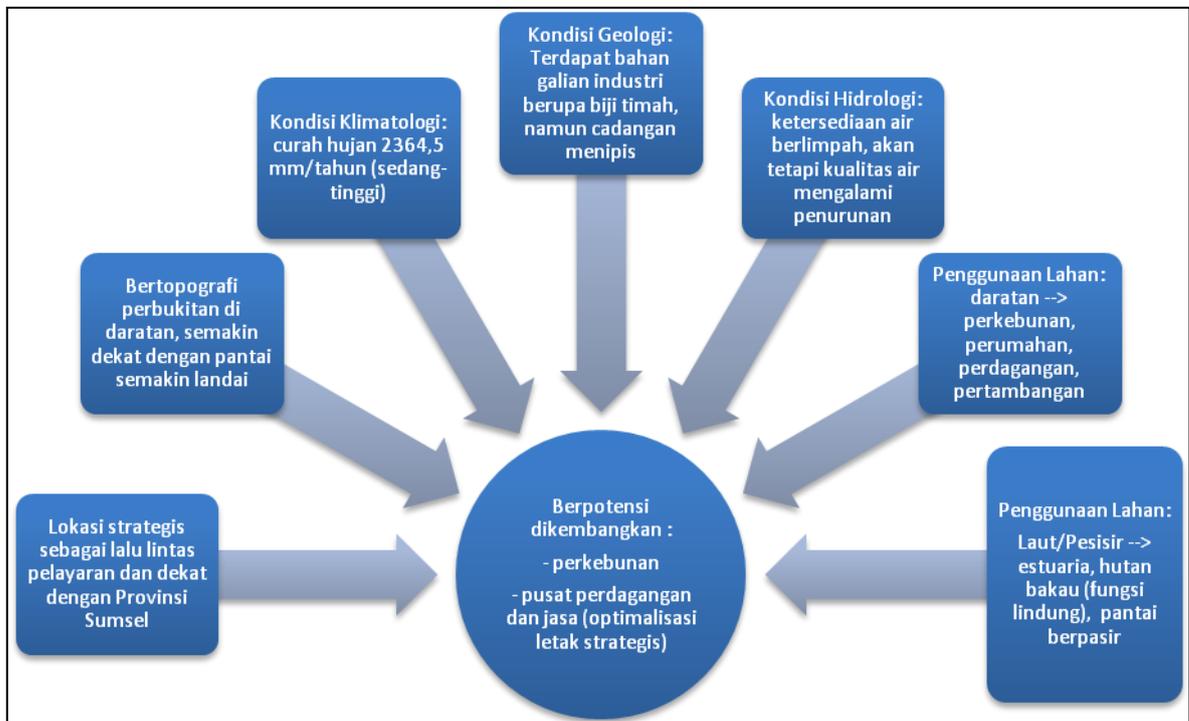
Gambar 2.2 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2035, Tahun 2014

Dari gambaran kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan kondisi wilayah rawan bencana, dapat tergambar keterhubungan ketiga kondisi tersebut sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya



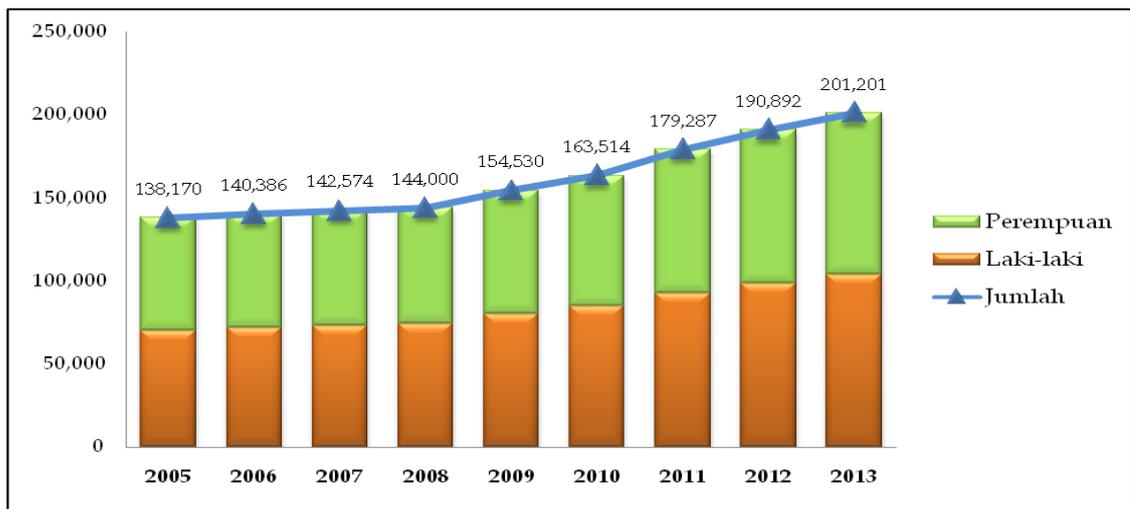
Sumber : Bappeda Kab. Bangka Barat, Tahun 2014 (diolah)

Potensi pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan kondisi geografis mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan) dan sektor perdagangan dan jasa. Perkebunan cenderung dapat dilakukan dengan kondisi topografi berupa perbukitan dan tanah yang memiliki tingkat kesuburan “sedang”. Sedangkan perdagangan dan jasa, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan letak Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut yang melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, keindahan ekosistem pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai turunan sektor perdagangan dan jasa.

2.1.4 Kondisi Umum Demografi Kabupaten Bangka Barat

Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat di tahun 2013 adalah 201.201 jiwa, dengan sex ratio 106,98. Nilai sex ratio tersebut mempunyai arti bahwa untuk setiap 100 penduduk wanita pada tahun 2013 di Kabupaten Bangka Barat terdapat juga penduduk laki-laki sebanyak 107 jiwa. Jika dilihat jumlah penduduk satu windu terakhir, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Barat yaitu 4,85%.

Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2013



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat, Tahun 2014 (diolah)

Dengan jumlah penduduk di tahun 2013 sebanyak 201.201 jiwa dibandingkan dengan luas total daratan sebanyak 285.100,90 Ha, maka dapat diperkirakan kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat secara umum yaitu 1,42 Jiwa/Ha kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Muntok yaitu 1,46 Jiwa/Ha sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Kelapa yaitu 0,37 Jiwa/Ha.

Berdasarkan verifikasi data penduduk Kabupaten Bangka Barat oleh Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan pada tahun 2014, maka data jumlah penduduk terdapat perbedaan dari pendataan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat.

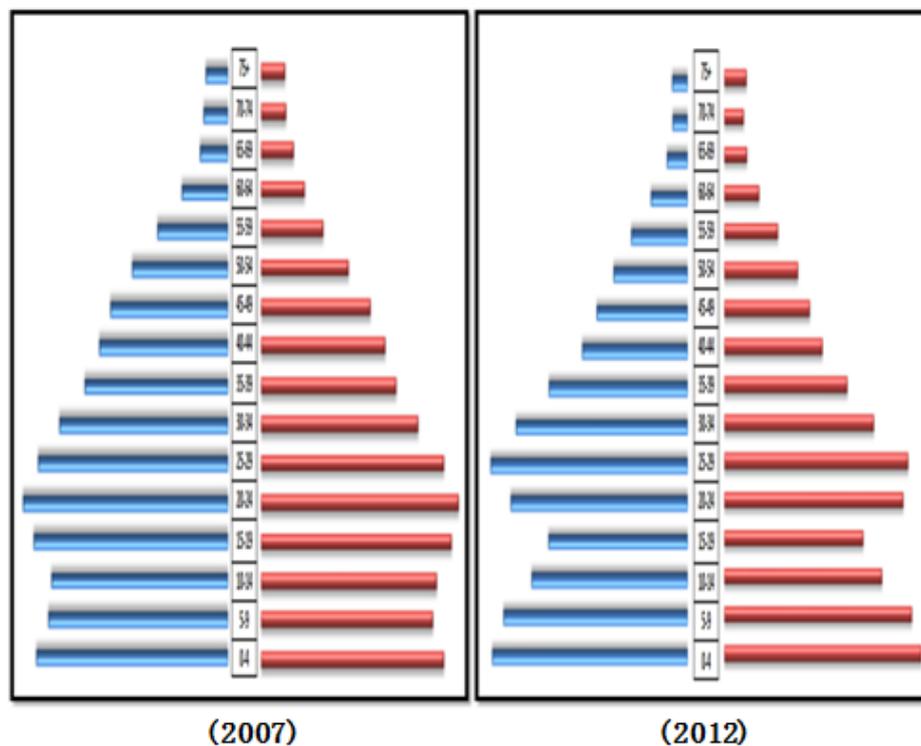
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Verifikasi Pusat

No.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	
		Tahun 2013	Tahun 2014
1	Muntok	47.603	45.902
2	Simpang Teritip	25.675	27.472
3	Jebus	18.774	19.694

No.	KECAMATAN	Jumlah Penduduk	
		Tahun 2013	Tahun 2014
4	Kelapa	30.478	32.074
5	Tempilang	24.668	25.261
6	Parittiga	31.206	30.321
	TOTAL	178.404	180.724

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2015

**Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2007 dan 2012**

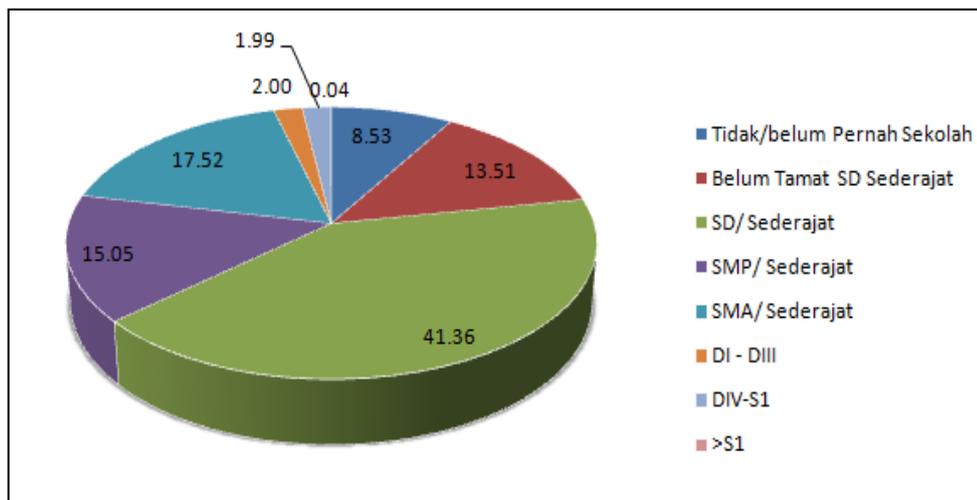


Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2013, Tahun 2013 (diolah)

Jika dilihat dari sisi komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di tahun 2012, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65,91%, serta kelompok umur yang tidak produktif (0-14 tahun & 65 tahun keatas) mencapai 34,09%. Dari data terkait kelompok umur dapat diketahui mengenai angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Bangka Barat sebesar 51,7% dengan arti 52 orang usia tidak produktif bergantung pada 100 orang usia produktif. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2007 dimana angka ketergantungannya mencapai 46,6%.

Terkait masalah kependudukan di tahun 2012 jika dilihat dari sisi pendidikan dari usia penduduk diatas 10 tahun, maka sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bangka Barat hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu mencapai angka 41,36%, sedangkan masyarakat yang mengenyam pendidikan jenjang pasca sekolah menengah atas hanya mencapai angka 4,03%.

Gambar 2.6 Penduduk Usia > 10 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan (%)



Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2013, Tahun 2013.

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan agama/Kepercayaan, penduduk di Kabupaten Bangka Barat memiliki kepercayaan yang beragam di setiap kecamatannya, namun jika dilihat dari tabel di bawah ini Islam merupakan agama yang dominan dianut oleh penduduk di Kabupaten Bangka Barat yaitu 90,70% atau 178.967 jiwa pada tahun 2012.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu	Konghucu	Jumlah
Muntok	47,769	1,242	647	2,278	42	1,177	53,155
Simpang Teritip	26,752	235	128	372	3	816	28,306
Kelapa	32,816	346	13	143	1	6	33,325
Tempilang	26,950	146	27	193	4	88	27,408
Jebus	19,453	125	29	788	2	128	20,525
Parittiga	25,227	1,030	219	6,817	9	1,304	34,606
Jumlah	178,967	3,124	1,063	10,591	61	3,519	197,325

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2013, Tahun 2013

**Tabel 2.5 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2010 - 2020**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu orang)
1.	2010	176,2
2.	2011	180,1
3.	2012	184,2
4.	2013	188,3
5.	2014	192,4
6.	2015	196,6
7.	2016	200,7
8.	2017	204,8
9.	2018	209,0
10.	2019	213,2
11.	2020	217,3

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012, Tahun 2013.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2020 relatif tidak signifikan pertumbuhannya, yaitu sebesar 30 ribu orang. Dengan demikian, dari segi ketersediaan lahan, penambahan jumlah penduduk relatif tidak menimbulkan ancaman dalam pembangunan ke depan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, terdapat lima aspek analisis, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) Pendapatan Per Kapita, (3) Laju Inflasi; (4) Angka Kemiskinan; (5) Indeks ketimpangan yaitu Indeks *Williamson*; dan (6) Angka Kriminalitas. Melalui analisis lima aspek ini diharapkan mampu memproyeksikan rencana pembangunan jangka panjang dalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

1. *Produk Domestik Regional Bruto*

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Meskipun indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, tetapi sesungguhnya perhitungan

ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Indikasi tersebut tersirat dalam angka pertumbuhan *output* karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian proses ini tentunya juga akan menghasilkan suatu aliran balas jasa yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian maka dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi tersebut juga akan meningkat.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa *riil* terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan angka-angka di dalam PDRB. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat perlu ditampilkan data-data yang mencerminkan kondisi perekonomian makro, yaitu salah satunya melalui laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2009 sampai dengan 2013.

Berdasarkan data di tabel 2.6 PDRB atas dasar harga berlaku, terlihat bahwa peningkatan terjadi sangat signifikan, dan apabila dibandingkan terhadap tabel 2.7 PDRB atas dasar harga konstan, terlihat perbedaan yang relatif besar. Kenaikan angka pada PDRB atas dasar harga berlaku yang besar ini menandakan bahwa dinamika PDRB di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh pengaruh inflasi makro.

Data PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa sektor (1) industri pengolahan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) pertanian, (4) perdagangan, hotel, dan restoran menjadi sektor-sektor utama penopang PDRB. Berdasarkan harga berlaku, persentase kontribusi sektor pertanian tidaklah sebesar persentasenya jika ditinjau dari harga konstan. Dapat disimpulkan bahwa nilai jual hasil sektor pertanian Kabupaten Bangka Barat masih relatif lemah terhadap perkembangan kebutuhan pasar. Sedangkan sektor perdagangan menunjukkan *trend* yang sama antara tinjauan atas dasar harga konstan dan harga berlaku, yang berarti sektor ini memiliki posisi tawar yang cukup baik terhadap perkembangan kebutuhan pasar. Dengan demikian, pengelolaan sektor industri pengolahan diharapkan mampu memperbaiki nilai jual hasil-hasil sektor pertanian yang selanjutnya menjadi komoditi unggulan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Dari data ini dapat terlihat bahwa pengelolaan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat belum optimal. Perlu ada strategi ekonomi yang terarah agar proses pengolahan sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah produk berlangsung lebih baik. Selain itu, menimbang pengaruh inflasi makro yang memberikan dampak pada ekonomi, maka Kabupaten Bangka Barat perlu meningkatkan konektivitasnya dengan daerah lain untuk mengefisienkan jalur distribusi barang dan jasa.

**Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2009-2013**

Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}
	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)
Pertanian	671.816	765.370	859.514	1.002.183	1.197.437
Pertambangan & Penggalian	769.430	868.778	941.878	1.026.029	1.076.008
Industri Pengolahan	2.866.335	3.199.005	3.493.459	3.739.981	3.990.904
Listrik,Gas & Air bersih	12.634	15.216	20.274	23.242	27.775
Bangunan	209.563	265.828	318.134	399.979	496.752
Perdagangan, Hotel & Restoran	729.382	878.486	1.069.753	1.286.475	1.549.706
Pengangkutan & Komunikasi	46.299	51.478	58.891	65.804	77.584
Keuangan, Persewaan,& Jasa Perusahaan	53.787	65.477	75.322	89.124	106.249
Jasa-jasa	240.639	306.227	389.387	475.537	585.129
Total PDRB	5.599.885	6.415.865	7.226.612	8.108.354	9.107.544

^r) Angka revisi

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

PDRB Kabupaten Bangka Barat selama 2009 – 2013 berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan linear. Peningkatan relatif terjadi di semua sektor ekonomi. Peningkatan ini merupakan peningkatan alamiah yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi strategis tertentu.

**Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2009-2013**

Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}
	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)
Pertanian	441.727	473.243	494.412	535.560	592.539
Pertambangan & Penggalian	297.356	304.975	313.989	326.980	326.528

Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}
	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)	Juta(Rp)
Industri Pengolahan	1.206.641	1.232.249	1.278.789	1.309.968	1.330.063
Listrik, Gas & Air bersih	5.083	5.657	6.755	7.240	7.837
Bangunan	86.556	98.394	110.316	125.992	142.706
Perdagangan, Hotel & Restoran	354.339	396.411	443.234	493.255	546.683
Pengangkutan & Komunikasi	23.630	24.928	26.306	27.743	30.245
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	34.868	38.243	42.103	46.121	50.924
Jasa-jasa	69.680	79.134	90.469	99.601	110.083
Total PDRB	2.519.880	2.653.234	2.806.373	2.972.460	3.137.608

^r) Angka revisi

^{*}) Angka Sementara

^{**}) Angka Sangat Sementara

Sumber : PDRB Kabupaten Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Dalam tabel 2.7 PDRB atas harga konstan, bisa terlihat bahwa sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi besar untuk ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Sektor-sektor ini terlihat juga berkembang secara stabil. Ketiga sektor ini menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang, sebagai alternatif sumber ekonomi Kabupaten Bangka Barat selain pertambangan dan penggalian yang akan habis masa produksinya dalam waktu yang relatif tidak lama.

**Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013**

Uraian	Pertumbuhan (%) Pada Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3,97	7,13	4,47	8,32	10,64
Pertambangan & Penggalian	3,51	2,56	2,96	4,14	-0,14
Industri Pengolahan	3,55	2,12	3,78	2,44	1,53
Listrik, Gas & Air bersih	3,34	11,30	19,42	7,17	8,25
Bangunan	10,52	13,68	12,12	14,21	13,27
Perdagangan, Hotel & Restoran	5,31	11,87	11,81	11,29	10,83
Pengangkutan & Komunikasi	0,76	5,50	5,53	5,46	9,02
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	6,58	9,68	10,09	9,54	10,41

Uraian	Pertumbuhan (%) Pada Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Jasa-jasa	8,41	13,57	14,32	10,09	10,52
Pertumbuhan Ekonomi	4,23	5,29	5,77	5,92	5,56

Sumber: PDRB Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat adalah 5,56% di tahun 2013, angka ini berada di bawah rata-rata pertumbuhan nasional yang mencapai angka 5,78%. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa iklim ekonomi di Kabupaten Bangka Barat mengalami kelesuan, yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal; (1) jenuhnya sektor ekonomi pertambangan dan penggalian; dan (2) belum adanya diversifikasi ekonomi yang mampu mendorong lompatan ekonomi.

Dari data di tabel 2.8 terlihat sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan industri pengolahan (yang masih didominasi pengolahan hasil tambang) mengalami pertumbuhan hanya 1,53%. Jika melihat table 2.9, nilai kontribusi sektor industri pengolahan dapat menunjukkan bahwa sektor tersebut masih menjadi basis perekonomian di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.9 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB

Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}	Rata-Rata Pertumbuhan
Pertanian	17,53%	17,84%	17,62%	18,02%	18,89%	1,90%
Pertambangan & Penggalian	11,80%	11,49%	11,19%	11,00%	10,41%	-3,08%
Industri Pengolahan	47,88%	46,44%	45,57%	44,07%	42,39%	-3,00%
Listrik, Gas & Air bersih	0,20%	0,21%	0,24%	0,24%	0,25%	5,58%
Bangunan	3,43%	3,71%	3,93%	4,24%	4,55%	7,27%
Perdagangan, Hotel & Restoran	14,06%	14,94%	15,79%	16,59%	17,42%	5,51%
Pengangkutan & Komunikasi	0,94%	0,94%	0,94%	0,93%	0,96%	0,70%
Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	1,38%	1,44%	1,50%	1,55%	1,62%	4,07%
Jasa-jasa	2,77%	2,98%	3,22%	3,35%	3,51%	6,15%

Sumber: PRDB Kabupaten Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Penilaian perkembangan dan potensi perkembangan sektor perekonomian tidak cukup hanya dilihat melalui pertumbuhan dari tahun per tahun, tetapi juga bagaimana peran dan kontribusinya terhadap sektor perekonomian pada tingkat wilayah yang lebih tinggi. Berdasarkan penilaian menggunakan metode perhitungan *location quotient*, dengan menggunakan data dasar kontribusi sektor terhadap PDRB, diketahui bahwa sektor yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Bangka Barat adalah sektor industri pengolahan, dengan nilai mencapai 2,17 (nilai>1). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan, yang masih didominasi pengolahan timah, tidak hanya memberikan kontribusi yang besar kepada PDRB Kabupaten Bangka Barat, tetapi juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya sektor industri pengolahan memiliki peranan penting dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.10 Proyeksi PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025

No.	Lapangan Usaha	Proyeksi PDRB Tahun 2025 (juta Rupiah)	Kontribusi
1.	Pertanian	1.049.407,11	19,95%
2.	Pertambangan Dan Penggalian	450.209,45	8,56%
3.	Industri Pengolahan	1.725.245,52	32,79%
4.	Listrik, Gas, Dan Air Bersih	26.854,01	0,51%
5.	Bangunan	512.105,60	9,73%
6.	Perdagangan, Hotel, Dan Restoran	1.663.246,97	31,61%
7.	Pengangkutan Dan Komunikasi	48.265,22	0,92%
8.	Keuangan, Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	126.466,69	2,40%
9.	Jasa-Jasa	374.951,41	7,13%
Produk Domestik Regional Bruto		5.261.294,58	100,00%

Sumber: PDRB Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014 (diolah)

Namun, berdasarkan tabel 2.9 di atas terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan dan industri pengolahan terhadap PDRB semakin mengalami penurunan, dengan pertumbuhan kontribusi masing-masing adalah -3,08% dan -3,00%. Kondisi ini didukung dengan hasil perhitungan menggunakan metode *shift share* dan *dynamic location quotient* (DLQ) yang menggunakan data proyeksi PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2025. Hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi cenderung bergeser dari sektor industri pengolahan menuju sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang ditunjukkan dengan nilai DLQ sektor perdagangan, hotel,

dan restoran sebesar 1,40 dan angka kinerja ekonomi sektor industri pengolahan yang bernilai negatif terbesar, yaitu -14.599,80.

2. *Pendapatan Per Kapita*

Secara umum, dari tahun 2009 hingga 2013 pendapatan per kapita Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan; dimana angka pada tahun 2013 sebesar 41,78 juta rupiah relatif lebih tinggi ketimbang pendapatan per kapita nasional yaitu 36,5 juta rupiah, namun jika dilihat per kecamatan maka terjadi ketimpangan pendapatan per kapita.

Berdasarkan tabel 2.11, terlihat bahwa tingkat pendapatan per kapita di Kecamatan Muntok relatif lebih tinggi ketimbang kecamatan lain. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena pemusatan aktivitas ekonomi serta penduduk terjadi di kecamatan ini yang merupakan ibukota Kabupaten Bangka Barat. Namun, data ini tentu menjadi catatan mengenai ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.11 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bangka Barat (Juta)

Wilayah	Pendapatan per Kapita Kabupaten Bangka Barat			
	2010	2011	2012	2013
Kecamatan Muntok	45,86	49,40	52,91	n/a
Kecamatan Simpang Teritip	25,75	27,31	28,71	
Kecamatan Jebus	28,03	29,51	31,22	
Kecamatan Kelapa	25,31	27,45	29,29	
Kecamatan Tempilang	26,10	27,77	29,48	
Kecamatan Parittiga	36,42	38,84	41,21	
Kab. Bangka Barat	31,67	34,92	38,18	41,78

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Melihat peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Bangka Barat yang mencapai 10,26% pada tahun 2010 ke tahun 2011, setelahnya peningkatan berkisar di angka 9,3-9,4 % per tahunnya. Data ini menunjukkan adanya optimisme ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Melihat perkembangan nasional, provinsi, dan juga kabupaten sekitar Bangka Barat, bisa kita ambil angka perhitungan konservatif, yaitu peningkatan sebesar 9% per tahunnya. Setelah dilakukan perhitungan, maka proyeksi pendapatan per kapita di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12 Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bangka Barat

Wilayah	Pendapatan per Kapita Kabupaten Bangka Barat (dalam juta rupiah)		
	2015	2020	2025
Kab. Bangka Barat	49.64	76.38	117.51

Sumber : Hasil Proyeksi, Tahun 2014.

3. Laju Inflasi

Tingkat harga menjadi salah satu variabel yang penting untuk menyusun kerangka kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Apabila tingkat harga tinggi, produsen diuntungkan karena dengan *supply* banyak akan mendapat profit yang lebih banyak juga. Sedangkan konsumen dirugikan karena akan mengurangi daya beli konsumen yang kemudian akan menurunkan kesejahteraan konsumen. Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat menjadi tidak ada artinya bila tingkat kenaikan harga jauh lebih tinggi karena kenaikan pendapatan juga diiringi kenaikan harga-harga barang-barang konsumsi di pasaran.

Tabel 2.13 Rata-Rata Inflasi Sektoral Tahun 2009 - 2013

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Rata-Rata Inflasi (%)	5,66	8,81	6,49	6,02	6,41

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Dalam penghitungan PDRB, perkembangan harga yang terjadi disebut dengan inflasi makro dari seluruh sektor ekonomi yang ada didasarkan pada perkembangan harga ditingkat produsen. Nilai yang dihitung di PDRB adalah harga produsen atau harga pada rantai perdagangan pertama. Sedangkan inflasi yang dikeluarkan BPS pada setiap bulan merupakan inflasi yang didasarkan pada tingkat harga di konsumen. Rata-rata inflasi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 adalah 6.41%, angka ini relatif lebih rendah ketimbang inflasi nasional yaitu 8.38%.

Inflasi sangat dipengaruhi oleh iklim ekonomi nasional dan global; sehingga memproyeksikan inflasi untuk jangka waktu hingga 2025 dinilai kurang relevan. Dinamika inflasi bisa diprediksi dan ditetapkan dalam kurun 1 tahun untuk memberikan analisa yang tepat. Perlu dicermati juga, angka inflasi yang relatif kecil bisa berarti bahwa ekonomi di sebuah daerah tidak memiliki keterkaitan erat dengan

daerah lain di dalam dan luar negeri; sehingga perputaran uang relatif hanya di dalam daerah tersebut. Namun demikian, melihat trend yang ada; Kabupaten Bangka Barat bisa menetapkan target normatif, bahwa angka inflasi Kabupaten Bangka Barat dibawah angka inflasi nasional.

4. Angka Kemiskinan

Kabupaten Bangka Barat mengalami sedikit perbaikan dalam angka kemiskinan. Dalam 5 tahun terakhir, presentasi penduduk miskin berkurang dari 5,22% menjadi 3,26%. Menariknya, meski garis kemiskinan mengalami perbaikan dari Rp. 246.852 di tahun 2009 menjadi Rp 366.365 ditahun 2013, namun jumlah penduduk miskin berkurang dari 7.566 jiwa menjadi 6.175 jiwa. Data ini menandakan bahwa secara umum, ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka Barat mengalami perbaikan.

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Garis Kemiskinan (Rp)	246.852	271.761	305.500	331.971	366.365
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	7.566	9.232	6.530	6.893	6.175
Persentase Penduduk Miskin	5,22	5,25	3,59	3,72	3,26
Indeks Kedalaman (P1)	1,04	1,09	0,57	0,47	0,33
Indeks Keparahan (P2)	0,31	0,30	0,14	0,11	0,04

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Dalam RPJPD ini, akan diproyeksikan tentang perubahan angka penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat. Ekspektasi yang dibangun adalah dengan adanya peningkatan ekonomi, maka angka kemiskinan juga semakin menurun. Melihat *trend* data yang ada, juga terlihat meski angka garis kemiskinan ditingkatkan; namun jumlah penduduk miskin relatif berkurang. Adapun proyeksi yang dilakukan adalah untuk melihat tingkat Garis Kemiskinan, Jumlah dan presentasi penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.15 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat

Uraian	2015	2020	2025
Garis Kemiskinan (Rp)	369.000	374.000	380.000
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	5.000	3.000	1.750
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,06	2,63	2,26

Sumber: Analisis Proyeksi, Tahun 2014.

Dalam menghitung proyeksi ini, dilakukan berdasarkan analisis *trend* yang dipadu dengan *expert judgement* hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi. Untuk angka garis kemiskinan proyeksi dilakukan dengan peningkatan 7% setiap tahunnya, sedangkan untuk jumlah penduduk miskin diprediksikan menurun sebanyak 10% setiap tahunnya, dan untuk presentasi penduduk miskin diproyeksikan menurun sebanyak 3% setiap tahunnya.

5. *Pemerataan Pendapatan Kabupaten Bangka Barat*

Dalam menganalisis pemerataan pendapatan, salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui indeks *williamson*. Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks *williamson* yang dikemukakan oleh *Williamson* (1965). *Williamson* mengemukakan model *Vw* (indeks tertimbang atau *weighted index* terhadap jumlah penduduk) dan *Vuw* (tidak tertimbang atau *un-weighted index*) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Tabel 2.16 Indeks Ketimpangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Wilayah	2010	2011	2012
Kecamatan Muntok	0,24	0,25	0,25
Kecamatan Simpang Teritip	0,07	0,07	0,07
Kecamatan Jebus	0,03	0,04	0,04
Kecamatan Kelapa	0,08	0,07	0,07
Kecamatan Tempilang	0,06	0,06	0,06
Kecamatan Parittiga	0,07	0,07	0,07
Kabupaten Bangka Barat	0,09	0,09	0,09
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0,294	0,291	0,284

Sumber: BPS, Tahun 2013 (diolah)

Indeks *Williamson* menggunakan data PDRB dan jumlah penduduk; bila mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila mendekati nol berarti sangat merata. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Muntok memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, sedangkan kecamatan lain relatif tidak begitu tinggi.

6. *Angka Kriminalitas*

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran, dan ketimpangan pembangunan. Sehingga melihat angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data di tabel berikut, terlihat terjadi peningkatan angka kriminalitas setiap tahunnya. Angka ini konsisten dengan stagnannya angka pertumbuhan ekonomi serta lambatnya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.17 Jumlah Kriminalitas yang Tertangani

No.	Jenis Kriminal	2009	2010	2011	2012	2013
1	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	166	178	197	293	347
2	Jumlah Penduduk	160.006	175.150	180.120	184.228	188.271
3	Angka Kriminalitas	10	10	11	16	18

Sumber: Polres Bangka Barat, Tahun 2014.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari beberapa indikator.

1. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat*

Salah satu upaya peningkatan kualitas manusia dapat dilihat dari seberapa besar upaya peningkatan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia. IPM mencakup tiga aspek pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Indikator

peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan ditunjukkan oleh capaian indeks pendidikan yang merupakan nilai rata-rata dari variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) yang disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2009-2013**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	AMH (%)	RRLS (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2009	67,66	92,85	6,72	625,64	69,77
2010	67,78	92,86	6,87	627,09	70,07
2011	67,9	93,59	6,95	629,50	70,54
2012	68,02	93,85	7,02	632,42	70,94
2013	68,32	94,08	7,09	635,73	71,46

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Jika dilihat dari perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2010 sampai tahun 2013, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat semakin membaik, yang ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia yang meningkat. Meskipun peningkatan IPM yang terjadi tidak terlalu besar, yaitu kurang dari 0,5, tetapi nilai positif yang terlihat adalah peningkatan kesejahteraan ini secara menyeluruh terjadi karena adanya kontribusi kenaikan nilai ketiga komponen pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Artinya dalam hal ini tidak terjadi ketimpangan pembangunan dari ketiga aspek tersebut.

Tabel 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2009-2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,55	72,86	73,37	73,78	74,29
Indonesia	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2014.

Meskipun terjadi peningkatan namun jika dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia pada wilayah yang lebih luas, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional nilai IPM Kabupaten Bangka Barat masih jauh di bawah. IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 2013 yang masih berada pada angka 71,46 berada 2,85 poin di bawah IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

nasional yang masing-masing angka pembangunan manusianya adalah 74,29 dan 73,81. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat harus segera dipacu agar kualitas manusianya semakin baik dan tidak kalah saing dengan daerah lain di sekitarnya maupun secara nasional.

Berdasarkan proyeksi pembangunan manusia pada tingkat nasional maupun provinsi dimana pada tahun 2025 diharapkan indeks pembangunan manusia dapat mencapai angka 76, maka jika pembangunan yang terjadi hanya mengikuti *trend* yang ada saat ini, Kabupaten Bangka Barat akan berada pada posisi 3 poin di bawah tingkat pembangunan manusia provinsi dan nasional. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan mengikuti *trend*, pada tahun 2025 IPM Kabupaten Bangka Barat baru mencapai angka 76,88. Namun, kondisi ini dapat berubah jika dipacu dengan arah dan kebijakan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan/atau ekonomi. Melihat sektor pendidikan dan kesehatan yang peningkatannya masih belum signifikan, maka sangat memungkinkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan manusia melalui percepatan pembangunan di sektor-sektor tersebut.

2. *Angka Partisipasi Pendidikan*

Angka partisipasi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah murid yang sedang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah murid yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia SD yang bisa diasumsikan dari usia 7 sampai dengan 12 tahun. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. Dengan demikian, kalau kita ambil contoh jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah dasar (SD) maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa APM SD merupakan perbandingan antara jumlah murid SD dan setara umur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Bangka Barat

Tahun	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	SMP	SMA
2009	131,02	93,42	56,93

Tahun	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	SMP	SMA
2010	113,12	84,86	57,16
2011	115,2	86,66	64,89
2012	114,15	80,4	62,88
2013	113,5	94	76,34
2014*	110,07	72,56	59,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2014.

* Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bangka Barat

Tahun	Angka Partisipasi Murni		
	SD	SMP	SMA
2009	104,8	56,77	32,9
2010	91,53	54,08	37,14
2011	95,92	54,23	42,4
2012	95,97	76,93	42,55
2013	96,04	77,05	42,63
2014*	94,14	50,74	37,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2014.

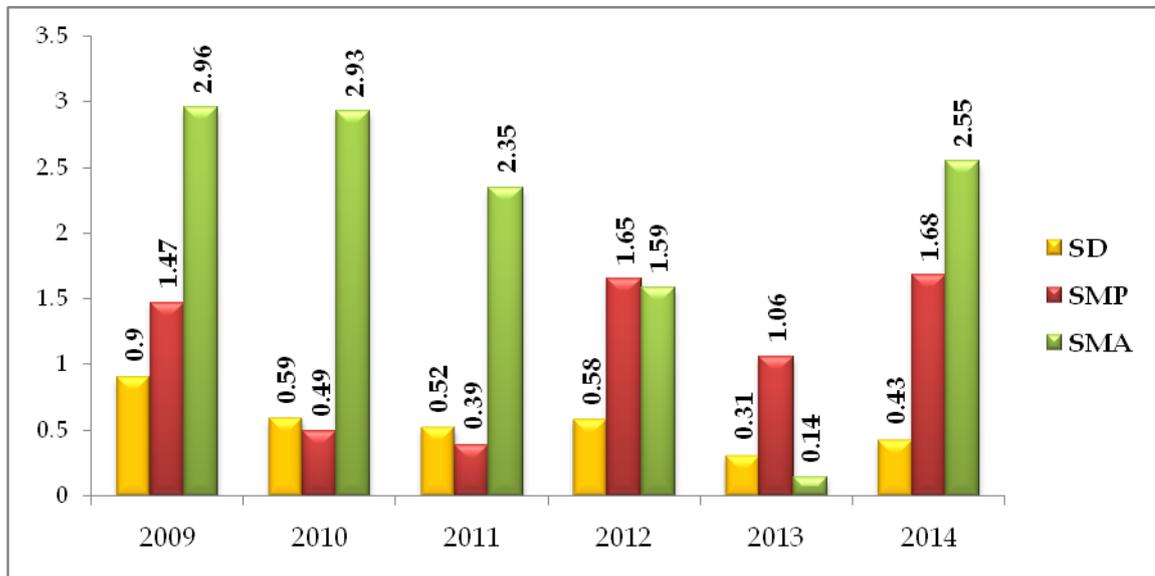
* Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014

Data APK di atas menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bangka Barat tinggi. Namun, ternyata semakin meningkat jenjang pendidikan nilai APK maupun APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ataupun kemauan masyarakat untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi masih kurang. Kemudian, jika dibandingkan antara APK dan APM, nilai keduanya berbeda, dengan perbedaan nilai sekitar 10-20%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sekitar 10-20% murid yang memiliki usia di luar kelompok usia pendidikan jenjang sekolah tertentu. Jika usia murid di atas kelompok usia pada jenjang pendidikannya, hal ini dapat mengindikasikan kondisi negatif yang menunjukkan adanya keterlambatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.

Akan tetapi, hal tersebut memungkinkan adanya indikasi positif kondisi masyarakat, yaitu usia murid di bawah kelompok usia jenjang pendidikannya. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan pendidikan yang dapat dikatakan percepatan

pendidikan serta kemampuan intelegensi murid yang tinggi. Artinya, kualitas kecerdasan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat baik.

Gambar 2.7 Angka Putus Sekolah Tahun 2009-2014 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah tantangan perkembangan budaya global. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah grup kesenian. Meskipun tidak ada data yang menjelaskan lebih rinci jenis kesenian yang dikembangkan oleh 17 grup kesenian yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan seberapa besar cakupannya. Sementara jika dibandingkan dengan luasan daerah, yang terdiri atas enam kecamatan, jumlah tersebut masih relatif kecil ditambah lagi belum adanya gedung kesenian. Padahal gedung kesenian dapat menjadi ikon kebudayaan daerah yang dapat mencirikan karakter budaya Kabupaten Bangka Barat, sekaligus menjadi media pengembangan budaya yang ada. Akan tetapi, peningkatan ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif dari kebudayaan kesenian di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.22 Indikator Seni Budaya dan Olahraga

Tahun	Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah Klub Olahraga
2009	0	11	1	98
2010	0	11	1	98
2011	0	16	1	98
2012	0	17	1	98

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, Tahun 2013.

Sedangkan kegiatan kepemudaaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih stagnan. Tidak ada pertumbuhan berarti dalam hal fasilitas dan klub olah raga. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah perlu menambah infrastruktur olah raga agar aktivitas dan klub olah raga semakin meningkat. Sedangkan untuk grup kesenian menunjukkan peningkatan. Namun meski meningkat, ketiadaan fasilitas kesenian membuat pertumbuhan klub kesenian baru menjadi semakin sulit dilakukan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dnegan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gambaran umum kondisi pelayanan umum daerah dapat dilihat melalui beberapa poin, yang terbagi ke dalam dua fokus urusan, yaitu fokus urusan wajib dan fokus urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahdaerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Bangka Barat tergambar dari pencapaian kinerja pembangunan dari 26 urusan wajib.

1. *Pendidikan*

Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator pendidikan seperti angka

partisipasi sekolah, Rasio Guru terhadap Murid, angka putus sekolah, dan angka melanjutkan.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk mengakomodasi seluruh penduduk usia pendidikan. Selama kurun waktu empat tahun. Semakin kecil rasio antara ketersediaan sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah maka semakin menurun kualitas pelayanan pendidikan.

Tabel 2.23 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Jenjang	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
SD/MI/Paket A	1:157	1:180	1:161	1:238	1:181	1:342
SMP/MTs/Paket B	1:224	1:246	1:243	1:322	1:261	1:324
SMA/SMK/MA/Paket C	1:398	1:389	1:421	1:481	1:434	1:308

Sumber data : LAKIP Kab. Bangka Barat 2014, Tahun 2015.

**) Data Proyeksi*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk usia sekolah SD dan SMP meningkat dengan pesat. Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah. Untuk ketersediaan sekolah SD, pada tahun 2013, satu sekolah SD perlu menampung 238 murid. Terjadi peningkatan kebutuhan dari tahun 2010 ketika satu sekolah SD hanya perlu menampung 157. Begitu juga dengan ketersediaan sekolah SMP, pada tahun 2013, satu sekolah SMP perlu menampung 322 murid. Terjadi peningkatan kebutuhan dari tahun 2010 ketika satu sekolah SMP hanya perlu menampung 224 murid. Namun, berbeda dengan ketersediaan SMA/SMK, dapat diketahui bahwa terjadi penambahan jumlah sekolah sehingga rasio antara ketersediaan SMA/SMK cenderung meningkat signifikan.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan per jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar yang juga menunjukkan kondisi ideal proporsi guru dan murid untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.24 Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
SD/MI/Paket A	1:18	1:16	1:16	1:16	1:18	1:18
SMP/MTs/Paket B	1:14	1:13	1:13	1:13	1:23	1:17
SMA/MA	1:11	1:11	1:12	1:11	1:15	1:15
SMK	1:08	1:11	1:13	1:11	1:18	1:15

Sumber : LAKIP Kab. Bangka Barat 2014, Tahun 2015.

Data menunjukkan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD tahun 2014 adalah 1/18. Angka ini berarti seorang guru SD/MI melayani (mengajar) murid sebanyak 18 orang. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bangka Barat untuk seluruh jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA cenderung tidak berubah signifikan. Hal tersebut dapat dipastikan karena penambahan jumlah guru juga diiringi dengan peningkatan jumlah murid pada jenjang tersebut.

Akan tetapi, rasio guru terhadap murid pada jenjang SMA dan SMK yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan rasio guru terhadap murid pada jenjang SD dan SMP bukan berarti ketersediaan guru pada jenjang tersebut jauh lebih banyak, melainkan jumlah murid pada jenjang SMA dan SMK yang jauh lebih rendah dari jenjang pendidikan dasar. Hal tersebut didukung dengan angka partisipasi sekolah yang mengalami penurunan dari tingkat SD ke SMP, kemudian semakin menurun di tingkat SMA/SMK. Selain itu juga angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA/SMK yang lebih tinggi dibanding angka putus sekolah di tingkat dasar.

2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup memadai, dan telah tersebar sampai tingkat Dusun/Desa. Untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Rasio Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bagi masyarakat. Semakin tinggi ketersediaan sarana kesehatan akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan catatan adanya dukungan akses pelayanan kesehatan yang baik.

Tabel 2.25 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

No.	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita	7,94	7,74	6,65	7,93	8,00	8,07
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,9	0,21	0,16	0,18	0,17	0,17
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Data rasio sarana kesehatan pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yang ada menunjukkan beberapa hal, yaitu peningkatan jumlah sarana kesehatan rumah sakit dan posyandu dan stagnansi jumlah puskesmas. Penurunan rasio puskesmas dapat dimungkinkan terjadi bukan karena berkurangnya sarana kesehatan puskesmas melainkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk sedangkan jumlah puskesmas tetap. Hal ini dapat dipastikan karena dari data kependudukan tidak terjadi penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Peningkatan rasio sarana kesehatan ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, meskipun jika dilihat dari nilainya, ketersediaan sarana kesehatan masih relatif rendah.

b. Rasio Tenaga Kesehatan

Kondisi tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Jumlah tenaga kesehatan, yang terdiri atas dokter dan tenaga medis lainnya, jika tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus

dilayani akan mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif, bahkan tidak tertanganinya kasus-kasus kesehatan.

Tabel 2.26 Rasio Dokter, Tenaga Medis Per 1000 Penduduk

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio Dokter per 1000 Penduduk	0,16	0,2	0,21	0,29	0,3	0,34
Rasio Tenaga Medis per 1000 Penduduk	0,22	0,25	0,25	0,34	0,36	0,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Rasio tenaga kesehatan diperoleh dengan membandingkan tenaga kesehatan, yaitu dokter dan tenaga medis dengan jumlah penduduk dikali 1000. Peningkatan rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat di atas menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan yang kemudian mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Kondisi ini sebanding dalam mendukung peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat.

3. *Lingkungan Hidup*

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah ditinjau dari indikator persentase penanganan sampah dan persentase penduduk berakses air minum.

Tabel 2.27 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013
1.	Presentase penanganan sampah	30,4	22,52	18,81	18,81
2.	Presentase Penduduk Berakses Air Minum	18,33	17,73	15,36	20,02
3.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,36	0,34	0,14	0,58
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100	100	100	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Dari tahun 2010 sampai tahun 2013, terdapat penurunan kinerja penanganan sampah. Hal ini dapat disebabkan volume sampah yang semakin meningkat, namun daya tampung pengelolaan sampah lebih rendah peningkatannya dibandingkan dengan volume sampah. Pemerintah daerah perlu menambah sarana angkutan

sampah dan juga menambah ketersediaan TPS maupun TPA. Sistem pemilahan sampah dan mekanisme daur ulang dapat menjadi opsi penanganan sampah sekaligus berpotensi untuk menambah pendapatan ekonomi.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, meskipun dinilai 100% tercapai, namun pengawasan tersebut dilakukan kepada perusahaan yang sudah mengurus amdal. Berdasarkan data LAKIP tahun 2013, perusahaan yang wajib amdal dan sudah mengurus sebesar 85%, belum mencapai target 100%.

4. *Pertanahan*

Masalah pembangunan terkait dengan pertanahan yang paling menonjol di Kabupaten Bangka Barat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepemilikan tanah dan proporsi kepemilikan lahan. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepemilikan tanah ditunjukkan dari rendahnya kepemilikan dan pembuatan sertifikat tanah yang sangat rendah. Hal tersebut menjadikan kepastian kepemilikan tanah oleh masyarakat menjadi tidak jelas. Sedangkan masalah lainnya adalah kepemilikan lahan di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh kepemilikan perusahaan besar. Kedua permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan menjadi penghambat dalam pembangunan karena pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanahan atau lahan.

5. *Pekerjaan Umum*

Indikator pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat dilihat dari beberapa kondisi terkait urusan pekerjaan umum, yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi, dan rasio tempat ibadah.

a. *Kinerja Jaringan Jalan*

Kondisi jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Kondisi jaringan jalan berkaitan dengan konektivitas suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya mengingat jalur perhubungan utama masih dipegang oleh perhubungan darat. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Tabel 2.28 Jaringan Jalan Berdasarkan Kemantapan

Indikator	2019		2010		2011		2012		2013	
	KM	%								
Mantap Sempurna	279.642	43,19	353.504	42,64	397.226	41,36	405.089	51,13	364.954	45,69
Mantap Marginal	272.575	42,10	353.686	42,66	460.591	47,96	247.430	31,23	309.499	38,75
Tidak Mantap	95.130	11,22	121.806	14,69	102.535	10,68	139.825	17,65	124.282	15,56
Total	647.347		828.996		960.352		792.344		798.735	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Secara keseluruhan kondisi jaringan jalan yang mantap melebihi 80% meskipun proporsi jaringan jalan mantap sempurna masih kurang dari 50% dari total jaringan jalan di Kabupaten Bangka Barat. Dan pada tahun 2013 terjadi penurunan kualitas jalan sebesar lebih dari 5%.

Tabel 2.29 Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi (%/KM)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kondisi Baik (B)	43,19	42,64	41,36	51,13	45,69	71,17
Kondisi Sedang (S)	42,10	42,66	47,96	31,23	38,75	12,30
Kondisi Rusak (R)	7,75	11,19	7,74	13,81	10,83	5,78
Kondisi Rusak Berat (RB)	6,93	3,51	2,93	3,84	4,73	10,74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Bila dilihat dari kondisi tersebut, dapat dikatakan kondisi jaringan jalan di Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan cukup baik karena lebih dari 40% jalan sudah berada dalam kondisi baik. Meskipun dari dinamisasinya mengalami penurunan kualitas di tahun 2013.

b. Jaringan Irigasi

Kabupaten Bangka Barat adalah wilayah yang memiliki potensi perkebunan yang luas. Akan tetapi kondisi pengairan (irigasi) di wilayah ini masih kurang. Selain sumber air yang mulai terdegradasi oleh kegiatan penambangan timah, pembangunan irigasi teknis pun juga masih belum banyak menjadi perhatian dalam mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat. Padahal

selain perkebunan, pertanian lain seperti tanaman pangan perlu dan berpeluang untuk dikembangkan di kabupaten ini.

c. Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk

Pelayanan peribadahan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Tabel 2.30 Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk

Indikator	2010	2011	2012
Rasio Tempat Beribadah per Satuan Penduduk	1.74	1.69	1.62

Sumber: LAKIP Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

6. Perumahan Rakyat

Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perumahan rakyat dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Pemenuhan Air Minum, Listrik, dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2010 sekitar 10,62% menjadi 84,79% di tahun 2014.

Tabel 2.31 Persentase Pemenuhan Air Bersih, Listrik, dan Sanitasi

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	10,62	70,14	82,51	83,45	84,79
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	38,15	55,25	78,07	83,5	84,6
3.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	67,53	50,32	66,88	73,02	76,01

Sumber: LPPD dan LAKIP Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Sedangkan untuk pelayanan listrik, saat ini 100% jaringan listrik sudah menjangkau seluruh perdesaan di Kabupaten Bangka Barat, meskipun tidak seluruhnya yang menggunakan listrik. Berdasarkan data LPPD dan LAKIP Kabupaten Bangka Barat, rumah tangga pengguna listrik di tahun 2010 mencapai 38,15%. Persentase ini meningkat signifikan hingga mencakup 84,6% pada tahun 2014. Namun, kapasitas listrik di Kabupaten Bangka Barat terbatas pada konsumen kecil seperti rumah tangga, belum mampu menyediakan listrik

dalam kapasitas besar untuk kebutuhan kawasan industri. Salah satu implikasi akibat ketersediaan listrik yang terbatas adalah jika dilakukan pemeliharaan terhadap unit pembangkit listrik, maka akan terjadi pemadaman di beberapa lokasi. Meskipun, sampai saat ini, pemadaman listrik relatif jarang dilakukan.

Selain air bersih dan listrik, kewajiban pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat adalah memenuhi kebutuhan sanitasi. Kondisi Kabupaten Bangka Barat yang sebagian besar masih berupa hutan dengan kepadatan penduduk yang rendah, menjadikan kondisi perumahan di daerah ini relatif tidak kumuh. Terlihat pada tabel 2.31, pada tahun 2010, rumah tangga yang bersanitasi mencapai 67,53%. Persentase ini sempat menurun pada tahun berikutnya, tahun 2011 menjadi sebesar 50,32%. Namun, pada tahun 2014, persentasenya meningkat hingga menjadi sebesar 76,01%.

b. Rasio rumah layak huni

Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat terlihat dari kualitas rumah dan permukiman secara umum. Rasio rumah layak huni menunjukkan tingkat kelayakan hunian masyarakat, yang secara tidak langsung menunjukkan kualitas kehidupan dasar masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Pada umumnya, permukiman di Kabupaten Bangka Barat relatif tidak padat sehingga jarang ditemui permukiman kumuh. Dengan demikian, rasio rumah maupun permukiman layak huni bernilai tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.32, dan tabel 2.33.

Tabel 2.32 Rasio rumah layak huni(%)

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio rumah layak huni	98,98	100	97,23	97,23	92,49

Sumber: LPPD Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Tabel 2.33 Persentase permukiman layak huni

Indikator	2010	2011	2012	2013
Rasio permukiman layak huni	98.98%	100%	97.23%	97.23%

Sumber : LPPD Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Rumah dan permukiman layak huni pada tahun 2010-2013, memiliki persentase di atas 97%. Hal ini menunjukkan nilai yang sangat baik, meskipun terlihat ada penurunan persentase dari tahun 2011 sebesar 100%, menjadi sebesar 92,49% pada tahun 2014.

7. *Penataan Ruang*

Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait urusan penataan ruang dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang pada umumnya diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah.

Tabel 2.34 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	0,02	0,27	36,02	36,02	36,02

Sumber: LPPD Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Pada tabel 2.34, terlihat bahwa rasio RTH di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 36,02%. Namun, ada perbedaan yang sangat besar pada tahun sebelumnya, tahun 2011 dan 2010 yang memiliki nilai rasio sebesar 0,27 dan 0,02. Hal ini disebabkan adanya perubahan definisi RTH dan aturan deliniasinya sehingga seolah-olah ada perubahan sangat besar yang hampir mustahil terjadi.

b. Persentase Bangunan Ber-IMB

Salah satu komponen pengendalian ruang oleh pemerintah daerah adalah dengan mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang akan mendirikan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan

gedung harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.35 Persentase Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Indikator	2011	2012	2013	2014
Bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1,65%	2,38%	2,70%	3,03%

Sumber : LAKIP Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Pada tabel terlihat bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan mekanisme IMB dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan sangat rendah, yaitu rata-rata sebesar 2,2%. Dengan demikian, ada sekitar 97% bangunan yang tidak memiliki IMB dan rentan menyalahi aturan tata ruang.

8. Perhubungan

Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perhubungan dapat diketahui dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Arus Penumpang Angkutan Umum

Semakin maju suatu daerah dapat terlihat dari kualitas pemerintah daerah dalam melayani kebutuhan transportasi publik. Angkutan umum yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat diantaranya adalah bis, kapal laut, dan pesawat udara.

Tabel 2.36 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

No.	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penumpang Bis Datang	-	-	43.410	107.058	131.619
2	Jumlah Penumpang Bis Berangkat	-	-	48.873	102.176	116.471
3	Jumlah Penumpang Kapal Laut Datang	143.914	199.586	255.321	198.690	136.370
4	Jumlah Penumpang Kapal Laut Berangkat	140.090	167.866	201.094	230.145	190.845
5	Jumlah Penumpang Datang Pesawat Udara	4.273	544.135	657.063	733.269	729.732
6	Jumlah Penumpang Berangkat Pesawat Udara	4.278	552.213	667.063	666.793	737.387

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka, Tahun 2014.

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling diminati masyarakat. Namun, jumlah yang besar ini dikarenakan perhitungan penumpang yang tidak hanya datang maupun berangkat dari Kabupaten Bangka Barat, melainkan jumlah ini menggambarkan kondisi Kota Pangkal Pinang sebagai ibukota provinsi yang memiliki bandar udara. Sedangkan untuk moda transportasi yang umum digunakan masyarakat Kabupaten Bangka Barat adalah kapal laut dan bis. Dari segi jumlah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penumpang bis maupun penumpang kapal laut. Namun, dari tahun 2011-2013, penumpang bis cenderung bertambah jumlahnya, sedangkan penumpang kapal laut cenderung berkurang. Jika hal ini terus berlangsung, moda transportasi bis dapat lebih populer dibandingkan moda kapal laut.

b. Jaringan Trayek

Tabel 2.37 Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jaringan trayek perkotaan	-	-	-	1 jaringan	1 jaringan
2.	Jaringan trayek perdesaan	5 jaringan				

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2014.

Jaringan trayek perkotaan pada tahun 2014 yaitu 1 jaringan dengan trayek Terminal Muntok – Pelabuhan Tanjung Kalian. Sementara untuk jaringan trayek perdesaan yaitu terminal Muntok - terminal Parittiga, terminal Muntok-terminal Kelapa, dan terminal Muntok - Kecamatan Tempilang, terminal Muntok - Mayang, Muntok – Kundi.

c. Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.38 Uji KIR Angkutan Umum

No.	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	1.898	2.104	2.335	2.239	2.828

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2014.

Sampai dengan tahun 2013, pengujian KIR dilakukan di Pangkalpinang dikarenakan Bangka Barat belum memiliki alat uji KIR. Namun pada tahun 2013 telah memiliki 1 unit kendaraan uji KIR keliling yang akan dioperasikan pada tahun 2014.

d. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki dua pelabuhan Laut, yaitu Pelabuhan Muntok dan Pelabuhan Tanjung Kelian. Kondisi pelabuhan ini semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekati ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai.

Tabel 2.39 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pelabuhan Udara	0	0	0	0	0
2	Pelabuhan Laut	4	4	4	4	4
3	Terminal Bis	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika, Tahun 2014.

Sedangkan untuk terminal, Kabupaten Bangka Barat memiliki terminal tipe C, yaitu untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota. Namun, rute bis yang ada belum melingkupi hingga ke pelosok daerah pesisir atau yang terpencil yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

9. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, yang menganut asas kekeluargaan. Koperasi adalah soko guru ekonomi Indonesia. Dalam era desentralisasi daerah, peran koperasi berperan besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh di daerah guna menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber kungan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar. Dalam

konteks Kabupaten Bangka Barat, peran koperasi perlu diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan potensi setempat.

Tabel 2.40 Jumlah Koperasi dan KUD dan Anggota per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Koperasi	KUD	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Muntok	34	1	35	6.382
Simpangteritip	7	1	8	801
Kelapa	17	1	18	2.808
Tempilang	10	3	13	2.630
Jebus	6	-	6	96
Parittiga	2	1	3	270
2013	76	7	83	12.987
2012	69	7	76	12.248
2011	53	7	60	11.468
2010	45	7	52	10.644
2009	42	7	49	9.871

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka, 2013

Pada tahun 2012, terdapat 76 unit koperasi yang beroperasi di Kabupaten Bangka Barat, yang terdiri dari koperasi non Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 69 unit dan KUD sebanyak 7 unit. Sebagian besar koperasi terkonsentrasi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Kelapa. Ada 49 koperasi yang terletak di dua kecamatan ini, sisanya yakni 27 koperasi, tersebar di empat kecamatan lainnya. Meski masih belum tersebar secara merata di enam kecamatan yang ada, paling tidak setiap kecamatan sudah memiliki koperasi yang tentunya ikut berperan dalam ekonomi rakyat setempat.

Tabel 2.41 Jumlah dan Pertumbuhan Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014

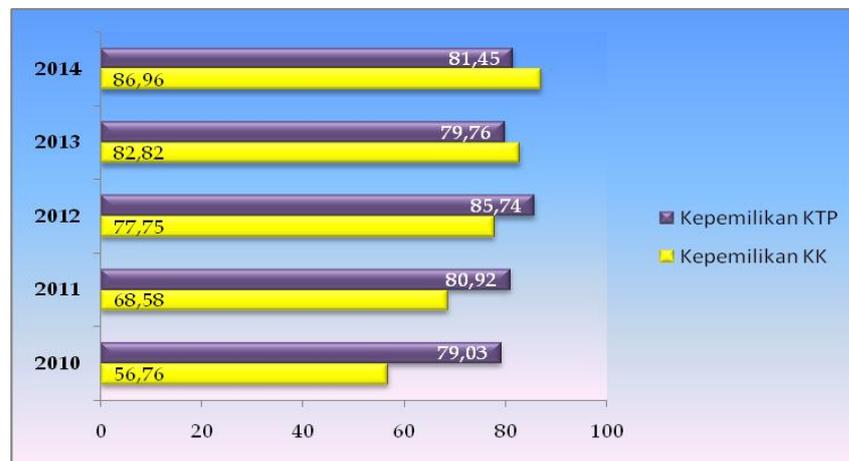
Jenis Usaha	Jumlah				Pertumbuhan		
	2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Usaha Mikro	36.465	38.418	38.418	39.360	5,36	-	1,02
Usaha Kecil	13.572	14.415	14.454	14.481	6,21	0,27	0,18
Usaha Menengah	67	95	98	104	41,79	3,16	6,12

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Bangka Barat

10. Kependudukan dan Cacatan Sipil

Pencapaian indikator cakupan penduduk ber KTP sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Selain proses pencetakan E-KTP yang masih dilaksanakan di pusat, kuota perekaman E-KTP juga secara teknis membatasi pelaksanaan perekaman E-KTP. Sampai pada tahun 2013 pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat masih mengeluarkan KTP Manual, hal ini dilakukan untuk mengakomodir penduduk yang belum memiliki E-KTP (yang telah melaksanakan perekaman namun belum memegang E-KTP).

Gambar 2.8 Persentase Kepemilikan KTP dan KK Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014

11. Ketenagakerjaan

Informasi mengenai ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator untuk menilai kemakmuran suatu wilayah. Hal ini dikarenakan faktor ketenagakerjaan berkaitan erat dengan perkembangan dan pembangunan ekonomi dan sosial wilayah. Kedua faktor tersebut secara timbal balik saling mempengaruhi satu sama lain. Pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan menarik minat penduduk luar daerah untuk mendatangi hingga menetap di wilayah tersebut. Di lain pihak, semakin tinggi aktivitas ekonomi wilayah menuntut sumber daya manusia yang semakin tinggi baik secara kuantitas maupun kualitas.

a. Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah masyarakat yang berusia kerja, yaitu 15 tahun ke atas.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Tabel 2.42 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014

Uraian	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja	70.929	93.757	87.221	84.949	92.206	89.823
Bekerja	66.824	89.828	84.044	81.732	88.601	88.740
Pengangguran	4.105	3.929	3.177	3.217	3.605	1.083
Bukan Angkatan Kerja	40.143	38.187	38.700	44.897	41.092	44.010
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+)	111.072	131.944	125.921	129.846	133.298	133.833
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	63,86	71,06	69,30	65,42	69,17	67,12
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	5,79	4,19	3,64	3,79	3,91	1,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2014

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Barat yakni Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 67,12% pada tahun 2014. Artinya pada 100 penduduk usia kerja, secara rata-rata 67 orang di antaranya tergolong dalam angkatan kerja sedangkan 33 orang lainnya termasuk bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,21%, yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian, kesempatan kerja secara sederhana dapat diartikan sebagai daya tampung lapangan kerja bagi para pencari kerja.

Tabel 2.43 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	(%)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	19.142	10.464	29.606	36,22%
Pertambangan dan Penggalian	19.154	717	19.871	24,31%
Industri	2.183	692	2.875	3,52%
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	5.414	6.682	12.096	14,80%
Lembaga keuangan, real estat, usaha persewaaan, dan jasa perusahaan	895	299	1.194	1,46%
Jasa Kemasyarakatan, sosial, dan perorangan	5.807	5.850	11.657	14,26%
Lainnya	4.290	143	4.433	5,42%
Total	56.885	24.847	81.732	100,00%

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2013

Ditinjau dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Barat masih banyak yang berkecimpung di sektor primer yakni sektor pertanian dan pertambangan. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang tertinggi yakni 36,22%, terutama ada perkebunan kelapa sawit, lada dan karet. Penduduk yang bekerja di sektor pertambangan berada pada posisi kedua dengan persentase sebanyak 24,31%. Kemudian, banyak juga penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.(14,80%) dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan (14,26%). Sektor yang paling sedikit dalam menyerap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat adalah sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (1,46%). Apabila ditinjau segi gender, sektor pertambangan dan penggalian lebih didominasi oleh penduduk laki-laki, dan sektor pertanian lebih didominasi oleh penduduk wanita.

12. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era sekarang ini, peran perempuan telah merambah berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, namun ikut pula mencari nafkah bagi keluarga. Kemandirian perempuan juga menempatkannya pada posisi tawar yang setara atau bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dari

laki-laki. Untuk itu, terkait pembangunan daerah informasi mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja juga perlu ikut dipertimbangkan.

Tabel 2.44 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase
Muntok	590	624	1.214	51,40%
Simpang Teritip	133	169	302	55,96%
Kelapa	196	231	427	54,10%
Tempilang	176	209	385	54,29%
Jebus	129	155	284	54,58%
Parittiga	125	164	289	56,75%
Total	1.349	1.552	2.901	53,50%

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka, BPS Kabupaten Bangka Barat, 2013

Berdasarkan data di atas, secara umum tidak terlihat perbedaan yang berarti antara proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintah. Bahkan, jumlah perempuan sedikit lebih banyak dari pada laki-laki, yang bekerja pada lembaga pemerintah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.

13. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga diharapkan dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan pemerintah adalah 2 orang anak lebih baik.

Tabel 2.45 Persentase Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Tahun 2009-2014

Kecamatan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Muntok	74,27	77,93	71,73	71,60	76,88	79,79
Simpangteritip	68,04	64,38	67,53	77,96	80,22	83,71
Kelapa	64,01	126,11	72,48	81,04	84,54	85,45
Tempilang	78,36	74,11	66,00	75,60	73,14	86,05
Jebus	69,40	37,15	75,11	80,25	74,83	78,44
Parittiga	-	73,62	72,71	81,31	86,64	85,07
PUS yang ber KB (%)	71,02	73,01	70,80	77,41	79,52	83,02

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka, BPS Kab. Bangka Barat

Dalam upaya pengendalian jumlah penduduk dan memperkecil angka ketergantungan, program Keluarga Berencana memerankan peranan vital di daerah. Data yang ada menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bangka Barat cukup sadar akan pentingnya program ini. Hal ini ditunjukkan dari data di atas, dimana di tiap kecamatan, lebih dari 70% pasangan usia subur ikut berpartisipasi dalam program KB.

14. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat suatu daerah agar dapat bersaing secara global. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung pertukaran informasi dan terjadinya komunikasi. Semakin baik akses masyarakat terhadap teknologi, maka semakin baik pula pemahaman terhadap informasi.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang perkembangannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan wilayah sekitarnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah diutarakan bahwa terdapat banyak potensi-potensi internal daerah Bangka Barat, yang bisa berkembang dengan adanya suntikan investasi ataupun kerjasama dengan investor dari luar daerah. Oleh karena itu, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan salah satu poin krusial dalam menunjang perkembangan dan pembangunan di wilayah ini. Apalagi dengan kondisi fisik geografisnya yang berada pada wilayah kepulauan, perlu adanya infrastruktur penunjang yang bisa mengatasi kendala (*barrier*) fisik ini. Teknologi nirkabel (*wireless*) merupakan salah satu tumpuan dalam sistem informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat. Keberadaan jaringan telekomunikasi dari PT. Telkom (*Speedy*) beserta operator-operator telepon seluler saat ini menjadi primadona untuk komunikasi jarak jauh masyarakat setempat.

Tabel 2.46 Jumlah Pelanggan Telepon dan Speedy di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012

Kecamatan	Pengguna Telepon	Pengguna Speedy	Total
Muntok	1.396	266	1.662
Simpang Teritip	-	-	-
Kelapa	58	16	74
Tempilang	8	10	18

Kecamatan	Pengguna Telepon	Pengguna Speedy	Total
Jebus	69	23	92
Parittiga	677	172	849
Total	2.208	487	2.695

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2013

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah mencapai taraf yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Perannya pun vital terhadap berbagai aspek pembangunan daerah. Penduduk Kabupaten Bangka Barat tidak boleh ketinggalan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi apabila ingin terus berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah luar. Data di atas menunjukkan bahwa teknologi internet telah merambah ke semua kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, kecuali Simpang Teritip yang belum tersedia data terkait teknologi informasi ini.

15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditinjau jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap LSM, ormas dan OKP serta pembinaan politik daerah.

Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 keg	2 keg	1 keg	-	1 keg
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1 keg	2 keg	2 keg	1 keg	2 keg

Sumber : LPPD, 2014

16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Otonomi daerah tentu menjadi perhatian dari Indonesia setelah reformasi; keberhasilan maupun kegagalan otonomi daerah tentu menjadi sebuah catatan tersendiri untuk menilai apakah reformasi yang melahirkan desentralisasi ini telah mampu mengubah keadaan bangsa ini menjadi lebih baik. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari beberapa capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.48 Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2010 s.d 2014

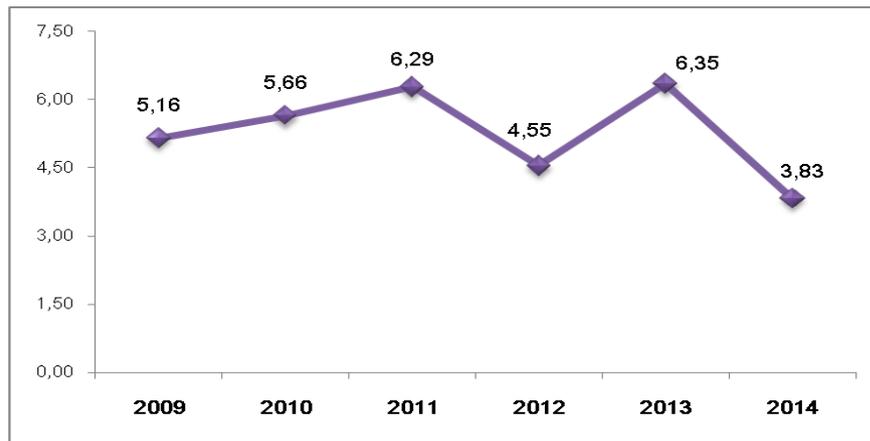
No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,89	7,08	6,29	5,91	5,67
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	52,84	48,19	45,26	31,16	44,18
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2,38	2,50	2,75	2,84	2,94

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bangka Barat, tahun 2014

Berdasarkan data diatas mengenai pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Terlihat bahwa terjadi penurunan pada rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Untuk membangun kesatuan keamanan masyarakat yang baik, tentu jumlah ini perlu ditingkatkan.

Sedangkan tabel berikut menjelaskan mengenai derajat otonomi fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat 2009-2013. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat meningkat dalam 4 tahun terakhir; hanya saja jumlah yang ada masih belum mampu meningkatkan perbandingan PAD terhadap Dana Perimbangan yang diterima. Angka 6.36% DOFD menunjukkan masih sangat bergantungnya pembangunan di Kabupaten Bangka Barat terhadap perimbangan daerah. Membandingkan dengan daerah tingkat II lainnya; DOFD mereka mencapai angka 10%; atau lebih. Sehingga melihat dari data ini perlu di rekomendasikan strategi untuk peningkatan PAD Kabupaten Bangka Barat kedepannya.

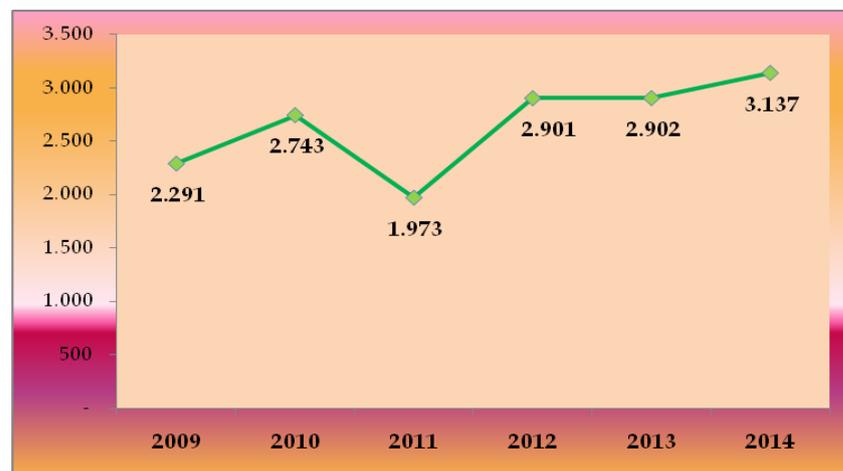
**Gambar 2.9 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014**



Sumber: DPPKA Kab. Bangka Barat, Tahun 2015.

Terkait dengan jumlah pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Bangka Barat; dengan akan diberlakukannya Moratorium penerimaan PNS oleh pemerintah baru; maka angka ini akan stagnan/tetap hingga 5 tahun mendatang. Yang bisa dilakukan oleh Kabupaten Bangka Barat dengan 2.902 PNS yang ada, adalah dengan memetakan serta mendistribusikan dengan jelas posisi yang tepat untuk masing-masing SKPD yang ada.

**Gambar 2.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2014**



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

17. Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) merupakan instrumen penting dalam melakukan analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan menjadi bahan pertimbangan atau penentuan kebijakan dan

perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi secara umum sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melakukan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam penyusunan rencana pembangunan ini, terlihat bahwa bidang statistik di Kabupaten Bangka Barat masih belum baik. Terdapat banyak data/informasi yang tidak dimiliki atau tidak lengkap oleh pemerintah daerah kabupaten, dan terdapat banyak data yang tidak valid karena belum dilakukan pembaharuan.

18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan identik dengan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, kebebasan ini seringkali terbatas karena ketidakmampuan dalam bersuara (*voiceless*) dan ketidakberdayaan (*powerless*). Umumnya, masyarakat dengan kondisi seperti ini adalah masyarakat perdesaan yang memang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur fisik dan teknologi terkini. Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh masyarakat perdesaan ini yang tentunya menuntut strategi tertentu dalam upaya pemberdayaannya.

Pada dasarnya, ada empat unsur pemberdayaan masyarakat yaitu inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Inklusi terkait dengan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi terkait dengan bagaimana mereka diberdayakan dan apa peran yang dimainkan oleh setiap kelompok masyarakat. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, sudah merupakan 'motto' wajib yang kerap didengungkan dewasa ini. Ide pembangunan dari bawah (*bottom-up*) telah dipercaya akan menjadikan program pembangunan memiliki legitimasi yang

Kendala yang dihadapi pada level pemerintah desa di Indonesia, umumnya dikarenakan peran aparatur desa yang masih terbatas pada penanganan persoalan administrasi, sedangkan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nyaris tak terdengar. Oleh karena itu, berbekalkan nuansa otonomi daerah yang masih kental di negeri ini, perlu adanya penguatan pemerintah desa supaya memiliki peran dan kedudukan yang lebih strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Upaya penguatan posisi pemerintah desa

antara lain dengan menghadirkan Undang-undang tentang desa serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

19. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditinjau dari jumlah sarana sosial yang dimiliki dan cakupan (persentase) penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah ditangani dan ditingkatkan kemampuan/kemandirian hidupnya. Sampai dengan tahun 2013, jumlah sarana sosial yang ada di Kabuapten Bangka Barat terdiri dari satu buah panti asuhan. Sementara dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat terdiri dari:

**Tabel 2.49 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012**

No	Jenis PMKS	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	Anak Balita Terlantar		22
2	Anak Terlantar		103
3	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		334
4	Lanjut Usia Terlantar		300
5	Penyandang Disabilitas		820
6	Fakir Miskin	2.146	5.031
7	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1.193	
8	Keluarga Rentan	6	
9	Anak Berhadapan Dengan Hukum		17
10	Anak Jalanan		-
11	Korban Tindak Kekerasan		1
12	Tuna Susila		-
13	Pengemis		-
14	Gelandangan		1
15	Bekas Warga Binaan Lapas		46
16	Korban Penyalahgunaan NAPZA		4
17	Komunitas Adat Terpencil	-	
18	Keluarga Bermasalah Sosial	5	
19	Korban Bencana Alam	169	
20	Korban Bencana Sosial	14	

No	Jenis PMKS	Jumlah	
		KK	Jiwa
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial		-
22	Orang Dengan HIV/ AIDS (ODHA)		-
	TOTAL	3.533	6.679

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

20. Penanaman Modal

Bagi wilayah yang sedang berkembang, salah satu sumber pembiayaan yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah adalah penanaman modal, yang terbagi menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemerintah pusat telah memformulasikan berbagai kebijakan guna meningkatkan investasi di daerah baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya seperti investasi portofolio ataupun utang luar negeri.

Tabel 2.50 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2009-2013

Tahun	PMDN	PMA	Total
2009	4	2	6
2010	4	0	4
2011	0	0	0
2012	3	0	3
2013	0	0	0

Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Berdasarkan data di atas, terdapat kecenderungan yang kurang baik dari tahun 2009 hingga tahun 2013. PMDN terus menurun tiap tahunnya, bahkan pada tahun 2011 dan tahun 2013 tidak terdapat PMDN sama sekali. Sedangkan PMA hanya tercatat ada pada tahun 2009, pada tahun-tahun berikutnya tidak terekam ada aktivitas PMA di Kabupaten Bangka Barat. Sedangkan dari segi nominal, nilai investasi yang cukup besar direalisasikan pada tahun 2009 dan tahun 2012 yang nilainya lebih dari 1 triliun rupiah.

Tabel 2.51 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2009 s.d 2013

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rupiah)
2009	6	Rp 1.886.203,00	6	Rp 1.886.203,00
2010	4	Rp 38.900,00	4	Rp 38.900,00
2011	0	0	0	0
2012	3	Rp 1.654.321,00	3	Rp 1.654.321,00
2013	0	0	0	0

Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

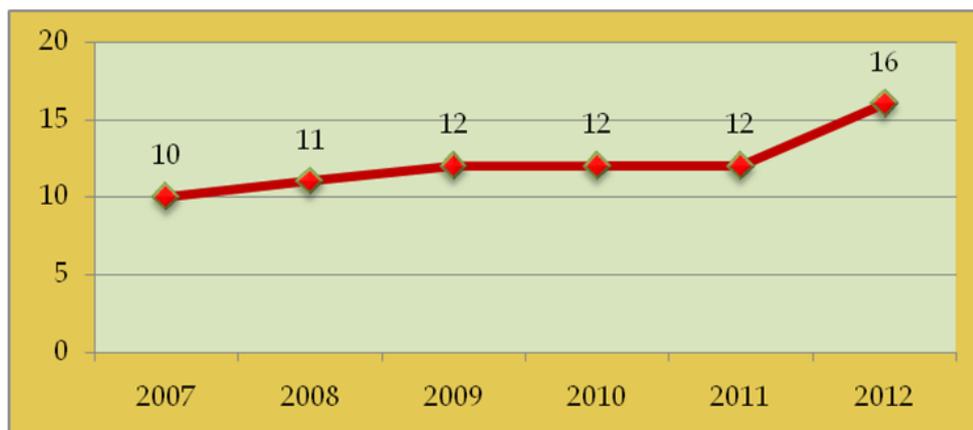
Informasi tersaji di atas mengindikasikan bahwa kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat terbilang lesu. Hasil diskusi dengan beberapa aktor kunci pembangunan daerah mengungkap bahwa saat ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten masih belum mendukung datangnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Iklim perizinan yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten dinilai menyebabkan keengganan investasi untuk masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, kondisi infrastruktur juga dianggap kurang memadai, seperti infrastruktur jaringan energi (listrik) dan air yang masih belum mendukung untuk investasi-investasi besar.

21. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditinjau dari tingkat pemanfaatan seni dan budaya dalam penyelenggaraan *event*, baik di daerah maupun luar daerah Bangka Barat. Sejauh ini, seni dan budaya daerah umumnya ditampilkan pada upacara adat, seperti perang ketupat, tujuh likur, dan acara-acara resmi kedaerahan. Sementara sarana penunjang seperti gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Bangka Barat.

Untuk indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, di Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kawasan cagar budaya yang seluruhnya telah dilestarikan. Penetapan sebagai kawasan cagar budaya yang dilindungi Undang-Undang tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/ PW.007/MKP/2010 Tahun 2010, yaitu Eks Kantor Pusat PN. Timah, Wisma Ranggam, Pesanggrahan Menumbing, Klenteng Kong Fuk Nio, Rumah Mayor China, dan Masjid Jami' Muntok.

**Gambar 2.11 Jumlah Sanggar Tari Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2007 – 2012**



Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2013, Tahun 2013.

22. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah grup kesenian. Meskipun tidak ada data yang menjelaskan lebih rinci jenis kesenian yang dikembangkan oleh 17 grup kesenian yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan seberapa besar cakupannya. Dan jika dibandingkan dengan luasan daerah, yang terdiri atas enam kecamatan, jumlah tersebut masih relatif kecil ditambah lagi belum adanya gedung kesenian. Padahal gedung kesenian dapat menjadi ikon kebudayaan daerah yang dapat mencirikan karakter budaya Kabupaten Bangka Barat, sekaligus menjadi media pengembangan budaya yang ada. Akan tetapi, peningkatan ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif dari kebudayaan kesenian di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.52 Indikator Seni Budaya dan Olahraga

Tahun	Jumlah Gedung Kesenian	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Olahraga	Jumlah Klub Olahraga
2009	0	11	1	98
2010	0	11	1	98
2011	0	16	1	98
2012	0	17	1	98
2013	0	17	1	98

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Tahun 2014.

Sedangkan kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih stagnan. Tidak ada pertumbuhan berarti dalam hal fasilitas dan klub olah raga. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah perlu menambah infrastruktur olah raga agar aktivitas dan klub olah raga semakin meningkat. Sedangkan untuk grup kesenian menunjukkan peningkatan. Namun meski meningkat, ketiadaan fasilitas kesenian membuat pertumbuhan klub kesenian baru menjadi semakin sulit dilakukan.

23. Kearsipan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator Pengelolaan arsip secara baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.

**Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2009 s.d 2014**

No.	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pengelolaan arsip secara baku	N/A	N/A	N/A	19%	48%	51,61%
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	N/A	N/A	1 keg	4 keg	5 keg	1 keg

Sumber : LPPD Kab. Bangka Barat 2014,tahun 2015

24. Perpustakaan

Budaya membaca merupakan kebiasaan yang perlu terus diasah dan dipupuk sejak dini. Membaca membuka wawasan terhadap berbagai macam hal yang bermanfaat. Perpustakaan sebagai gudangnya buku-buku berperan besar dalam menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menggalakkan kebiasaan membaca.

**Tabel 2.54 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2009 s.d 2014**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
2.	Jumlah perpustakaan desa	0	7	13	20	23	29
3.	Total Perpustakaan (1+2)	1	8	14	21	24	30

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Bangka Barat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan wajib pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi 26 urusan. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kinerja pembangunan pemerintah dalam fokus urusan wajib

Tabel 2.55 Indikator Kinerja Pembangunan Fokus Urusan Wajib Pemerintah

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
I. Urusan Wajib							
1.	Pendidikan						
1.1	IPM	70,07	70,54	70,94	71,46	71,62	Belum Tercapai (<)
1.2	Angka melek huruf	92,86	93,59	93,85	94,08	99,71	Belum Tercapai (<)
1.3	Angka rata-rata lama sekolah	6,87	6,95	7,02	7,09	6,82	Melampaui (>)
1.4	Angka partisipasi sekolah (murni)						
1.4.1	- SD/MI	91,53	95,92	95,97	96,04	91,5	Melempau (>)
1.4.2	- SMP/MTs	54,08	54,23	76,93	77,05	77,5	Belum Tercapai (<)
1.4.3	- SMA/MA/SMK	37,14	42,4	42,55	42,63	43,58	Belum Tercapai (<)
1.5	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah						
1.5.1	- SD/MI	1 : 157	1 : 180	1 : 161	1 : 238	1 : 238	Sesuai (=)
1.5.2	- SMP/MTs	1 : 224	1 : 246	1 : 243	1 : 322	1 : 278	Belum Tercapai (<)
1.5.3	- SMA/MA/SMK	1 : 398	1 : 398	1 : 421	1 : 481	1 : 332	Belum Tercapai (<)
1.6	Rasio Guru / Murid						
1.6.1	- SD/MI	1 : 16	1 : 16	1 : 16	1 : 18	1 : 18	Sesuai (=)
1.6.2	- SMP/MTs	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 23	1 : 16	Belum Tercapai (<)
1.6.3	- SMA/MA	1 : 11	1 : 12	1 : 11	1 : 15	1 : 16	Melempau (>)
1.6.4	- SMK	1 : 11	1 : 13	1 : 11	1 : 18	1 : 17	Belum Tercapai (<)
1.7	Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA)						
1.7.1	- SD	0,59	0,52	0,58	0,31	0,5	Melempau (>)
1.7.2	- SMP	0,49	0,39	1,65	1,06	1,51	Melempau (>)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
1.7.3	- SMA	2,93	2,35	1,59	0,14	1,8	Melempai (>)
2.	Kesehatan						
2.1.	Persentase balita gizi buruk		0,08	0,12	0,1	0.08	Belum Tercapai (<)
2.2.	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)				9	10	Melempai (>)
2.3.	Rasio dokter per 1000 penduduk	0,2	0,21	0,29	0,3	0,4	Belum Tercapai (<)
2.4	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	0,25	0,25	0,34	0,36	0,4	Belum Tercapai (<)
2.5	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	1:775	1 : 602	1 : 616	1 : 592	1 : 692	Melempai (>)
2.6	Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	1:1.444	1:1.316	1 : 1.283	1 : 1.163	1 : 1.154	Belum Tercapai (<)
2.7	Penduduk yang sakit terjamin pelayanan kesehatan	35	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.8	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				31,19	100	Belum Tercapai (<)
3.	Lingkungan hidup						
3.1	Kerusakan kawasan hutan	75.621	42.262	42.108	41.927,5	41.533	Belum Tercapai (<)
3.2	Kerusakan lahan/ APL	28.216	12.823	10.784	9.924,60	8.052	Belum Tercapai (<)
3.3	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.				47,37	100	Belum Tercapai (<)
3.4	Cakupan layanan sampah perkotaan	-	22,57	25,41	100	100	Sesuai (=)
3.5	DAS berkategori kritis	-	27	26,5	26	25	Sesuai (=)
3.6	Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib AMDAL yang memiliki dokumen AMDAL	-	100	100	85	100	Belum Tercapai (<)
3.7	Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL		29,33	44	76,74	100	Belum Tercapai (<)
3.8	Cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib SPPL yang memiliki dokumen SPPL		2,31	8,46	39,39	100	Belum Tercapai (<)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi	
		2010	2011	2012	2013		Belum tercapai (<)	Sesuai (=) Melampaui (>)
4.	Pekerjaan umum							
4.1.	Cakupan jalan berkondisi baik	85,3	89,32	82,36	84,44	80	Belum Tercapai (<)	
4.2.	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan bidang darat dan laut			18,67	60,25	100	Belum Tercapai (<)	
5.	Penataan ruang							
5.1.	Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang (RTRW)	0	0	0	0	1	Belum Tercapai (<)	
5.2.	Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang (RDTR)	0	0	0	1	6	Belum Tercapai (<)	
5.3.	Cakupan Desa dan kelurahan yang memiliki batas administrasi yang jelas	0	35,94	68,75	100	100	Sesuai (=)	
5.4.	Cakupan bangunan ber-IMB	0	1,65	2,38	2,70	4	Belum Tercapai (<)	
5.5.	Cakupan bangunan ber-SIG	0	73,13	66,08	57,64	80,00	Belum Tercapai (<)	
6.	Perencanaan pembangunan							
7.	Perumahan							
7.1.	Cakupan Rumah Tangga Berlistrik	38,15	55,25	78,07	83,5	100	Belum Tercapai (<)	
7.2.	Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	10,62	70,14	82,51	88,2	65	Melempai (>)	
7.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,53	50,32	66,88	73,02	85	Belum Tercapai (<)	
8.	Kepemudaan dan olahraga							
8.1.	Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk	0,84	0,71	0,72	0,82	0,73	Melempai (>)	
9.	Penanaman modal							
10.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah							
10.1.	Pertumbuhan Usaha							
10.1.1.	Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	-	-	5,36	-	70	-	
10.1.2.	Pertumbuhan Usaha Kecil (%)	-	-	6,21	0,27	25	Belum Tercapai (<)	
10.1.3.	Pertumbuhan Usaha Menengah (%)	-		41,79	3,16	10	Belum Tercapai (<)	
10.2.	Pertumbuhan koperasi	-	20	33,3	10,9	8	Melempai (>)	

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
	aktif						
11.	Kependudukan dan catatan sipil						
11.1.	Indeks Kepuasan layanan masyarakat terhadap administrasi kependudukan (skala A-E)	-	D	B	B	C	Melempai (>)
11.2.	Cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP)	79,03%	80,92%	85,74%	79,76%	85%	Belum Tercapai (<)
12.	Ketenagakerjaan						
12.1.	Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri (%)	-	0	42,86	20,83	40	Belum Tercapai (<)
12.2.	Penempatan tenaga kerja terdaftar (%)	-	10,93	8,73	14,08	20	Belum Tercapai (<)
13.	Ketahanan pangan						
13.1.	Ketersediaan pangan utama (%)	5,94	6,39	8,86	12,37	9,37	Melempai (>)
13.1.1.	Beras (%)	7	8,25	9,59	12,14	16,09	Belum Tercapai (<)
13.1.2.	Daging (%)	10,81	10,43	17	12,59	10,22	Melempai (>)
13.2.	Desa yang telah memenuhi swasembada pangan (padi)	-	1 Desa	2 Desa	3 Desa	5 Desa	Belum Tercapai (<)
14.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						
14.1.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	-	-	-	100	100	Sesuai (=)
15.	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera						
15.1.	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	76,17	74,43	77,41	80,19	82,18	Belum Tercapai (<)
15.2.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,56	2,49	2,3	0,90	2,35	Belum Tercapai (<)
15.3.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	-	-	-	4,02	3,75	Melempai (>)
15.4.	Rasio Petugas Lapangan	-	-	-	40,63	90	Belum Tercapai

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
	Keluarga Berencana/ Penyuluh KB satu petugas di setiap dua desa/ kel						(<)
15.5	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	-	-	-	10,4	8	Melempai (>)
15.6	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas setiap desa/ kelurahan	-	-	-	100	100	Sesuai (=)
15.7	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	-	-	30	23	Melempai (>)
16.	Perhubungan						
16.1.	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan bidang darat dan laut			18,67	60,25	60,25	Sesuai (=)
17.	Komunikasi dan informatika	-	-	-	-	-	Belum ada data
17.1	Website milik Pemerintah Daerah	-	Ada	Ada	Ada	Ada	
18.	Pertanahan						
18.1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	90,91	100	100	100	100	Sesuai (=)
18.2	Penyelesaian ijin Lokasi	100	100	100	100	100	Belum Tercapai (<)
19.	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri						
19.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 keg	2 keg	1 keg	0		
19.2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	1 keg	2 keg	2 keg	1 keg		
20.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian						
20.1.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	-	3	5	12	9	Melempai (>)
20.2.	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja	D	D	C	CC	CC	Sesuai (=)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
	Instansi Pemerintah						
20.3.	Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	148	138	80	Belum Tercapai (<)
20.4.	Cakupan pembahasan raperda yang menjadi perda	-	73,91	70	93,33	100	Belum Tercapai (<)
21.	Pemberdayaan masyarakat dan desa						
21.1.	PKK Aktif	98,44	100	100	100	100	Sesuai (=)
21.2.	Posyandu Aktif	96,50	49,66	34,42	38,75	100	Belum Tercapai (<)
22.	Sosial						
22.1.	Tingkat kesejahteraan keluarga (keluarga sejahtera II s.d III+)	86,67	87,28	87,9	88,76	88,25	Melempai (>)
22.2.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar	-	-	-	77,97	80	Belum Tercapai (<)
23.	Kebudayaan						
23.1	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	0	1 buah	1 buah	1 buah		
23.2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	6 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
23.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	13,64	66,67	50	100		
24.	Statistik						
24.1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
24.2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
25.	Kearsipan						
25.1.	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	-	-	19	48	75%	Belum Tercapai (<)
26.	Perpustakaan						
26.1.	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,57	0,52	0,39	0,48	0,44	Melempai (>)
26.2.	Rasio pengunjung perpustakaan	0,019	0,016	0,36	0,019	0,13	Melempai (>)

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Dari tabel di atas, terlihat gambaran kinerja pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam penyediaan dan pengelolaan pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013 tidak memenuhi target capaian. Hal ini terlihat dari penurunan angka melek huruf dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari segi pendidikan, terjadi peningkatan pada angka partisipasi sekolah dasar (SD) yang juga diikuti dengan meningkatnya ketersediaan fasilitas sekolah SD. Namun, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP dan SMA/SMK, yang terjadi adalah tidak tercapainya target pelayanan dari segi angka partisipasi sekolah maupun fasilitas sekolah. Meskipun demikian, pemerintah daerah dinilai sudah baik dalam menekan angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA).

Dari segi kesehatan, pemerintah daerah berhasil menekan angka kematian balita. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan rasio tenaga perawat per satuan penduduk. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin juga dinilai sudah melebihi target. Namun, persentase balita gizi buruk masih tinggi. Kemudian, rasio dokter/tenaga medis juga masih belum mencukupi cakupan pelayanan per satuan penduduk.

Hal yang mencolok dari kinerja pemerintah adalah lingkungan hidup. Dari sepuluh indikator penilaian lingkungan hidup, delapan indikator dinilai tidak mencapai target, sedangkan dua lainnya dinilai sudah sesuai dengan target. Beberapa urusan yang tidak memenuhi target adalah kerusakan kawasan hutan, kerusakan lahan/APL, hutan tanaman rakyat, fasilitasi hutan kemasyarakatan, prosentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Dalam hal administrasi dan perizinan pengolahan sumber daya yang terkait lingkungan hidup, cakupan perusahaan yang memiliki AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL, masih jauh dari target yang diharapkan.

Dari segi pekerjaan umum serta penataan ruang, terlihat bahwa pemerintah daerah belum mampu mencapai target desa mandiri. Hal ini disebabkan kurangnya infrastruktur yang mendukung seperti konektivitas antardesa maupun internal desa itu sendiri. Perencanaan yang berdasarkan RTRW dinilai belum optimal. Hal ini terlihat dari prosentase bangunan dengan IMB, SIG, maupun izin lokasi lainnya yang belum mencapai target.

Dari segi perumahan, hampir tidak terdapat perumahan padat dan kumuh. Persentase rumah tinggal bersanitasi dinilai melebihi target. Namun, ketersediaan listrik dan air belum tercukupi. Hal ini dapat terlihat dari cakupan rumah tangga pengguna air bersih yang hanya mencapai 62% dari target 83,45%. Meskipun tidak terdaftar sebagai pengguna air bersih, masyarakat tetap memperoleh air bersih dari sumur air.

Dari segi koperasi dan usaha kecil menengah, terlihat bahwa pertumbuhan usaha, pada skala kecil dan menengah, belum mencapai target serta mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Namun, pertumbuhan koperasi aktif dinilai sudah mencapai target. Dari data ini, terlihat bahwa koperasi aktif belum dioptimalkan untuk menunjang sektor usaha kecil dan menengah.

Ketenagakerjaan dinilai belum mencapai target. Hal ini disebabkan rendahnya penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja/mandiri, serta pendaftaran penempatan tenaga kerja yang belum optimal. Hal ini sejalan dengan belum terpenuhinya cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP) terutama pendataan terhadap tenaga kerja yang merupakan pendatang.

Dari segi ketahanan pangan, hanya ada satu desa yang dinilai sudah mampu swasembada pangan padi. Namun, secara keseluruhan desa, kebutuhan beras masih belum mencapai target. Sedangkan untuk kebutuhan daging, dinilai sudah mencapai target.

Dari segi administrasi pemerintahan, kearsipan, dan perpustakaan, secara keseluruhan dinilai sudah melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada beberapa segi, seperti perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, komunikasi dan informatika, kebudayaan, dan statistik, belum ada data yang jelas terkait rencana capaian dan realisasi kinerja pemerintah daerah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi subsektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dengan sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Diantara komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi antar lain adalah ikan kerapu, kakap merah,

udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan di laut, potensi yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir, namun saat ini belum maksimal dikembangkan oleh masyarakat.

Permasalahan di bidang perikanan yang dihadapi hingga saat ini di antaranya adalah masih maraknya pencurian ikan (*illegal fishing*), ancaman kerusakan terumbu karang yang dapat mengurangi hasil tangkapan ikan, serta tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta modal melaut seperti sarana/prasarana menangkap ikan yang mahal.

Peningkatan jumlah masyarakat nelayan dalam empat tahun terakhir cukup menjelaskan bahwa subsektor perikanan termasuk yang diminati masyarakat sebagai ladang usaha. Adanya sumber daya alam subsektor perikanan dan sumber daya manusia yang bergerak di subsektor tersebut selanjutnya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

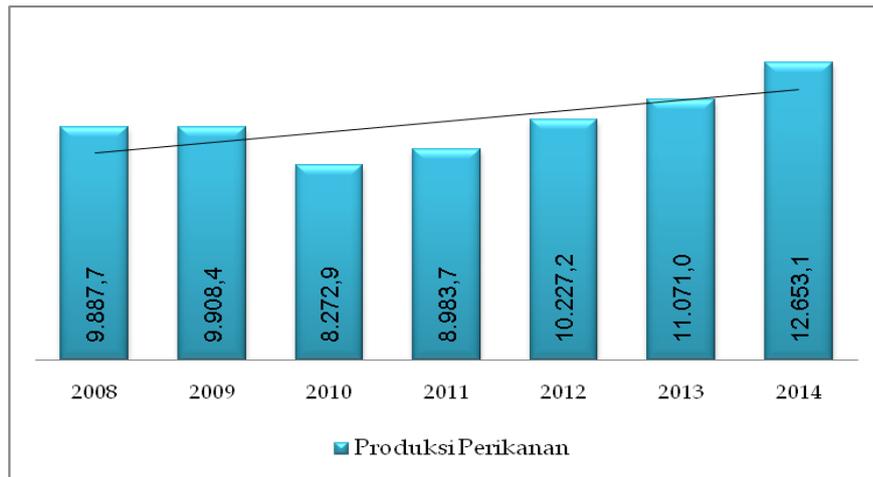
Tabel 2.56 Jumlah Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008-2013

No.	Kecamatan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Muntok	915	1.195	385	615	424	433
2.	Simpangteritip	554	702	358	360	513	529
3.	Tempilang	454	835	478	440	546	557
4.	Kelapa	131	252	213	228	244	253
5.	Jebus	677	812	427	205	170	171
6.	Parittiga				303	313	318
Jumlah Rumah Tangga		3.584	2.476	1.861	2.151	2.210	2.261

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2014

Sejak tahun 2008, angka jumlah nelayan cukup fluktuatif. Penurunan jumlah nelayan terjadi dari tahun 2008 hingga tahun 2010, dan kemudian meningkat lagi hingga tahun 2012. Namun, secara total dalam lima tahun terakhir, jumlah nelayan berkurang cukup banyak yakni dari 3.584 jiwa pada tahun 2008 menjadi 2.544 jiwa pada tahun 2012.

Gambar 2.12 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2008 -2014

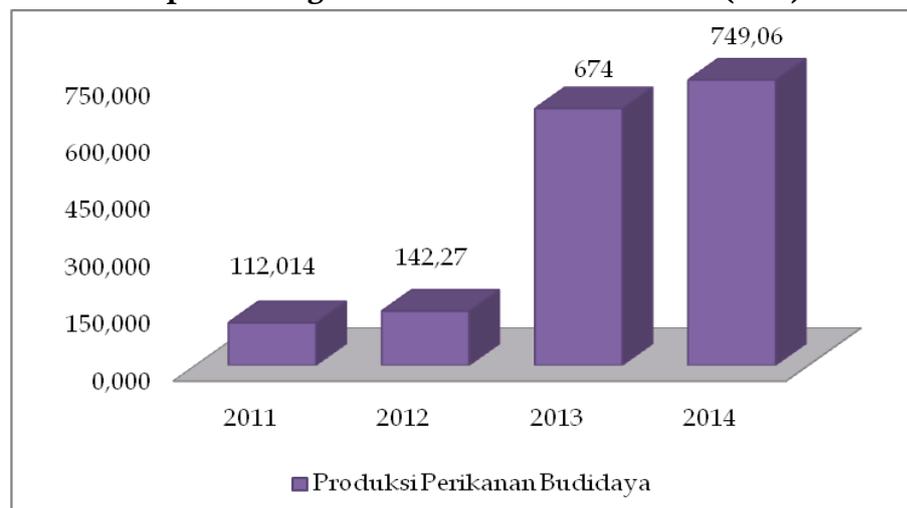


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2015

Berdasarkan hasil diskusi dengan aktor-aktor pembangunan (*stakeholders*), penyebab turunnya produksi perikanan antara lain aktivitas kapal hisap di pesisir yang merusak ekosistem laut, berkurangnya wilayah penangkapan ikan, dan serta menurunnya minat warga untuk berprofesi sebagai nelayan akibat daya tarik sektor lain yang lebih menjanjikan (pertambangan).

Kecenderungan yang mirip juga terlihat dari jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun 2008-2013, produksi relatif menurun hingga tahun 2010 dan kemudian menanjak naik hingga tahun 2013. Meskipun jumlah nelayan pada tahun 2013 lebih sedikit ketimbang jumlah nelayan pada tahun 2008, produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 lebih besar dari tahun 2008.

Gambar 2.13 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 – 2014 (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2015

Secara keseluruhan, produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat didominasi oleh perikanan tangkap ketimbang perikanan budidaya, kecuali untuk Kecamatan Muntok yang memiliki produksi perikanan budidaya lebih dominan. Oleh karena itu, keberadaan dan kondisi dari wilayah penangkapan ikan sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat.

2. Pertanian

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian dimasa kini dan masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan lahan, juga didukung oleh tingkat kesuburan tanah, iklim dan suhu yang mendukung komoditi pertanian. Tanaman pertanian yang giat dikembangkan sekarang antara lain padi-padian, palawija, sayuran, dan buah-buahan.

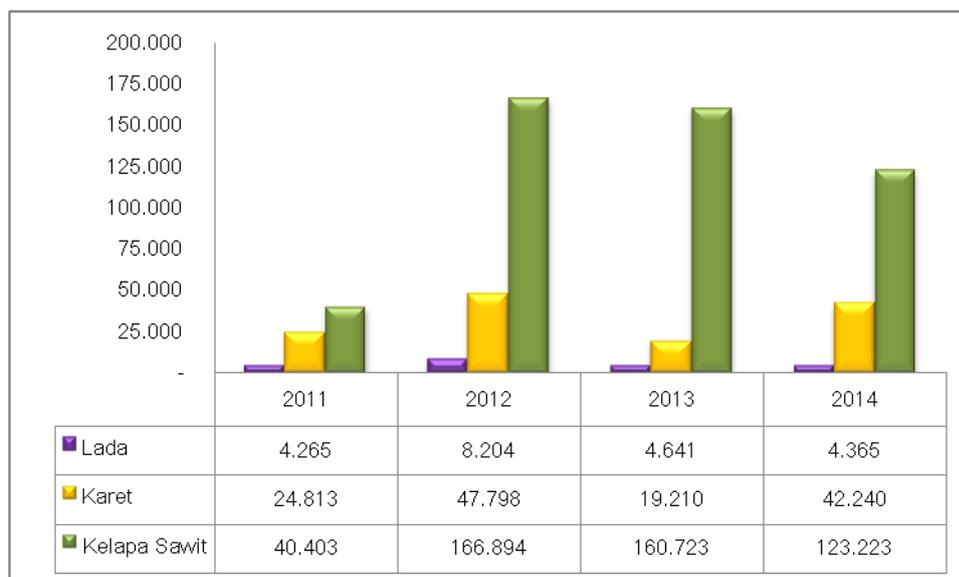
Selain itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang perkebunan. Secara umum perkebunan yang ada di Kabupaten Bangka Barat dapat dipisahkan menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Perkebunan rakyat yang banyak diusahakan antara lain adalah tanaman lada dan karet, sedangkan perkebunan swasta mengusahakan tanaman kelapa sawit. Namun demikian, masyarakat saat ini sudah mulai bergerak untuk membuka kebun kelapa sawit.

**Tabel 2.57 Statistik Tanaman Pangan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2011-2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi Ladang					
	- Luas Panen (ha)	2.467	796	1.733	1.727	1.668
	- Produksi (ton)	1.727	875,10	3.334	3.119	3.153
2	Jagung					
	- Luas Panen (ha)	127	104	101	18	101
	- Produksi (ton)	381	260	303	66	312
3	Ubi Kayu					
	- Luas Panen (ha)	429	541	236	168	177
	- Produksi (ton)	7.722	8.688	3540	2798	2652
4	Ubi Jalar					
	- Luas Panen (ha)	124	90	76	68	82
	- Produksi (ton)	1.860	1.170	912	626	628
5	Kacang Tanah					
	- Luas Panen (ha)	60	79	44	44	50
	- Produksi (ton)	92	110,60	86	45	45

Sumber: Bangka Barat dalam Angka 2014, Tahun 2014

Gambar 2.14 Produksi Tiga Komoditi Utama Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 (ton)



Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Sebagai sebuah sektor yang direncanakan akan dikembangkan kedepannya, sektor pertanian di Kabupaten Bangka Barat membutuhkan perhatian lebih. Potensi terbesar pertanian di Kabupaten ini terletak pada Kelapa Sawit, Karet, dan Lada. Ketiga potensi unggulan ini perlu diberikan intervensi kebijakan yang tepat, baik itu untuk proses peningkatkan produktivitas maupun memberikan nilai tambah pada produk tersebut.

Tabel 2.58 Angka Produktivitas Pertanian di Kabupaten Bangka Barat

Uraian		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Produktivitas sawit masyarakat (ton/tahun/Ha)	10,03	11,70	15,9	15,91	16,5	10,77
2.	Produktivitas karet masyarakat (ton/tahun/Ha)	12,48	3,37	4	3,99	4,1	3,70
3.	Produktivitas lada masyarakat (ton/tahun/Ha)	1,43	1,87	1,4	1,39	1,45	1,38
4.	Produktivitas Ladang (ton/hektar)	0,79	0,80	1,8	1,89	1,91	-
5.	Produktivitas Sawah (ton/hentar)	-	-	2,2	2,15	2,31	2,3

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2015

Peningkatan memang terjadi di sektor-sektor unggulan, khususnya di tahun 2013, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan dengan demikian perlu ada upaya-upaya

sistematis untuk menjadikan pertanian di Kabupaten Bangka Barat lebih berdaya saing Sementara untuk tingkat produktifitas sawah dan ladang, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa peningkatan hanya berkisar antara 2-4%; bahkan pada periode tertentu mengalami penurunan. Sehingga dalam melakukan proyeksi untuk tahun 2025, proyeksi dilakukan dengan pendekatan konservatif; menimbang isu pembukaan lahan baru pertanian belum memberikan kejelasan untuk kedepannya.

Tabel 2.59 Proyeksi Produktivitas Pertanian di Kabupaten Bangka Barat

No.	Pertanian	2015	2020	2025
1	Produktivitas sawit masyarakat (ton/tahun/Ha)	17.16	18.95	20.92
2	Produktivitas karet masyarakat (ton/tahun/Ha)	4.26	4.70	5.19
3	Produktivitas lada masyarakat (ton/tahun/Ha)	1.50	1.66	1.83
4	Produktivitas Ladang (ton/hektar)	1.92	1.97	2.02
5	Produktivitas Sawah (ton/hentar)	2.49	3.03	3.69

Sumber: Analisis Proyeksi, Tahun 2014.

3. Kehutanan

Jika dibandingkan antara luas kerusakan kawasan hutan (41.927 Ha) dengan luas kawasan hutan produksi (77.742 Ha), maka didapatkan rasio kerusakan yang cukup signifikan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, sebab kerusakan yang besar ini dapat merugikan potensi kehutanan secara keseluruhan. Pemerintah perlu mengembalikan secara kontinu kawasan hutan yang telah rusak sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hutan memiliki fungsi ekologi dalam menjaga lingkungan hidup serta dapat memiliki nilai ekonomis yang kontinu jika digarap secara berkelanjutan.

Tabel 2.60 Indikator Bidang Kehutanan Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Kerusakan kawasan hutan (Ha)	42.108	41.927,5	41.874,5
Kerusakan lahan/ APL (Ha)	10.784	9.924,60	8.753,6
Hutan tanaman rakyat (Ha)	88,06	139,12	115,17

Sumber: LAKIP Kab. Bangka Barat 2014, Tahun 2015.

Beberapa komoditas hutan yang diperkirakan akan bernilai tinggi di tahun 2025 diantaranya adalah kebutuhan bahan baku mebel serta bio energi. Kebutuhan industri pengolahan kayu seperti mebel diperkirakan akan terus meningkat dan terbuka untuk menjadi komoditas ekspor sebab beberapa negara industri seperti Tiongkok mulai membatasi penebangan pohon di dalam negeri. Selain itu, kebutuhan beberapa jenis juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bio mass yang diperuntukkan untuk energi. Saat ini produk *fuel palette* yang berasal dari kayu menjadi incaran beberapa negara maju sebagai sumber energi. Kayu pohon Lamtoro merupakan salah satu yang baik untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku *fuel palette*.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumbangan sektor pertambangan dan penggalan pada PDRB Kabupaten Bangka Barat cukup dominan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu menempati urutan kedua setelah industri pengolahan.

Tabel 2.61 Indikator Bidang ESDM Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Cakupan desa/kelurahan/dusun berlistrik (PLN)			
- Desa/kelurahan	100	100	100
- Dusun	80,67	96,88	98,77
Ketersediaan energi listrik (MW)	-	20,351	20,351
Cakupan rumah tangga berlistrik			
- PLN	67,66	83,5	84,6
- Non PLN	10,41	16,5	15,4
Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN)			
- Fasilitas umum	79,05	71,52	71,52
- Lampu jalan pedesaan	71,99	50,19	58,4

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2015

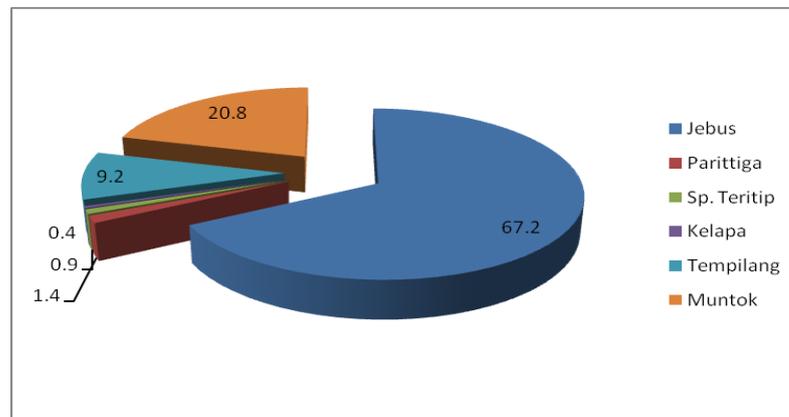
Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak dieksploitasi selama ini serta telah banyak diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta dengan jumlah terbatas. Selain timah, produk bahan galian golongan C yang juga berperan dalam pembentukan PDRB sektor pertambangan dan penggalan adalah batu koral, pasir bangunan, dan tanah puru.

Tabel 2.62 Jumlah Produksi Bijih Timah Menurut Lokasi Penambangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2014 (ton)

Penambangan	2011	2012	2013	2014
Darat	2.150	3.530	898	
Laut	6.341	8.093	7.280	
Jumlah	8.491	11.623	8.178	7.737,52

Sumber: Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2015.

Gambar 2.15 Persentase Produksi Bijih Timah PT. TIMAH Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat 2013



Sumber: Dinas ESDM Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Meskipun kontribusi sektor pertambangan saat ini masih cukup dominan, akan tetapi dari tahun ke tahun nilai kontribusi sektor pertambangan cenderung stagnan. Bahkan untuk penambangan darat, nilai produktivitasnya semakin menurun dari tahun ke tahun. Saat ini penambangan di laut masih cukup dominan, namun dengan konseskuensi yang sangat besar dalam hal kerusakan lingkungan pantai dan laut. Kerusakan ini merupakan penyebab sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata tidak bisa berkembang optimal dengan memanfaatkan kekayaan pantai dan laut Bangka Barat yang terbentang luas.

Jika Bangka Barat tetap mempertahankan penambangan laut, nilai produksinya kemungkinan akan berlangsung stagnan dan memiliki kecenderungan menurun beberapa tahun ke depan. Melihat trend penurunannya, pada tahun 2025 kemungkinan tambang tidak lagi menjadi memiliki kontribusi berarti. Hal ini tentu akan berdampak pada 25% tenaga kerja Bangka Barat yang bekerja pada sektor ini. Untuk itu Kabupaten Bangka Barat perlu mempertimbangkan langkah alternatif dalam mengatasi menurunnya kontribusi sektor ini mulai dari sekarang.

5. Pariwisata

Perkembangan jumlah kunjungan wisata ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2014, secara umum menunjukkan kenaikan jumlah kunjungan yang cukup tinggi. Melalui data kunjungan yang menunjukkan kecenderungan meningkat ini sudah cukup meyakinkan bahwa pariwisata telah memiliki prospek untuk berkembang di masa mendatang. Pengelolaan/*management* dan pemasaran yang profesional memang memberikan peluang bagi keterlibatan dunia usaha ikut menggarap pengembangan pariwisata Bangka Barat. Potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat cukup beragam seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan yang kondusif bagi pengembangan pariwisata Bangka Barat yang tetap mempertahankan jati diri/karakter lokal dan menjamin kelestarian lingkungan.

**Tabel 2.63 Pantai/Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata
di Kabupaten Bangka Barat**

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpang Teritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang Iyulok Limau

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Tabel 2.64 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Kunjungan wisata (orang)	5.980	6.881	9.187	9.216	20.946

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2014

Pariwisata, bersama sektor perdagangan, hotel dan restoran saat ini menjadi penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan dalam produktivitas daerah yang tercermin dalam PDRB. Kontribusi sektor ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 5% di tahun 2008 menjadi 15% di tahun 2013. Bukan hal yang mustahil pada tahun 2025, sektor ini bisa berkontribusi paling tidak sebesar 20% PDRB.

Peningkatan produktivitas sektor ini juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bangka Barat. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Bangka Barat sedikitnya bisa mencapai 10.000 kunjungan per tahun dengan kondisi normal. Akan tetapi, jika perbaikan dapat dilakukan pada sektor ini termasuk dengan menyediakan infrastruktur yang memadai untuk pembangunan hotel berbintang dan restoran, maka setidaknya Bangka Barat dapat mengharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat hingga 20.000 kunjungan per tahun. Hal ini disebabkan kondisi fasilitas akomodasi seperti hotel dan restoran saat ini masih sangat minim, padahal potensi objek wisata cukup memadai. Dengan asumsi rata-rata kunjungan satu wisatawan akan mendatangkan US\$ 100 bagi perekonomian Bangka Barat, maka potensi ekonomi sektor ini di tahun 2025 bisa mencapai US\$ 2.000.000 per tahun.

6. *Industri dan Perdagangan*

Sebagaimana tinjauan terhadap PDRB pada bagian awal bab ini, sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB. Adapun sektor perdagangan, juga termasuk penyumbang peringkat keempat pada pembentukan PDRB daerah.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan motor penggerak ekonomi wilayah. Keterkaitan dengan sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi perlu diperkuat dalam lima tahun ke depan guna membantu memastikan mata rantai dan tata niaga komoditi unggulan wilayah terbentuk dengan cukup kuat dan berkelanjutan.

Sektor industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Industri yang dapat dikembangkan antara lain: *home industry* seperti pembuatan terasi, akar bahar, songket cual, industri pengolahan lanjutan CPO, pasir kuarsa (*glass ware industry*), keramik (kaolin), serta *tin chemical* (industri hilir timah).

Sektor perdagangan juga memerlukan pengelolaan yang optimal, sehingga dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis, Kabupaten Bangka Barat dapat meraih peluang pasar sebagai komplement Palembang serta pusat kegiatan pelabuhan.

Gambar 2.16 Pertumbuhan dan Jumlah Industri di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2014



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tahun 2015.

Tabel 2.65 Kontribusi Subsektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2013 (%)

Uraian	2011	2012	2013
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,94	5,19	5,38
Barang dari Kayu	0,33	0,31	0,31
Semen dan Barang Galian bukan Logam	0,48	0,49	0,49
Logam Dasar Besi & Baja	42,54	40,08	37,59
Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	0,05	0,05	0,05
Industri Pengolahan	48,34	46,12	43,82

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Meskipun saat ini industri dan perdagangan memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lain, akan tetapi pertumbuhannya masih terlihat rendah. Hal ini disebabkan infrastruktur yang belum optimal untuk pengembangan industri. Jika melihat tren dan perkembangan situasi wilayah yang cukup kondusif untuk pengembangan industri, maka setidaknya industri dan perdagangan masih bisa tumbuh di kisaran rata – rata 25% per tahun hingga 2025.

7. Transmigrasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketransmigrasian, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan beberapa wilayah sebagai daerah transmigrasi. Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, wilayah yang dijadikan sebagai daerah pembangunan dan pengembangan transmigrasi berada di Kecamatan Jebus, Simpangteritip dan Kelapa. Sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan urusan ketransmigrasian baru dalam tahap pembangunan dan penyiapan lokasi transmigrasi dan belum ada transmigrasi yang ditempatkan.

Bagian ini akan memberikan paparan mengenai pencapaian kinerja bidang urusan pilihan Kabupaten Bangka Barat yang meliputi bidang kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan transmigrasi. Data-data yang ditampilkan dirangkum dari berbagai sumber. Sebagai catatan, belum ada data terkini maupun indikator pencapaian untuk bidang transmigrasi menimbang bidang ini baru berkembang.

Tabel 2.66 Indikator Kinerja Pembangunan Fokus Urusan Pilihan Pemerintah

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
II. Urusan Pilihan							
1.	Kelautan dan perikanan						
1.1.	Produksi perikanan budidaya (ton)	90	112,014	142,27	674	816	Belum tercapai (<)
1.2.	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.272,94	8.983,68	10.227,19	11.071	12.409	Belum tercapai (<)
1.3.	Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	-	-	-	1.487	2.393	Belum tercapai (<)
1.4.	Luas kawasan konservasi perikanan (Ha)	-	-	-	2.267	2.450	Melampaui (>)
2.	Pertanian						
2.1.	Produktivitas hasil perkebunan unggulan per hektar						
2.1.1.	Produktivitas sawit masyarakat (ton/tahun/Ha)	11,7	15,9	15,91	16,5	17	Belum tercapai (<)
2.1.2.	Produktivitas karet masyarakat (ton/tahun/Ha)	3,37	4	3,99	4,1	4,2	Belum tercapai (<)
2.1.3.	Produktivitas lada masyarakat (ton/tahun/Ha)	1,87	1,4	1,39	1,45	1,5	Belum tercapai (<)
2.2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
2.2.1.	Ladang (ton/hektar)	0,8	1,8	1,89	1,91		
2.2.2.	Sawah (ton/hentar)	-	2,2	2,15	2,31	3,16	Belum tercapai (<)
2.3.	Penerapan pola kemitraan pembangunan kebun rakyat dengan perusahaan perkebunan besar / swasta (Ha)	-	-	-	54,18	336,18	Belum tercapai (<)
3.	Kehutanan						
3.1.	Kerusakan kawasan hutan (Ha)	-	-	42.108	41.927,5	41.937,5	Melampaui (>)
3.2.	Kerusakan lahan/ APL (Ha)	-	-	10.784	9.924,60	9.899,00	Belum tercapai (<)
3.3.	Hutan tanaman rakyat	-	-	88,06	139,12	819,00	Belum tercapai (<)

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Capaian Kerja				Standar	Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013		
	(Ha)						
4.	Energi dan sumber daya mineral						
4.1.	Ketersediaan energi listrik						
4.1.1.	Cakupan desa/kelurahan/dusun berlistrik (PLN)						
4.1.1.1.	Desa/kelurahan			100	100	100	Sesuai (=)
4.1.1.2.	Dusun	62,50	76,56	80,67	96,88	100	Belum tercapai (<)
4.1.2.	Cakupan rumah tangga berlistrik						
4.1.2.1.	PLN	37,1	54,2	67,66	83,5	67,79	Melampaui (>)
4.1.2.2.	Non PLN	1,05	1,05	10,41	16,5	10,67	Melampaui (>)
4.1.4.	Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN)						
4.1.4.1.	Fasilitas umum	46,87	56,72	79,05	71,52	84,8	Belum tercapai (<)
4.1.4.2.	Lampu jalan pedesaan	25,00	56,25	71,99	50,19	82,23	Belum tercapai (<)
5.	Pariwisata						
5.1.	Kunjungan wisata	5.980	6.881	9.187	9.216	11.117	Belum tercapai (<)
5.2.	Benda, situs & kawasan cagar budaya yang dilestarikan	13,64	66,67	50	100	100	Sesuai (=)
6.	Industri						
6.1.	Pertumbuhan industri	0,68	42,31	46,26	13,04	30	Belum mencapai (<)
7.	Perdagangan						
7.1.	Pengembangan/pembangunan pasar tradisional	-	-	9	11	11	Sesuai (=)

Sumber: LAKIP Kab Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Pada sektor kelautan dan perikanan, hampir semua aspek tercapai dan hanya satu aspek yaitu jumlah kelompok perikanan tangkap yang belum mencapai target. Dari data ini, terlihat bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, salah satu strategi pengembangan kedepan yang perlu diperhatikan adalah penguatan kelompok-kelompok nelayan. Sedangkan pada bidang pertanian, catatan kurang baik perlu menjadi perhatian, semua indikator

pencapaian kinerja di bidang ini tidak tercapai. Pembangunan pertanian memang menjadi tantangan tersendiri bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat.

Dalam bidang kehutanan, catatan penting perlu diperhatikan dalam bidang pengelolaan kerusakan lahan dan jumlah hutan tanaman rakyat yang bisa diproduksi. Sedangkan untuk fasilitas hutan kemasyarakata telah tercapai. Di bidang energy dan sumber daya mineral, angka elektrifikasi masih belum tercapai hingga 100%, angka-angka standard pencapaian yang ada relatif masih rendah untuk ukuran sebuah Kabupaten yang berencana membangun basis ekonominya. Cakupan elektrifikasi untuk fasilitas umum dan lampu jalan perdesaan belum tercapai.

Jumlah kunjungan pariwisata di Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target, meski dengan catatan masih banyak potensi pengembangan pariwisata baru. Untuk pertumbuhan industri, angka yang diharapkan masih jauh dari ekspektasi, sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Barat. Sedangkan jumlah pasar tradisional telah mencapai target yaitu sebanyak 11 pasar. Pada bidang transmigrasi belum ada data yang bisa di paparkan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. *Pengeluaran Per Kapita*

Tingkat perekonomian daerah dan kesejahteraan penduduk dapat diketahui salah satunya melalui seberapa besar pengeluaran masyarakat. Tingkat pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui jumlah pendapatan masyarakat.

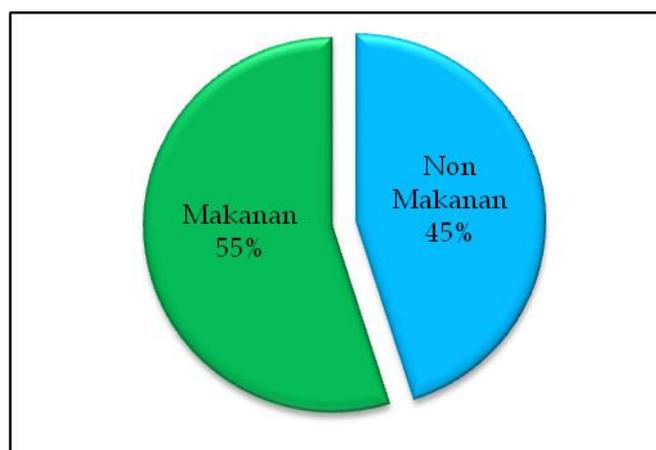
Struktur pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan, dimana semakin rendah pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian suatu masyarakat. Berdasarkan data susenas tahun 2013, secara rata-rata persentase pengeluaran penduduk di Kabupaten Bangka Barat untuk komoditi makanan masih lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan.

Gambar 2.17 Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 -2013 (ribu rupiah/bulan)



Sumber: PDRB Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014. (diolah)

Gambar 2.18 Persentase Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Rata-rata Rumah Tangga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013



Sumber: PDRB Kab. Bangka Barat 2013, Tahun 2014. (diolah)

2. Produktivitas Total Daerah

Tabel 2.67 Produktivitas per Sektor Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Bangka Barat

No.	Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}
1.	Pertanian	671.816	765.370	859.514	1.002.183	1.197.437
2.	Pertambangan & Penggalian	769.430	868.778	941.878	1.026.029	1.076.008
3.	Industri Pengolahan	2.866.335	3.199.005	3.493.459	3.739.981	3.990.904
4.	Listrik, Gas & Air bersih	12.634	15.216	20.274	23.242	27.775

No.	Sektor	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]	2013 ^{**}
5.	Bangunan	209.563	265.828	318.134	399.979	496.752
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	729.382	878.486	1.069.753	1.286.475	1.549.706
7.	Pengangkutan & Komunikasi	46.299	51.478	58.891	65.804	77.584
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	53.787	65.477	75.322	89.124	106.249
9.	Jasa-jasa	240.639	306.227	389.387	475.537	585.129
A.	Total PDRB	5.599.885	6.415.865	7.226.612	8.108.354	9.107.544
B.	Jumlah Angkatan Kerja	70.929	93.757	87.221	84.949	92.206

Sumber: PDRB Kabupaten Bangka Barat 2013, Tahun 2014.

Berdasarkan data Produktivitas total daerah yang tersaji pada tabel 2.69, terdapat sektor yang meningkat tajam sejak tahun 2008 hingga 2012 yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Serta terdapat sektor yang relatif menurun produktifitasnya yaitu pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, dan keuangan dan sewa dan jasa perusahaan.

Melihat struktur yang ada, tentu perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat, dimana sektor-sektor yang berkembang adalah sektor-sektor yang masih berbasis ekstraksi sumber daya alam secara langsung. Untuk sektor-sektor yang bersifat komersial, jasa, dan peningkatan nilai tambah produk masih relatif belum baik.

Apabila Kabupaten Bangka Barat ingin mengubah arah pembangunannya; maka diperlukan intervensi yang serius terhadap sektor-sektor yang saat ini relatif menurun produktifitasnya. Selain itu, bila melihat rendahnya peningkatan produktifitas sektor konstruksi; maka bisa terlihat bahwa pembangunan properti di Kabupaten Bangka Barat masih relatif rendah; artinya iklim investasi masih perlu diperbaiki agar proses pembangunan fisik yang dilakukan oleh swasta juga dapat meningkat. Data ini juga didukung oleh temuan observasi yang menunjukkan bahwa banyak bangunan properti dengan peruntukan residensial terlihat terbengkalai dan tidak laku terjual.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas Daerah

**Tabel 2.68 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 s.d 2013**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Panjang Jalan	913,19	913,291	960,452	799,037	798,74
2.	Jumlah Kendaraan	31.118	36.187	45.215	43.447	45.161
	Rasio	1 : 34	1 : 40	1 : 47	1 : 54	1 : 57

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bangka Barat, Tahun 2014.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan baik roda 4 mdan roda 2 di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan rasio tahun 203 diatas menunjukkan setiap 1 km jalan diakses kendaraan baik roda 4 dan roda 2 sebanyak 57 kendaraan.

**Tabel 2.69 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2009 s.d 2013 Kabupaten Bangka Barat**

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Orang (Orang)	n/a	n/a	548.428	638.069	575.215
2.	Jumlah Barang (Ton)	91.802	83.292	94.865	166.203	94.865

Sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Untuk jumlah orang yang ada ditabel tidak termasuk penumpang angkutan udara tetapi hanya penumpang yang melewati terminal Muntok dan Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Sedangkan jumlah barang yang ada ditabel hanya jumlah barang yang melewati Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok.

Tabel 2.70 Jumlah Kunjungan Kapal/Perahu, Lalu Lintas Barang dan Penumpang melalui Pelabuhan Muntok dan Tanjung Kalian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009-2013

Tahun	Barang (ton)		Penumpang (orang)	
	Bongkar	Muat	Debarkasi	Embarkasi
2009	41.740	50.062	143.914	140.090
2010	41.068	42.224	199.586	167.866
2011	54.143	40.722	255.321	201.094
2012	107.054	59.149	198.690	230.145

Tahun	Barang (ton)		Penumpang (orang)	
	Bongkar	Muat	Debarkasi	Embarkasi
2013	94.442	33.262	136.370	190.845

Sumber : *Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.*

2. *Penataan Wilayah*

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, dari Rencana Peruntukan RTRW seluas 285.100,90 ha, telah ditetapkan kawasan budidaya seluas 248.660,05 ha sebagai potensi pengembangan wilayah, yang terdiri dari beberapa kawasan peruntukan antara lain :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 77.742 ha
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 2.050 ha
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian, yang terdiri atas :
 - 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disetiap kecamatan dengan total luas ± 15.812 ha, dari luas total tersebut ± 11.099 ha berada di kawasan hutan;
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disetiap kecamatan dengan total luas ± 1.598 ha;
 - 3) Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas ± 41.860 ha, dengan rincian:
 - a) Kecamatan Muntok seluas ± 5.903 ha
 - b) Kecamatan Simpangteritip seluas ± 10.493 ha
 - c) Kecamatan Jebus seluas ± 712 ha
 - d) Kecamatan Kelapa seluas ± 10.421 ha
 - e) Kecamatan Tempilang seluas ± 14.331 ha
 - Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas ± 14.331 ha, dan dari luas total tersebut ± 166 ha berada di kawasan hutan produksi.
 - 4) Kawasan peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok dan Kecamatan Jebus seluas ± 72 ha.

Luas wilayah perkotaan di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat adalah ±9.331 ha dan jika dibandingkan dengan luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW sekitar 3,75%.

3. Fasilitas Bank

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

**Tabel 2.71 Jumlah Bank dan ATM
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 – 2013**

No.	Kecamatan	BANK	ATM
1.	Muntok	9	11
2.	Simpang Teritip	2	1
3.	Jebus	0	1
4.	Kelapa	3	2
5.	Tempilang	3	2
6.	Parittiga	6	4
	2013	23	21
	2012	23	21
	2011	16	13
	2010	14	10
	2009	14	9

Sumber : *Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.*

Berdasarkan tabel 2.68 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah bank di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 23 bank dan terjadi peningkatan jumlah kantor dan jenis bank sejak 2009 sampai dengan 2013. Tingkat pertumbuhan kantor dan jenis bank di Kabupaten Bangka Barat sejak 2009 sampai dengan 2013 rata-rata adalah 11,61% pertahun, sedangkan tingkat pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 43,75%. Dari tabel 2.68 diatas, pada tahun 2013 jumlah bank terbanyak di Kecamatan Muntok dengan jumlah 9 kantor bank dengan rincian yaitu 1 Bank Mandiri, 1 Bank Muamalat, 2 Bank BRI, 1 Bank Sumsel Babel, 1 Bank Danamon, 1 Bank Syariah Bangka dan 1 Bank UTARI serta 1 Bank BNI. Setelah Kecamatan Muntok diikuti oleh Kecamatan Parittiga dengan jumlah kantor bank sebanyak 6 unit, yang jenis banknya

hampir sama dengan Kecamatan Muntok yaitu Bank Sumsel Babel, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon dan bank swasta nasional yaitu Bank BCA. Dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat hanya Kecamatan Jebus yang belum memiliki bank, sedangkan di Kecamatan Kelapa dan Tempilang masing-masing memiliki 3 kantor bank dan Kecamatan Simpang Teritip 2 kantor bank.

Untuk mempermudah masyarakat dalam proses transaksi keuangan guna memenuhi kebutuhan akan uang tunai dalam jumlah tertentu tanpa harus datang ke bank, bank biasanya menyediakan ATM. Jumlah ATM pada Tahun 2013 di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 21 unit ATM. Tingkat pertumbuhan ATM rata-rata adalah 20,51% pertahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2012 yaitu 61,54%. Dari tabel dapat dilihat bahwa semua kecamatan telah memiliki fasilitas ATM yang notabene Kecamatan Jebus meskipun belum memiliki bank tapi sudah memiliki ATM sebanyak 1 unit. Fasilitas ATM terbanyak pada Tahun 2013 ada di Kecamatan Muntok sebanyak 11 unit kemudian diikuti oleh Kecamatan Parittiga sebanyak 4 unit dan Kecamatan Kelapa dan Tempilang masing-masing 2 unit serta Kecamatan Simpang Teritip 1 unit.

4. Fasilitas Listrik dan Telepon

a. Fasilitas Listrik

Listrik memegang peranan yang penting sekali dalam pembangunan, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga. Sebagai faktor produksi tersedianya tenaga listrik cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industry, pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sektor-sektor ini sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengubah struktur ekonomi dan lain-lain. Disamping itu tersedianya listrik dikalangan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.72 Jumlah Pelanggan Listrik PLN di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2009-2013**

No.	Jenis Pelanggan	Banyak Pelanggan				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Badan Sosial	360	408	448	642	720
2.	Rumah tangga	13.456	15.902	23.953	33.475	40.228
3.	Bisnis	611	677	755	885	979
4.	Industri	3	3	3	4	8
5.	Pemerintahan	114	143	169	190	226
6.	Penerangan Jalan	17	17	17	21	21
7.	Multiguna / Layanan Khusus	51	0	0	85	106
	Jumlah / Total	14.612	17.150	25.345	35.302	42.288

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Dari tabel 2.69 jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat. Pada tahun 2009 jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 14.612 pelanggan dan pada Tahun 2013 sudah mencapai 42.288 pelanggan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 24,85% pertahun dan tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yaitu 47,78%. Pelanggan listrik PLN ini dibedakan menjadi 7 jenis pelanggan yaitu Badan Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintahan, Penerangan Jalan dan Multiguna / Layanan khusus. Dari ke tujuh jenis pelanggan tersebut rumah tangga merupakan pelanggan terbanyak setiap tahunnya kemudian diikuti oleh pelanggan bisnis, badan social dan pemerintahan. Pelanggan industri merupakan pelanggan paling kecil jumlahnya dan tingkat pertumbuhannya pun sangat lambat dimana dari tahun 2009-2011 jumlah pelanggan hanya 3 pelanggan dengan tingkat pertumbuhannya 0%, baru tahun 2012 pertumbuhannya bertambah menjadi 33,33% atau bertambah 1 pelanggan sehingga pada tahun tersebut menjadi 4 pelanggan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi 100% atau bertambah 4 pelanggan sehingga total pada tahun 2013 pelanggan industry menjadi 8 pelanggan.

b. Fasilitas Telepon dan Komputer

Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Selular, Komputer Desktop, Komputer Laptop

Tahun	Telepon	Telepon Seluler	Komputer Desktop	Komputer Laptop
2012	2,39	87,93	1,49	10,34
2013	1,33	91,81	1,38	9,03

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan alat komunikasi berupa telepon mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 44,35% dalam periode 1 tahun, dimana kondisi rumah tangga saat ini yang masih menggunakan telepon hanya 1,33%. Kondisi tersebut terjadi karena azas manfaat yang dirasa oleh pengguna (rumah tangga) terhadap perangkat telepon sudah sangat minim dan jauh tertinggal dari pesaingnya telepon selular. Telepon selular mengalami peningkatan sebesar 4,4% dalam periode 2012 ke tahun 2013. Saat ini rumah tangga yang menggunakan telepon selular di Kabupaten Bangka Barat sudah mencapai angka 91,81%.

Terkait penggunaan komputer baik dalam bentuk komputer desktop maupun laptop pada rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat sama-sama mengalami penurunan. Dalam 1 tahun pengguna komputer desktop turun sebesar 7,4 %, sedangkan pengguna laptop turun sebesar 12,7%. Berkurangnya pengguna perangkat komputer juga terkait dengan perkembangan teknologi, dimana hadirnya telepon selular yang canggih seperti *smartphone* dan *phonepad* yang memiliki banyak manfaat termasuk *fiture* yang terdapat pada perangkat komputer.

5. Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Tabel 2.74 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Usaha Restoran dan Rumah makan	22	537	22	555

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2014

Perkembangan usaha restoring dan rumah makan di Kabupaten Bangka Barat sangat lemah, dan dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah restoran dan rumah makan antara tahun 2012 dan 2013, dengan 22 usaha. Hanya terdapat penambahan pada sisi jumlah kursi yang ada walaupun penambahannya tidak signifikan yaitu hanya sebesar 3,4% dari 537 kursi di tahun 2012 menjadi 555 kursi di tahun 2013.

Untuk penyajian data terkait usaha restoran dan rumah makan masih dirasa kurang lengkap karena belum bisa memilah data restoran dan rumah makan sesuai jenis serta kelasnya.

6. *Ketersediaan Penginapan*

Tabel 2.75 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	Tahun 2012			Tahun 2013		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel non-Bintang	10	143	191	10	143	191
Total		10	143	191	10	143	191

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kab. Bangka Barat, Tahun 2014

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat juga sangat lemah, dan dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah hotel antara tahun 2012 dan 2013, yaitu terdapat 10 jumlah hotel non berbintang. Dari data yang ada, jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang ada di hotel juga tidak mengalami perkembangan.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Maksudnya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam wilayah tersebut. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam

menarik minat investor di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Insentif dan Retribusi.

1. *Keamanan dan Ketertiban*

Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah / daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76 Angka Kriminalitas Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Kasus Narkoba	12	0	19	28	17
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	0	4	5	3
3.	Jumlah Kasus Kejahatan Seksual	1	0	3	0	3
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	0	5	16	0	13
5.	Jumlah Kasus Pencurian	32	68	27	111	95
6.	Jumlah Kasus Penipuan	0	0	13	9	13
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	2	1	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	47	74	82	153	144
9.	Angka Kriminalitas	3,228	4,226	4,539	8,122	7,079

Sumber : *Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.*

Tabel 2.77 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Bidang Politik	-	-	-	-	-	-
2.	Ekonomi	2	2	2	5	3	2
3.	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-	-
Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa		2	2	2	5	3	2

Sumber: *Kantor Penanggulangan Bencana dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangka Barat, Tahun 2014*

Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi di Kabupaten Bangka Barat di sajikan pada tabel di bawah ini.

2. Perizinan

Tabel 2.78 Lama Proses Perizinan Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Resmi (rata-rata maks Rp.)
1.	SIUP	3	5	Tidak ada retribusi
2.	TDP	3	5	Tidak ada retribusi
3.	IUI	3	5	Tidak ada retribusi
4.	TDI	3	5	Tidak ada retribusi
5.	IMB	14	13	Rp 3,000,000.00
6.	HO	7	7	Rp 6,000,000.00

Sumber: Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Bangka Barat, Tahun 2014

Investasi yang masuk ke daerah sangat bergantung kepada daya saing suatu daerah bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi daerah berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu daerah sangat menunjang suatu proses administrasi suatu investasi.

Jenis perizinan yang ditangani oleh Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 berjumlah 6 perizinan terdiri dari SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB, HO dengan lama pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan aturannya masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

3. Insentif dan Retribusi

Tabel 2.79 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Bangka Barat

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	128.873.700	107.212.500	149.330.000	358.744.340	455.034.491

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	6.443.685	5.360.625	7.466.500	17.937.217	22.751.725
3.	Jumlah retribusi yang dikeluarkan	3.238.717.650	1.540.004.630	3.486.517.710	218.376.400	167.006.500
4.	Jumlah retribusi yang mendukung iklim investasi	161.935.883	77.000.232	174.325.886	10.918.820	8.350.325

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bangka Barat, Tahun 2013.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung berdasarkan aturan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. sementara retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan.

Sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam membangun iklim investasi yang memiliki daya saing dan memiliki keberpihakan kepada dunia usaha, pajak dan retribusi daerah (umumnya berbentuk peraturan daerah), dapat melakukan tekanan yang bersifat insentif maupun disinsentif sebagai sebuah kebijakan daerah terhadap aktivitas ekonomi. Perda Kabupaten Bangka Barat sebagai instrumen kebijakan yang bersifat formal yang mendukung iklim investasi secara umum meliputi seluruh Perda terkait perizinan.

2.4.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Tabel 2.80 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014*
Tidak/belum sekolah	31.709	37.337	42.654	47.976	49.620
Belum/tidak tamat SD	25.005	26.695	27.737	28.478	28.681
Tamat SD	57.103	61.397	63.781	65.669	66.142

Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014*
Tamat SMP	20.104	21.999	23.308	24.342	24.676
Tamat SMA	24.207	26.016	27.290	28.329	28.594
Diploma I/II/III	2.684	2.877	2.985	3.094	3.112
S1	2.644	2.901	3.064	3.233	3.255
S2	57	64	71	77	77
S3	1	1	2	3	3
Total	163.514	179.287	190.892	201.201	204.160

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2014.

Ket : * = Data s/d Bulan Juni.

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Dari data Tabel 2.80 diatas, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terbesar adalah tamat SD (32,39%) dan tidak/belum sekolah (24,30%), sementara total lulusan S1/S2/S3 hanya sebesar 1,6 %. Jika disajikan dalam rasio lulusan S1/S2/S3, kabupaten Bangka Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 163 (jumlah lulusan S1/S2/S3 dibagi jumlah penduduk dikali 10.000) yang berarti sumber daya manusia di sisi tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dibawah S1.

2. Tingkat Ketergantungan

Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 (persen)

No.	Kecamatan	Kelompok Umur		Jumlah
		0 – 14 Tahun	65 Tahun keatas	
1	Kelapa	45,53	5,20	50,73
2	Tempilang	43,92	5,33	49,25
3	Muntok	39,16	5,31	44,47
4	Simpangteritip	50,81	4,82	55,63

No.	Kecamatan	Kelompok Umur		Jumlah
		0 – 14 Tahun	65 Tahun keatas	
5	Jebus	44,49	4,83	49,32
6	Parittiga	43,18	5,15	48,33
7	Bangka Barat	43,8	5,15	48,95

Sumber : Bangka Barat Dalam Angka 2014, Tahun 2014.

Rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat sebesar 48,95 % yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) menanggung 49 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan sebesar 48,95 % ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 43,80 % dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,15 %. Berdasarkan indikator ini, terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia produktif di Kabupaten Bangka Barat menanggung penduduk usia muda yang lebih besar proporsinya dibandingkan dengan penduduk usia tua.

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, baik rencana dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Isu strategis dapat menentukan fokus pembangunan daerah dan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Analisis terhadap isu strategis sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan agar organisasi dalam pelaksanaan pembangunan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Analisis isu strategis dilakukan dengan menggali isu-isu yang berkembang mulai dari isu daerah, regional, nasional, hingga internasional dari berbagai aspek pembangunan. Isu-isu yang ada tersebut kemudian ditinjau lebih dalam lagi hingga diperoleh isu strategis yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat

1. *Pendidikan*

Sektor pendidikan merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan masyarakat di suatu daerah. Secara lebih rinci, kualitas penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, rasio guru, cakupan layanan pendidikan, sarana prasarana pendidikan dan lain-lain.

Tabel 3.1 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Cakupan pelayanan pendidikan dan kualitas sekolah yang masih kurang sehingga memicu tumbuhnya sekolah filial.	<ul style="list-style-type: none">• Sudah ada wajib belajar 12 tahun yang didukung dengan dana BOS pusat dan provinsi serta pendamping dari dana APBD.

<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan kuantitas Guru belum memadai. Adanya kecenderungan penurunan rasio antara ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah terutama di tingkat SD dan SMP. • Angka putussekolah masih tinggi dan meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan(rata-rata lama sekolah tahun 2012 sebesar 6,8 tahun). Salah satu penyebab utama adalah perilaku dan kondisilingkungan yang kurang mendukung. • Kurangnya fasilitas praktik untuk sekolahkejuruan. • Sekolah kejuruan belum mengakomodasi sektor-sektor yang berpotensi akan berkembang di Kabupaten Bangka Barat. • Belum adanya perguruan tinggi di Kabupaten Bangka Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya 3 pilar kebijakan strategis pendidikan yang digalakkan yaitu: pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, pencitraan <i>public/good gorvenment</i>. • Adanya peningkatan kualitas pendidikan yang dilihat dari peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 1,29% dan angka melek huruf 1,73%. • Angka Partisipasi Murni untuk SMP terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 mencapai 77,05%. Sedangkan peningkatan APM SMA juga meningkat meski lebih lambat. • Adanya kecenderungan peningkatan IPM sebesar 0,5 poin per tahun sejak 2010 hingga 2012.
--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat diantaranya adalah sarana dan prasarana yang dinilai belum memenuhi standar pelayanan minimum (SPM). Hal ini terlihat dari jarak yang harus ditempuh siswa ke sekolah cukup jauh. Selain itu, kualitas dan kuantitas guru pengajar belum memadai. Kondisi ini juga berdampak pada kualitas sekolah itu sendiri yang juga masih rendah.

Kemudian, sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Barat belum mengakomodasi sektor yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pariwisata dan industri pengolahan. Pengadaan sekolah kejuruan dapat menjadi solusi dengan catatan bahwa sarana pendukung kegiatan praktikum harus memadai.

Jika melihat pada Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Partisipasi Kasar serta Angka Partisipasi Murni, dapat disimpulkan bahwa putus sekolah terbesar Kabupaten Bangka Barat terdapat pada jenjang SMP lalu kemudian SMA. Mayoritas penduduk Bangka Barat telah menyelesaikan jenjang SD dengan Angka Partisipasi Murni sebesar 96,04. Namun angka tersebut menurun drastis di jenjang SMP yang hanya 77,05 dan SMA yang hanya 42,63. Hal yang cukup menggembarakan adalah APM SMP sejak empat tahun terakhir mengalami

peningkatan yang cukup drastis dari 56,77 di tahun 2009 hingga 77,05 di tahun 2013.

Pada sisi yang lain, APM pada jenjang SMA belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sejak tahun 2009 hingga 2013, APM SMA hanya berkisar dari 32,9 hingga 42,63. Dari diskusi grup terfokus, dapat dirumuskan bahwa kecenderungan putus sekolah di jenjang SMA ini adalah karena kecenderungan peserta didik masuk ke dunia kerja lebih awal. Pemasukan dari sektor tambang cukup menggiurkan dan tidak membutuhkan syarat kelulusan sehingga menyebabkan peserta didik rela meninggalkan bangku sekolah.

Agar dapat mengakomodasi peserta didik yang ingin segera masuk ke dunia kerja, Pemerintah Bangka Barat perlu mengupayakan pendirian sekolah kejuruan. Selain itu pemerintah juga bisa mengembangkan pendidikan vokasi yang dapat ditekuni sambil peserta didik bekerja. Pendidikan formal perlu diupayakan agar penduduk Bangka Barat memiliki daya saing yang cukup untuk menghadapi persaingan bebas di Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan dana BOS pusat, provinsi, serta pendamping dari dana APB sehingga wajib belajar 12 tahun dapat berjalan efektif. Peningkatan rata-rata lama sekolah berdampak juga pada peningkatan angka melek huruf. Selain itu, tetap diperlukan kebijakan strategis pemerintah daerah seperti pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan pencitraan publik agar memahami bahwa pendidikan merupakan investasi penting jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia Bangka Barat selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari sebelumnya 70,07 di tahun 2010 menjadi 70,94 di tahun 2012. Rata-rata peningkatan sebanyak 0,43 poin per tahun ini menjadi pertanda kualitas manusia di Bangka Barat semakin membaik. Pada akhir tahun 2024, dengan peningkatan konstan tersebut Bangka Barat diharapkan sanggup mencapai IPM sebesar 75. Jika melihat pada unsur pembentuk IPM, maka kelemahan utama Bangka Barat adalah stagnannya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah. Oleh sebab itu, agar dapat mencapai IPM 75, maka upaya peningkatan RRLS perlu menjadi isu utama.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga merupakan komponen penting penentu keberhasilan pembangunan daerah. Berbagai usaha dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Daerah ini memiliki satu RSUD dengan tipe C, delapan puskesmas dan beberapa puskesmas pembantu. Namun, ditinjau dari luas wilayah dan ketersebaran penduduk, ketersediaan fasilitas penunjang rumah sakit yang terbatas, dan tenaga ahli (spesialis) yang minim, maka sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten ini dinilai belum mencukupi standar pelayanan minimum.

Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan adalah perilaku masyarakat dan kualitas lingkungan. Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah pertambangan timah. Genangan pada lubang-lubang hasil galian menjadi tempat berkembang nyamuk khususnya malaria khususnya di Kabupaten Bangka Barat bagian utara. Dari segi perilaku, masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dinilai belum memprioritaskan kesehatan. Hal ini terlihat dari intensitas kunjungan posyandu yang rendah dan kebiasaan melakukan kegiatan tambang inkonvensional.

Tabel 3.2 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kesehatan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Terdapat 3 permasalahan besar bidang kesehatan, yaitu: permasalahan lingkungan, perilaku masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang secara determinan berpengaruh besar terhadap derajat kehidupan masyarakat.• Kabupaten Bangka Barat yang sebagian besar wilayah pertambangan menjadi tempat berkembangnya nyamuk malaria sehingga angka penyakit malaria tinggi.• Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang.• Cakupan pelayanan rumah sakit masih kurang.• Fasilitas peralatan-peralatan kesehatan masih belum memadai.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya peningkatan rasio bidan terhadap penduduk yang memberikan dampak positif terhadap angka harapan hidup bayi.• Adanya komitmen pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan penduduk.• Peningkatan sarana kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas.• Peningkatan rasio posyandu per satuan balita dari 7,94 di 2009 hingga 8 di 2013.• Peningkatan rasio dokter per satuan penduduk dari 0,2 di 2009 hingga 0,3 di 2013 dan tenaga medis per satuan penduduk dari 0,25 di 2009 hingga 0,36 di 2013.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan penyediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang mudah dijangkau masyarakat. Untuk saat ini kecenderungan posyandu lebih baik daripada ketersediaan puskesmas dan rumah sakit. Rasio puskesmas, poliklinik per satuan penduduk sejak tahun 2009 hingga 2013 masih berkutat di angka 0,19 hingga 0,17. Jumlah rasio rumah sakit per satuan penduduk juga hingga 2013 masih berada di angka 0,05. Dalam hal ini ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Peningkatan yang cukup baik dapat dilihat dari peningkatan rasio tenaga medis dan dokter per satuan penduduk. Dari tahun 2010 hingga 2013 rasio dokter berhasil meningkat 0,1 poin sedangkan tenaga medis meningkat 0,11 poin dari 2010. Peningkatan tenaga medis ini dapat terus diperbaiki seiring dengan penambahan fasilitas kesehatan bagi warga. Selain dari segi rasio, ketersediaan tenaga medis perlu dilengkapi dengan ketersediaan tenaga medis spesialis.

3. *Lingkungan Hidup*

Kabupaten Bangka Barat memiliki permasalahan lingkungan yang cukup serius. Kegiatan pertambangan menjadi sebab utama penurunan kualitas lingkungan seperti kualitas air, pencemaran sungai, dan kerusakan pada kawasan *mangrove*. Dari segi aturan, kegiatan pertambangan harus dikelola oleh pelaku tambang profesional dengan perencanaan yang komprehensif, termasuk didalamnya pertimbangan menjaga kualitas lingkungan. Namun, yang terjadi adalah sebagian besar penambangan dilakukan oleh perorangan tanpa mempertimbangkan kualitas lingkungan apabila kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara perorangan cenderung sulit dikendalikan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya zonasi yang jelas terkait klasifikasi daerah yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan.

Tabel 3.3 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Dominasi kegiatan penambangan yang menyebabkan penurunan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai ada kesadaran masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan di

<p>lingkungan seperti kualitas air dan rusaknya kawasan mangrove.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pengelolaan lingkungan penambangan individu. • Selain untuk operasi produksi, pertambangan ini juga harus memikirkan pekerjaan pasca tambang; • Belum adanya pengaturan reklamasi lahan pasca penambangan yang baik, sehingga pelaksanaan reklamasi masih menggunakan cara masing-masing perusahaan. • Sulitnya mengintegrasikan pembangunan pertambangan dengan keseimbangan lingkungan. • Belum adanya pengaturan zona pemanfaatan wilayah perairan. • Perusahaan yang wajib amdal dan sudah mengurus amdal sebesar 85% pada tahun 2013, belum mencapai target 100%. • Persentase penanganan sampah cenderung menurun dari 30,4 di 2010 menjadi 18,81 di 2013. 	<p>masa depan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya indikasi pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat dari sektor pertambangan menuju sektor non pertambangan. • Persentase penduduk dengan akses air minum semakin membaik dari 18,33 % di 2010 hingga 20% di 2013. • Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk semakin membaik dari 0,36 di 2010 hingga mencapai 0,58 di 2013.
---	---

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Namun, ada kecenderungan di masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai memikirkan alternatif ekonomi selain pertambangan. Ada indikasi pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat dari sektor pertambangan menuju sektor non-pertambangan. Hal ini merupakan modal utama untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan di masa depan.

Selain aspek daya dukung lingkungan, aspek lain di bidang lingkungan hidup yang perlu diperhatikan adalah layanan pemerintah di bidang ini. Indikator yang dapat diperhatikan antara lain persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, TPS per satuan penduduk serta AMDAL. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki permasalahan pada penanganan sampah. Persentase sampah yang ditangani semakin menurun dari sebelumnya 30,4 hingga 18,81 di tahun 2013. Namun demikian, rasio TPS per satuan penduduk mengalami peningkatan dari sebelumnya 0,36 menjadi 0,58 dan nilai tersebut akan terus ditingkatkan.

4. Pekerjaan Umum

Jaringan jalan di Kabupaten Bangka Barat, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, yang menghubungkan antar kota dan antar kecamatan dimana sebagian besar masih berkondisi baik. Namun, dari segi konektivitas, jaringan jalan belum dikembangkan ke daerah-daerah pinggiran yang berpotensi sebagai daerah pariwisata. Pengembangan desa mandiri masih bersifat *urban sentris* (berpusat di wilayah perkotaan), sedangkan desa-desa yang berpotensi sebagai daerah wisata cenderung jauh dari perkotaan.

Tabel 3.4 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Cakupan jalan dengan kondisi baik masih belum mencakup seluruh wilayah kabupaten, yaitu sebesar 84% wilayah Kabupaten Bangka Barat.• Cakupan fasilitas desa mandiri masih terbatas• Kerusakan fasilitas publik akibat aktivitas pertambangan.• Naik dan turunnya panjang jalan yang mantap sempurna selama empat tahun terakhir menunjukkan Laju perbaikan belum mampu mengatasi laju kerusakan secara optimal.	<ul style="list-style-type: none">• Kondisi jalan nasional/provinsi yang menghubungkan kota/kecamatan sudah terbangun dengan baik• Keberadaan pelabuhan Muntok dan potensi pengembangan pelabuhan di Tanjung Ular• Adanya sedikit peningkatan kondisi jalan kondisi baik dari 42,64% di 2010 menjadi 45,69% di 2013.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Salah satu cara percepatan pembangunan infrastruktur adalah dengan menarik investasi. Keberadaan Pelabuhan Muntok dan adanya rencana pengembangan Pelabuhan di Tanjung Ular berpotensi menarik investasi sehingga dapat mempercepat pengembangan infrastruktur. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pertambangan yang di satu sisi menarik investasi, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerusakan fasilitas publik.

Adanya kerusakan yang terjadi secara konstan dapat dilihat dari indikator kemantapan jalan yang terus mengalami naik dan turun. Pada tahun 2010 kemantapan jalan, berupa mantap sempurna sepanjang 353.504 km atau 42,64%, kemudian meningkat menjadi 405.089 km atau 51,13% di tahun 2012 lalu turun

kembali menjadi 364.954 atau 45,69% di tahun 2013. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Bangka Barat untuk memperbaiki kualitas jalan secara terus menerus.

5. *Penataan Ruang*

Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam rangka menciptakan keterpaduan serta keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya yang efisien dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di suatu kawasan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyeimbangkan penggunaan ruang perkotaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diatur bahwa suatu kawasan harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas wilayahnya, dimana 20% berupa RTH publik dan 10% berupa RTH privat.

Kabupaten Bangka Barat masih menggunakan dokumen RTRW lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, pemerintah daerah belum menyusun RDTR kecamatan. Dengan demikian, pembangunan sulit untuk mengacu pada aturan yang terdapat dalam RTRW. Hal ini juga berdampak pada sulitnya control terhadap pembangunan yang ada.

Dari segi perizinan, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan terhadap lahan yang dapat dikembangkan, yaitu kurang dari 30% luas lahan Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dikarenakan kepemilikan sebagian besar lahan oleh kegiatan pertambangan.

Tabel 3.5 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Penataan Ruang

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya Rencana Detail Tata Ruang di setiap kecamatan, sehingga pedoman terkait penataan ruang secara detail terhambat. • Cakupan bangunan ber-IMB yang terbatas. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan hanya sebesar 2,7% pada tahun 2013. • Luasan lahan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan terbatas, kurang dari 30%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Batas administrasi desa dan kecamatan sudah jelas • Adanya rencana revisi RPJP tahun 2005-2025 • Ruang terbuka hijau masih tinggi, yaitu sebesar 36,02% yang sebagian besar berupa hutan.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Untuk mengoptimalkan pembangunan, pemerintah daerah memiliki modal berupa batas administrasi desa dan kecamatan yang sudah jelas. Kemudian, adanya revisi pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025 diharapkan dapat mengakomodasi penataan ruang. Meskipun lahan yang dapat dikelola pemerintah kurang dari 30%, namun sisa lahan tersebut sebagian merupakan ruang terbuka hijau dan masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan.

Kabupaten Bangka Barat dalam penataan ruang masih jauh tertinggal dalam aspek rasio bangunan ber IMB. Hingga tahun 2013, rasio bangunan ber IMB baru sebesar 2,7%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius sebab IMB menjadi salah satu bentuk ketaatan terhadap tata ruang. Banyaknya bangunan tanpa IMB bisa menunjukkan pelanggaran yang banyak pula dalam aspek tata ruang. Selain itu tanpa IMB yang jelas, Pemerintah Bangka Barat juga tidak dapat optimal mengenakan pajak bumi dan bangunan kepada warga. Padahal pembayaran pajak merupakan salah satu elemen penting dalam pembiayaan pembangunan.

6. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan pada suatu wilayah di dokumentasikan melalui buku-buku rencana yang disusun secara bertahap. Buku-buku rencana tersebut terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Setelah disusun dan disetujui oleh para pemangku kepentingan, buku rencana ini kemudian ditetapkan (dilegalisasi) menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Peraturan ini menjadi sarana publikasi dan sosialisasi bagi pemerintah daerah sehingga masyarakat dan pihak swasta mengetahui dan dapat berpartisipasi mengimplementasikan rencana pembangunan daerah tersebut.

**Tabel 3.6 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 yang telah disusun sebelumnya dinilai belum mengakomodasi pembangunan strategis kabupaten. • Belum sinkronnya RPJPD/RPJMD antara Kabupaten Bangka Barat dengan Provinsi dan Kabupaten lainnya. • Kurang tersosialisasinya rencana pembangunan kepada masyarakat. • Penyusunan RPJPD sebelumnya belum melibatkan stakeholder pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rencana revisi RPJPD tahun 2005-2025 • Adanya ekspektasi perubahan RPJPD provinsi dan kabupaten lain di dalamnya mengikuti Permendagri

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Salah satu permasalahan terkait perencanaan pembangunan, RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 yang telah disusun sebelumnya dinilai bersifat sangat umum dan tidak mengakomodasi pembangunan strategis kabupaten. Selain itu, RPJPD Kabupaten Bangka Barat juga belum mempertimbangkan rencana pembangunan provinsi maupun kabupaten sekitarnya. Dokumen ini juga tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat.

Namun, adanya revisi terhadap RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 diharapkan dapat mengakomodasi tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta dapat mengoptimalkan potensi daerah. Adanya ekspektasi perubahan RPJPD provinsi dan kabupaten sekitarnya diharapkan juga dapat mempertimbangkan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat.

7. Perumahan

Kondisi perumahan di Kabupaten Bangka Barat, dari segi fisik cukup baik. Tidak ada kawasan permukiman kumuh. Namun, infrastruktur perumahan seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai masih terbatas salah satunya penerangan lampu jalan yang minim. Selain itu, dari segi pendataan, nilai NJOP rumah jauh di bawah harga pasar. Hal ini tentu menghambat penerimaan pendapatan daerah yang berdampak pada kurang optimalnya pembangunan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 3.7 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Perumahan**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur perumahan yang masih terbatas • Daya beli masyarakat terhadap rumah layak huni masih kurang • Nilai NJOP jauh di bawah harga pasar • Pengguna listrik dan air bersih masih berkisar 83-88%, belum mencapai di atas 97%. • Meningkatnya rumah tangga pengguna listrik harus diimbangi dengan ketersediaan listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Muntok tuan rumah <i>Homestay Fair</i> yang memberikan kesempatan penduduk untuk memperbaiki rumahnya supaya layak menjadi <i>homestay</i> • Perumahan di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar bersanitasi, yaitu sekitar 73,02%. • Rasio perumahan dan rumah layak huni cukup baik, selama empat tahun terakhir selalu di atas 97%. • Rumah tangga perngguna listrik cenderung meningkat secara drastis dari 38,15% di tahun 2010 menjadi 83,5% di 2013. • Rumah tangga pengguna air bersih cenderung mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi merencanakan kegiatan besar berupa *Homestay Fair* di daerah Muntok. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu perbaikan kualitas hunian rumah agar layak dijadikan sebagai tempat *homestay*.

Jika dilihat dari data yang tersedia, Kabupaten Bangka Barat mampu mempertahankan rasio rumah layak huni dan perumahan layak huni di atas 97% sejak 2010. Selain itu persentase rumah tangga dengan akses air bersih juga semakin meningkat dari 70,14 di tahun 2011 menjadi 88,2 di tahun 2013. Hal serupa juga dapat dilihat pada peningkatan rumah tangga pengguna listrik yang meningkat dari 55,25% di tahun 2010 menjadi 83,5% di tahun 2013. Persentase rumah tangga bersanitasi juga meningkat secara perlahan dari sebelumnya 50,32% di tahun 2011 menjadi 73,02% di tahun 2013.

Hal yang perlu diperhatikan dengan adanya peningkatan pengguna air bersih dan listrik adalah daya dukung. Misal kapasitas listrik yang juga perlu ditambah agar tidak menghambat pertumbuhan yang selama ini terjadi. Selain itu ketersediaan air bersih dan sumber harus bersih harus mulai dijaga agar dapat memenuhi kebutuhan penduduk Bangka Barat yang terus bertambah.

8. *Kepemudaan dan Olahraga*

Kabupaten Bangka memiliki potensi jumlah pemuda yang cukup besar. Jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya dan akan cukup mendominasi struktur piramida penduduk di Kabupaten Bangka Barat. Namun, kondisi pemuda cenderung belum dapat memilah perilaku baik dan buruk yang masuk ke dalam lingkungan pergaulan mereka. Adanya budaya luar Kabupaten Bangka Barat yang masuk sedikit banyak mempengaruhi para pemuda. Di sisi lain, tantangan lapangan pekerjaan dan kapasitas ketrampilan menjadi isu tersendiri bagi para pemuda di masa mendatang. Menimbang juga data menunjukkan bahwa angkata partisipasi murni pendidikan pada tingkat SD, SMP, dan SMA adalah 96,04%, 77,05%, dan 42,63%.

Salah satu potensi untuk mengelola pemuda adalah dengan pengembangan potensi aktivitas seni dan budaya. Namun, berdasarkan data yang telah dihimpun, jumlah gedung kesenian di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 0 (nol) gedung; dengan jumlah kelompok kesenian yang hanya 17 kelompok. Di sisi lain, jumlah gedung olahraga hanya 1 buah.

Tabel 3.8 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Masih banyaknya pemuda yang belum dapat memfilter pengaruh (perilaku) yang baik dan buruk dari luar• Sarana prasarana olahraga masih kurang, jumlah gedung olahraga hanya satu• SDM pelatih keolahragaan masih kurang	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan angka partisipasi murni pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA• 17 kelompok kesenian dan 98 grup olahraga

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Fasilitas sarana-prasarana olahraga relatif kurang memadai. Belum banyaknya fasilitas publik yang dapat digunakan warga sebagai sarana berolahraga membuat minat olahraga relatif tidak begitu tinggi di Kabupaten ini, padahal keberadaan sarana prasarana olahraga tidak hanya menunjang minat berolahraga, tetapi juga menambah minat untuk hidup sehat dan bergaul secara tepat. Terkait sumber daya manusia, jumlah pelatih olahraga baik di sekolah maupun di luar sekolah masih kurang.

9. Penanaman Modal

Isu utama terkait penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat adalah terkait regulasi pemerintah Kabupaten yang relatif belum mendukung datangnya penanaman modal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mendatangkan investor, tentu regulasi perlu mendukung; seperti keterbukaan informasi, peta peluang investasi di Kabupaten Bangka Barat, dan juga kecepatan dalam proses perizinan.

Tabel 3.9 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Regulasi pemerintah yang belum mendukung penanaman modal, terutama dari segi perizinan• Infrastruktur yang belum mendukung penarikan investor	<ul style="list-style-type: none">• Adanya potensi PMDN yang bisa dikembangkan lebih lanjut dengan nilai investasi Rp.1.654.321

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Selain itu, keadaan infrastruktur di Kabupaten Bangka Barat belum cukup memadai untuk menarik perhatian investor. Keadaan jalan di jalur utama memang sudah baik, namun infrastruktur lain seperti energy (listrik) dan air masih perlu pembangunan lebih lanjut. Bila infrastruktur belum siap, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan dananya di Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Barat memiliki banyak potensi alam pendukung untuk memajukan Kabupaten, seperti Kelapa Sawit, Lada Putih, dan Karet. Namun perlu menjadi perhatian tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut agar bisa menjadi layak jual untuk pasar yang lebih luas.

Tantangan kedepan adalah bagaimana Kabupaten Bangka Barat mampu meningkatkan jumlah investor PMDN maupun PMA. Berdasarkan data, PMA terakhir yang pernah berinvestasi di Kabupaten Bangka Barat adalah pada tahun 2009 (2 PMA). Setelahnya, belum ada lagi investasi asing yang masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Angka PMDN pun juga dinamis; dengan angka belum pernah sampai diatas 10 kerjasama investasi.

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data, pertumbuhan usaha kecil hanya 0.27% di tahun 2013 dengan standar capaian yang seharusnya adalah 25%. Sedangkan pertumbuhan usaha menengah hanya 3.16% dengan standard capaian adalah 10%. Meski pada tahun sebelumnya di tahun 2012, usaha kecil dan usaha menengah mengalami peningkatan masing-masing 6.21% dan 41.79%. Data ini menunjukkan; perlu adanya strategi pengembangan UKM yang lebih terarah untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, koperasi mengalami penurunan angka pertumbuhan dari 33.3% di tahun 2012 menjadi 10.9% di tahun 2013; adapun standard capaian yang diharapkan adalah 8%.

Belum adanya rencana pengembangan UKM secara khusus sejauh ini di Kabupaten Bangka Barat; karena memang belum terlihat pasar yang jelas bagi UKM. Usaha-usaha lokal yang berkembang biasanya masih terkait pertambangan timah, seperti penambang lokal. Selain itu perilaku masyarakat yang masih bergantung dengan pertambangan timah menilai bahwa mengembangkan UKM bukanlah pilihan menarik untuk penghidupan. Lebih lanjut, dibalik potensi sumber daya alam yang baik, masyarakat dan UKM di Kabupaten Bangka Barat belum cukup dekat dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing produknya.

Tabel 3.10 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM

Permasalahan Pembangunan	Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Rencana pengembangan UKM yang belum didukung oleh target pasar yang hendak dikembangkan. Angka pertumbuhan UKM belum tercapai.• Daya tarik pertambangan membuat masyarakat enggan untuk mengembangkan UKM• Teknologi pendukung daya saing UKM dan Koperasi terbatas	<ul style="list-style-type: none">• Adanya arah pengembangan UKM di sektor pertambangan dan perkebunan• Adanya pasar lokal dan wisatawan yang potensial untuk dimanfaatkan• Peningkatan pertumbuhan koperasi yang melampaui target standard.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Potensi kedepan adalah dengan memfokuskan diri ke UKM-UKM yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Dengan memanfaatkan dua bidang ini,

diharapkan UKM-UKM dapat terkoneksi dengan potensi ekonomi utama di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, perlu dipertimbangkan dengan cermat strategi untuk memanfaatkan pasar lokal dan wisawatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangka Barat mengalami catatan perbaikan dalam hal kepuasan masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Berdasarkan data survey Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2012 dan 2013; Bangka Barat mendapatkan nilai akhir B (skala penilaian adalah A-E); meski demikian, masih perlu adanya peningkatan layanan masyarakat terutama di daerah terpencil.

Kualitas pendataan penduduk, khususnya kelompok pendatang yang bekerja di Kabupaten Bangka Barat relatif masih kurang baik. Cenderung mereka yang migrasi ke Kabupaten Bangka Barat belum memiliki KTP dan KK yang definitif dari kantor catatan sipil. Perlu ada upaya-upaya yang dilakukan agar pendataan ini bisa berlangsung dengan baik. Data menunjukkan terjadi penurunan cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk (usia wajib ber-KTP) yaitu dari 85.74% ke 79.76%.

Tabel 3.11 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan pendatang yang bekerja di Kabupaten Bangka Barat masih rendah, terlihat dari cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk sebesar 79.76% (standard capaian 85%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan masyarakat terhadap administrasi kependudukan B

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Saat ini, penduduk Kabupaten Bangka Barat cukup banyak di isi oleh kelompok penduduk berusia produktif dan akan terus berlangsung untuk jangka panjang kedepan. Perlu ada strategi yang jelas agar masa depan lapangan kerja dan infrastruktur fisik bisa memadai untuk menampung sejumlah penduduk yang akan menempati Kabupaten Bangka Barat.

12. Ketenagakerjaan

Pada bidang ketenagakerjaan, data menunjukkan tingkat keterserapan angkatan kerja yang masih perlu ditingkatkan (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 65.42%). Sedangkan data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 3.79%. Catatan penting bagi pengembangan Kabupaten Bangka Barat adalah apabila ingin dilakukan perubahan struktur ekonomi; maka akan terjadi perubahan struktur tenaga kerja. Saat ini dua sektor tertinggi yang mampu menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pertambangan dan penggalian dengan masing-masing 36.22% dan 24.31%. Salah satu rencana yang akan dikembangkan adalah pembangunan industri, sedangkan saat ini keterserapan tenaga kerja di bidang industri adalah hanya 3.52%.

Isu menarik di Kabupaten Bangka Barat adalah upah/honor untuk tenaga kerja lokal diatas dari tenaga kerja luar Kabupaten Bangka Barat. Hal ini diakibatkan karena penduduk lokal sudah lebih terbiasa untuk mendapatkan apresiasi kerja besar di sektor pertambangan. Permasalahn lainnya adalah keterbatasan kemampuan (keterampilan) tenaga kerja lokal untuk dapat bekerja di sektor non-tambang; mereka perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa bekerja lebih produktif di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Tabel 3.12 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none">• Penyerapan lulusan pasca pendidikan dan pelatihan yang bekerja mandiri hanya 20.83% (dari target 40%)• Penempatan tenaga kerja terdaftar hanya 14.08% (dari target 20%)• Perbandingan upah tenaga kerja lokal yang relatif lebih tinggi ketimbang tenaga kerja luar Kabupaten Bangka Barat• Kualitas SDM terbatas; baik dari sisi pendidikan maupun ketrampilan.	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dominasi penduduk usia produktif• Keterbukaan terhadap pendatang yang sangat baik• Adanya potensi tenaga kerja produktif di sektor-sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, pertambangan dan penggalian.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah ini juga tidak didukung dengan keberadaan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang memadai. Sekolah kejuruan

yang ada pun belum banyak memiliki opsi jurusan yang mampu mengakomodasi sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Ditambah, belum adanya fasilitas yang memadai untuk menarik warga agar memiliki kemampuan tenaga ahli di bidang tertentu.

Terdapat dua faktor pendukung keberhasilan, yaitu jumlah penduduk usia produktif dan kemampuan keterbukaan warga lokal terhadap kelompok pendatang. Dua potensi ini perlu dikelola oleh Kabupaten Bangka Barat agar menjadi Kabupaten yang mampu melahirkan kesejahteraan bagi penduduknya.

13. Ketahanan Pangan

Berdasarkan data, ketersediaan pangan utama telah mencapai indikator capaian (9.37%) pada tahun 2013 (12.37%). Hanya saja, capaian ini belum berlaku untuk komoditas beras (12.14% dari indikator capaian 16.09%). Saat ini, baru 1 Desa yang telah memenuhi swasembada pangan; jumlah ini tentu butuh jadi catatan menimbang masih banyaknya desa-desa lain yang belum mencapai target swasembada yang diharapkan.

Ketahanan pangan menjadi catatan penting bagi pembangunan Kabupaten Bangka Barat. Mayoritas produk pangan di Kabupaten Bangka Barat berasal dari daerah lain dan harus melewati jalur distribusi Pangkal Pinang. Kebutuhan memasok dari daerah lain serta panjangnya jalur distribusi membuat harga pangan relatif lebih tinggi ketimbang harga normal di daerah sekitar. Kebutuhan pasokan dari luar daerah dikarenakan produktifitas pertanian di dalam Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah. Ada kecendrungan bahwa para penduduk lokal 'lupa' cara bertani karena telah lama bergantung dari penghidupan dari pertambangan. Selain itu, kondisi kualitas sumber daya air di Kabupaten Bangka Barat masih terbatas yang membuat mereka menjadi kesulitan untuk mengembangkan pertanian.

**Tabel 3.13 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Ketahanan Pangan**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas pertanian masih sangat rendah • Tingginya ketergantungan wilayah terhadap pasokan pangan dari wilayah lain • Inflasi harga pangan sangat dipengaruhi iklim atau kondisi transportasi laut • Kualitas dan kuantitas sumber daya air yang terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk pangan yang berdaya saing tinggi • Pengembangan produk pangan yang tidak bergantung pada air • Ketersediaan pangan utama yang telah mencapai target • Telah terdapat 1 desa yang telah swasembada pangan.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kedepan, perlu ada strategi khusus untuk mengembangkan produk pangan yang berdaya saing tinggi. Kabupaten Bangka Barat bisa menjadi beberapa produk unggulan yang ada sebagai kunci bagi mereka mengembangkan pertanian. Serta, membudidayakan produk-produk pangan yang tidak banyak bergantung pada kebutuhan air dalam jumlah besar.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan telah mendapatkan porsi yang proporsional dalam lembaga pemerintahan; tercatat terdapat 53.30% perempuan dari keseluruhan pegawai pemerintah di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, Keluarga Berencana telah semakin berkembang dan mampu berperan dalam menjaga kualitas keluarga; tercatat 77.41% masyarakat telah menerima KB sebagai bagian untuk menunjang peningkatan kualitas keluarga.

Kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi sebab kurang sadarnya keluarga dalam mendorong hidup sehat dan ASI eksklusif di keluarga. Kesadaran untuk memberikan ASI dikarenakan para Ibu yang bekerja tambahan (seperti mencari karet di hutan) dan memilih tidak menyusui anaknya. Hal ini terkonfirmasi juga dari masih belum optimalnya peran Posyandu dalam mendukung hidup dan keluarga sehat diantara masyarakat.

**Tabel 3.14 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran akan ASI eksklusif • Perilaku ibu yang lebih memprioritaskan mencari pendapatan daripada mengasuh anak • Keberadaan posyandu yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • PKK yang sudah bergerak ke pelosok untuk mencari anak bergizi buruk • Lebih dari 77% masyarakat menerima KB sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkeluarga • Jumlah pegawai perempuan di pemerintahan sudah proporsional

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang aktif dan telah bergerak untuk mengatasi isu-isu terkait pendidikan dan kesehatan keluarga, termasuk mencari anak-anak bergizi buruk. PKK adalah salah satu ujung tombak penting dalam membangun kesejahteraan keluarga melalui penyuluhan, pendampingan, dan pendidikan secara berkelanjutan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Jumlah penduduk suatu wilayah pada dasarnya bisa dipandang baik sebagai potensi maupun kelemahan dari wilayah tersebut. Angka penduduk yang relatif tinggi dengan kualitas yang baik, selama masih sejalan dengan daya dukung wilayah merupakan satu modal utama bagi daerah untuk berkembang. Berkaitan dengan kependudukan Kabupaten Bangka Barat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, faktor utama yang mempengaruhinya adalah angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi masalah pembangunan yang semakin besar. Belum adanya kesadaran program keluarga berencana (KB) menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat mengingat peningkatan jumlah sumber daya manusia yang tidak diiringi dengan kualitas yang baik karena kesadaran penduduk untuk meraih pendidikan tinggi masih sangat kurang.

**Tabel 3.15 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2013, Indikator cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif, mencapai 80,19%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 82,18%. • Angka PUS yang istrinya berada dibawah usia 20 tahun cukup tinggi (3,75%) dan melebihi target (4,02%). Namun pada beberapa wilayah, ada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman tentang pentingnya program pendewasaan usia perkawinan, sehingga banyak terjadi kawin mudah akibat pergaulan yang tidak semestinya. • Kesadaran untuk meraih pendidikan tinggi masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meskipun belum mencapai target, angka PUS yang menjadi peserta KB Aktif termasuk tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program keluarga berencana. • Jumlah penyuluh lapangan pada tahun 2013 sudah mencapai target, yakni sebanyak 26 orang yang ditugaskan tersebar di 6 kecamatan. • Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat telah melebihi target pada tahun 2013.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Permasalahan tersebut mulai menarik perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun aktivis atau pemerhati masyarakat untuk mulai bergerak dalam mengatasi masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan aktif dan penyuluhan terkait pemahaman keluarga berencana dan pentingnya pendidikan dapat menjadi inisiasi yang sangat baik dalam mendukung keberhasilan dalam penyelesaian masalah yang ada.

16. Perhubungan

Pembangunan daerah erat kaitannya dengan aspek perhubungan karena berkaitan dengan hubungan timbal balik antar daerah yang satu dengan yang lainnya. Pembangunan daerah di sekitar Kabupaten Bangka Barat akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Bangka Barat, terutama jika terdapat keterkaitan satu sama lain. Akan tetapi konektivitas Kabupaten Bangka Barat dengan daerah lain di sekitarnya saat ini masih sangat kurang. Masalah tersebut kemudian diperbesar dengan konektivitas antar kecamatan dan kota di dalam Kabupaten Bangka Barat itu sendiri juga masih rendah. Hal tersebut menyebabkan pergerakan, yang dapat mendorong perkembangan dan

pembangunan, di Kabupaten Bangka Barat menjadi rendah. Permasalahan lainnya adalah simpul-simpul perhubungan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, yaitu perhubungan darat dan laut, masih memiliki tingkat keselamatan yang kurang.

Tabel 3.16 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perhubungan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keselamatan perhubungan darat dan laut masih kurang. • Konektivitas antarkecamatan dan kota masih kurang. • Konektivitas dengan daerah lain masih kurang. • Kinerja sarana dan prasarana perhubungan masih belum optimal dalam menunjang pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, serta belum mampu membangun jaringan ekonomi lintas kabupaten dan antar provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan fasilitas keselamatan perhubungan yang bersumber dari APBD, meliputi rambu-rambu, marka jalan, pagar pengaman jalan, <i>traffic cone</i>, <i>traffic light</i>, median jalan, rambu suar, delineator, dsb. • Dibukanya jalur perhubungan laut ke Tanjung Api-api. • Pembangunan dan pengembangan terminal angkutan tipe B di Muntok. • Peningkatan pelabuhan penyeberangan antar wilayah, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian • Kepemilikan tiga pelabuhan di wilayah kabupaten • Pembangunan dan pengembangan terminal angkutan penumpang tipe B di Muntok

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan perhubungan di Kabupaten Bangka Barat. Keberadaan tiga pelabuhan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat saat ini dapat menjadi titik penghubung Kabupaten Bangka Barat dengan daerah lain. Dibukanya jalur perhubungan laut Tanjung Kelian dan Tanjung Api-api juga akan dapat memacu konektivitas Kabupaten Bangka Barat dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular sebagai pusat industri yang akan meningkatkan aktivitas dan pergerakan, baik orang maupun barang, di Kabupaten Bangka Barat.

17. Komunikasi dan Informatika

Keberadaan akses terhadap jaringan komunikasi sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan akses informasi dan pengetahuan masyarakat, di samping

menjadi faktor penarik aktivitas dari luar ke dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat itu sendiri. Tetapi kondisi yang ada saat ini, akses terhadap jaringan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat masih kurang, yang kemudian ditambah dengan jaringan internet yang belum menjangkau wilayah secara merata.

Tabel 3.17 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap jaringan komunikasi masih kurang • Jaringan internet belum menjangkau secara merata 	

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya ter-*cover* oleh jaringan telekomunikasi nirkabel. Masih terdapat beberapa kawasan permukiman penduduk yang belum bisa menikmati teknologi komunikasi ini. Padahal di era teknologi yang pesat sekali perkembangannya ini, akses terhadap informasi terutama melalui internet, merupakan hal yang esensial agar suatu wilayah tidak kalah bersaing dengan wilayah di sekitarnya. Masih kurangnya akses komunikasi dan informatika ini berpengaruh terhadap penyampaian informasi pembangunan dari pemerintah ke tingkat masyarakat dan dukungan aktivitas investasi dari luar ke dalam Kabupaten Bangka Barat.

18. Pertanahan

Masalah pembangunan terkait dengan pertanahan yang paling menonjol di Kabupaten Bangka Barat adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepemilikan tanah dan proporsi kepemilikan lahan. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepemilikan tanah ditunjukkan dari rendahnya kepemilikan dan pembuatan sertifikat tanah yang sangat rendah. Hal tersebut menjadikan kepastian kepemilikan tanah oleh masyarakat menjadi tidak jelas. Sedangkan masalah lainnya adalah kepemilikan lahan di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh kepemilikan perusahaan besar. Kedua permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan menjadi penghambat dalam pembangunan karena pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanahan atau lahan.

**Tabel 3.18 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Pertanian**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran untuk melaporkan kepemilikan tanah dan pembuatan sertifikat tanah masih sangat rendah • Mayoritas lahan produksi di Kabupaten Bangka Barat dimiliki oleh perusahaan besar 	

Sumber: Hasil Analisis, 2014

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pembahasan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dititikberatkan pada nilai-nilai sosial di Kabupaten Bangka Barat yang dapat mempengaruhi kondisi nilai kesatuan. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya potensi konflik sosial yang terjadi di kabupaten ini. Masalah yang sudah terjadi saat ini adalah konflik kesenjangan ekonomi yang muncul antara masyarakat pemilik tambang dengan non tambang. Selain itu konflik juga terjadi akibat adanya proyek pemerintah yang tidak disetujui oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat (LSM) yang kurang baik. Permasalahan lainnya adalah adanya pembatasan terhadap wisatawan yang tidak mengikuti norma. Pembatasan ini dapat menjadi penghambat perkembangan wisata di Kabupaten Bangka Barat mengingat pengembangan sektor pariwisata merupakan potensi besar bagi Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 3.19 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya konflik kesenjangan ekonomi antara pemilik tambang dengan non tambang • Komunikasi pemerintah dengan masyarakat (LSM) masih kurang baik • Adanya pembatasan terhadap wisatawan yang tidak mengikuti norma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selama bertahun-tahun masyarakat Bangka Belitung yang cukup beragam dari segi ras dan agama, mampu hidup berdampingan secara rukun dan damai.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Salah satu langkah Kesbangpol untuk mencegah konflik adalah membentuk tim penanggulangan bencana. Langkah ini dapat menjadi inisiasi yang baik yang dapat mendukung keberhasilan penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi dan berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu faktor utama yang mendukung kondisi sosial dan kesatuan masyarakat adalah hubungan antarmasyarakatnya itu sendiri. Poin lebih yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini adalah adanya kerukunan antarmasyarakat atau antaretnis yang baik.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

PDRB Kabupaten Bangka Barat paling besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditopang oleh industri pengolahan timah, namun untuk pertumbuhan PAD yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat tidak signifikan dengan PDRB tersebut, dimana PAD hanya memberi kontribusi 6% terhadap APBD. Dari struktur APBD yang ada, sebagian besar APBD Kabupaten Bangka Barat dibiayai dari dana perimbangan (DAK, DAU, dan bagi hasil). Rendahnya PAD ini disebabkan oleh pajak per kapita di Kabupaten Bangka Barat yang masih sangat rendah. Padahal pelaksanaan pajak dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Oleh karena itu permasalahan utama terkait dengan keuangan daerah adalah penarikan pajak bumi dan bangunan masih belum berhasil.

Sedangkan dari segi kepegawaian, masalah yang terjadi adalah terbatasnya penduduk lokal yang menjadi PNS. Terbatasnya jumlah penduduk lokal yang menjadi PNS disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih berada di bawah kualitas sumber daya dari luar daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 3.20 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Otonomi Daerah**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PAD yang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah APBD • Dana perimbangan yang belum mencukupi • Jumlah penduduk lokal yang menjadi PNS di Kabupaten Bangka Barat masih rendah, tenaga • Penarikan pajak bumi dan bangunan masih belum berhasil 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesadaran pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi • Anggaran untuk belanja kepegawaian relatif rendah dibanding untuk belanja pembangunan • Keberadaan lokasi pemerintahan yang terpadu

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Namun, penyelesaian masalah tersebut masih sangat mungkin dilakukan karena adanya kepemilikan kesadaran pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi awal yang baik dalam melakukan perubahan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Selain itu anggaran untuk belanja kepegawaian yang masih relatif rendah dibanding untuk belanja pembangunan juga menjadi nilai positif tersendiri dalam mengoptimalkan keuangan daerah untuk pembangunan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan identik dengan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, kebebasan ini seringkali terbatas karena ketidakmampuan dalam bersuara (*voiceless*) dan ketidakberdayaan (*powerless*). Umumnya, masyarakat dengan kondisi seperti ini adalah masyarakat perdesaan yang memang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur fisik dan teknologi terkini. Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh masyarakat perdesaan ini yang tentunya menuntut strategi tertentu dalam upaya pemberdayaannya.

**Tabel 3.21 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Konektivitas desa dengan fasilitas layanan masih rendah • Pembangunan yang masih berorientasi pada pembangunan perkotaan • Belum teroptimalkannya pengembangan potensi desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat memiliki kemampuan (<i>skill</i>) dan pengetahuan (<i>knowledge</i>) yang memadai sesuai dengan bidang kerjanya (profesionalitas) saat ini. • Keberadaan BUMDes • Keberadaan rencana pengembangan Desa Mandiri di Kabupaten Bangka Barat • Keberadaan UU Desa yang memberikan alokasi sumber daya pembangunan bagi desa

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Pada dasarnya, ada empat unsur pemberdayaan masyarakat yaitu inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Inklusi terkait dengan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi terkait dengan bagaimana mereka diberdayakan dan apa peran yang dimainkan oleh setiap kelompok masyarakat. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, sudah merupakan ‘motto’ wajib yang kerap didengungkan dewasa ini. Ide pembangunan dari bawah (*bottom-up*) telah dipercaya akan menjadikan program pembangunan yang memiliki legitimasi.

Kendala yang dihadapi pada level pemerintah desa di Indonesia, umumnya dikarenakan peran aparatur desa yang masih terbatas pada penanganan persoalan administrasi, sedangkan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nyaris tak terdengar. Oleh karena itu, berbekalkan nuansa otonomi daerah yang masih kental di negeri ini, perlu adanya penguatan pemerintah desa supaya memiliki peran dan kedudukan yang lebih strategis dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat perdesaan. Upaya penguatan posisi pemerintah desa antara lain dengan menghadirkan Undang-undang tentang desa serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan akan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi desa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki wewenang membentuk Badan Usaha Milik Desa yang dapat melakukan usaha jasa keuangan dan usaha di sektor riil. BUMDes berkesempatan untuk mengelola aset desa seperti pasar, kawasan pariwisata, air bersih dan listrik pedesaan. BUMDes juga dapat bermitra dengan pengusaha (swasta dan BUMN) dalam pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

22. Sosial

Persoalan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih merupakan faktor yang patut jadi perhatian di Kabupaten Bangka Barat. Sekalipun angka partisipasi sekolahnya masih tergolong tinggi dalam konstelasi nasional, masyarakat yang mengenyam pendidikan lanjutan dan pendidikan vokasi masih sangat kecil jumlahnya. Keterbatasan fasilitas pendidikan lanjutan ini menyebabkan spektrum pekerjaan yang diambil oleh masyarakat masih sangat sempit, yakni pekerjaan yang 'mudah' dan berorientasi jangka pendek seperti aktivitas pertambangan timah. Kreativitas untuk mengembangkan pekerjaan ke sektor-sektor lain masih sangat terbatas dan kurang populer. Bahkan, sektor pertanian pun sudah mulai 'dianaktirikan' dengan adanya kemudahan menghasilkan rupiah secara cepat melalui aktivitas tambang timah.

Tabel 3.22 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Sosial

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas sumber daya manusia masih rendah sehingga daya saing terhadap wilayah yang lebih luas rendah • Adanya konflik kesenjangan ekonomi antara pemilik tambang dengan non tambang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan terhadap pendatang • Nilai religius masyarakat masih tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Dampak lain dari aktivitas pertambangan ini adalah adanya kesenjangan antara masyarakat yang memiliki akses pada aktivitas tambang, dan masyarakat yang tidak bekerja di sektor tambang timah. Kesenjangan seperti ini harus disikapi dengan strategi yang tepat agar potensi konflik yang mungkin muncul dapat dihindari sedini mungkin.

23. *Kebudayaan*

Kabupaten Bangka Barat memiliki keunikan khusus dalam hal budaya. Keberadaan beragam situs-situs yang masih berdiri sejak masa perjuangan Bangsa Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah ini. Kondisi ini diidentifikasi sebagai potensi wisata budaya yang diharapkan dapat menjadi daya tarik daerah bagi wisatawan-wisatawan luar daerah hingga luar negeri. Namun, saat ini kawasan wisata masih tergolong sepi peminat.

Tabel 3.23 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kebudayaan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
• Potensi budaya belum dimanfaatkan untuk wisata dengan baik	• Memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata budaya sejarah di daerah ini. Perhatian bisa difokuskan pada ‘mempercantik’ objek wisata budaya itu sendiri, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, atau menggalakkan objek wisata lainnya (contoh : wisata pantai) yang bisa dijadikan sebagai satu paket rangkaian perjalanan wisata.

24. *Kearsipan*

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang melibatkan kondisi masa kini, masa lalu, dan prediksi akan kondisi di masa mendatang. Oleh karena itu, rekam jejak informasi dan dokumen-dokumen masa lalu perlu disimpan dengan baik, agar dapat diakses dengan mudah saat diperlukan. Namun, seperti yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, arsip data masih belum terstruktur dengan baik. Dokumen-dokumen dan data masa lampau menumpuk di gudang secara tidak teratur, sehingga sulit untuk mengakses informasi-informasi tertentu yang telah tersimpan dalam waktu yang lama.

**Tabel 3.24 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Kearsipan**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Pengarsipan baku (standar) oleh SKPD masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah adanya standar pengarsipan baku (sistematis dan terstruktur) bagi seluruh jajaran pemerintah daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kini, perkembangan teknologi telah memungkinkan pengarsipan dokumen secara digital yang memiliki berbagai macam keunggulan. Data digital memungkinkan proses pembaharuan (*updating*) yang lebih cepat dan mudah.

25. Perpustakaan

Budaya membaca memberi andil yang besar dalam mencetak cendekia-cendekia handal yang mampu memberi kontribusi baik secara langsung maupun tak langsung di berbagai aspek dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, peran perpustakaan sebagai gudangnya buku-buku, tidak bisa dipandang sebelah mata. Perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat berbagai kalangan tanpa ada biaya, hendaknya ditunjang pula dengan pasokan buku-buku yang beragam dan bermanfaat serta fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai.

**Tabel 3.25 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Perpustakaan**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan perpustakaan masih belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan perpustakaan yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat. • Kelengkapan buku serta sarana dan prasarana pendukung perpustakaan.

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kabupaten Bangka Barat memiliki situs-situs sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang diarahkan untuk dijadikan sebagai objek wisata budaya. Tentunya, kunjungan ke objek wisata tersebut akan jauh lebih berkesan bila pengunjung juga memahami mengenai sejarah detail dari objek-objek yang dikunjungi, di samping unsur estetisnya. Oleh karena itu, penting pula perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat

dapat mengakomodasi kebutuhan ini dengan menyediakan buku-buku yang menerangkan berbagai tema sejarah terkait objek-objek wisata budaya di Kabupaten Bangka Barat.

3.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan merupakan sektor yang paling dirugikan oleh aktivitas pertambangan lepas pantai. Kegiatan tambang yang dilakukan oleh kapal hisap di pesisir Kabupaten Bangka Barat telah merusak ekosistem pantai dan merusak terumbu karang di laut. Tempat nelayan untuk menangkap ikan pun semakin berkurang dari waktu ke waktu karena lahan yang telah digunakan untuk aktivitas pasir hisap tidak bisa lagi digunakan untuk waktu yang lama. Akibat aktivitas ini, Kabupaten Bangka Barat menjadi daerah dengan produktivitas nelayan terkecil dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meski memiliki panjang pantai yang paling besar.

Tabel 3.26 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Bidang Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerusakan laut akibat kapal hisap di pesisir Kabupaten Bangka Barat • Potensi pariwisata pantai yang belum dimanfaatkan dengan baik • Semakin berkurangnya wilayah penangkapan ikan • Teknologi penangkapan ikan oleh nelayan masih terbatas • Semakin menurunnya produktivitas perikanan • Semakin berkurangnya warga Kabupaten Bangka Barat yang berprofesi sebagai nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi kelautan yang luas • Adanya potensi pariwisata pantai dan laut yang masih dapat dikembangkan • Latarbelakang maritim yang dimiliki oleh warga • Adanya rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular dan revitalisasi Pelabuhan Muntok

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Kerusakan alam akibat aktivitas tambang tidak hanya merusak produktivitas nelayan tapi juga mengganggu pariwisata laut dan pantai di Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah memiliki tantangan berat untuk memperbaiki kondisi lingkungan pantai sebelum bisa dimanfaatkan untuk pariwisata laut.

Upaya untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan perlu ditunjang oleh dukungan pemerintah di sektor ini. Upaya pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular dan revitalisasi Pelabuhan Muntok bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan sektor kelautan dan perikanan. Kabupaten Bangka Barat juga masih memiliki luas laut dan pantai yang belum termanfaatkan dengan baik. Latar belakang warga Kabupaten Bangka Barat di sektor maritim pada masa lampau seharusnya bisa mempercepat proses adaptasi masyarakat dalam mengelola potensi lautnya.

2. *Pertanian*

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terlemah dalam kontribusinya bagi Kabupaten Bangka Barat. Pertanian telah ditinggalkan oleh mayoritas penduduk Bangka Barat disebabkan karena rendahnya nilai ekonomis dari bertani. Warga lebih memilih sektor pertambangan yang dapat mendatangkan uang dalam tempo yang relatif singkat.

Tabel 3.27 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Pertanian

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk usaha pertanian di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh penduduk pendatang dari daerah lain • Sebagian besar warga enggan untuk bertani karena rendahnya nilai ekonomi pertanian • Konektivitas jalur distribusi produk yang tidak efisien karena harus melalui Kota Pangkal Pinang yang jaraknya relatif jauh • Kurangnya sumber daya manusia di sektor pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa produk pertanian bernilai ekonomis tinggi seperti lada, kelapa sawit, dan karet • Adanya rencana untuk revitalisasi lahan bekas tambang untuk kebutuhan pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Selain itu, konektivitas yang lemah juga menjadi penyebab mahalnya bahan baku. Biaya untuk mendatangkan bibit dari luar dan menjual hasil pertanian dari dalam keluar mengakibatkan rendahnya daya saing petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kehutanan

Kehutanan telah menjadi area konflik antara pemilik konsesi hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat serta dengan sektor pertambangan dan perkebunan. Dominasi kepemilikan lahan terbesar saat ini masih dimiliki oleh pertambangan dan perkebunan. Dan kecenderungan kedua sektor ini akan terus menggerus lahan yang tadinya diperuntukan bagi kehutanan.

Tabel 3.28 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Kehutanan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan pemberian izin untuk Hutan Tanaman Rakyat(HTR) dengan Hutan Tanaman Industri (HTI). • Belum lengkapnya data kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas hutan masih lebih dari 40% • Kementerian kehutanan lewat program KPHP memberikan anggaran sebesar 6 Miliar yang dapat dikelola oleh Dinas Kehutanan • HTR sudah di plot oleh kementerian kehutanan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hutan khususnya pohon karet. • Adanya rencana pengembangan wisata hutan

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal juga memicu hilangnya hutang-hutan konservasi serta hutan produksi yang dimiliki rakyat. Kepemilikan lahan sendiri masih terus simpang siur sebab lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Terlepas dari masalah yang dihadapi, sektor kehutanan masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Masih terdapat 40% lahan yang diperuntukan untuk sektor kehutanan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan juga telah

mengalokasikan 6 Miliar bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Bangka Barat untuk membenahi sektor perhutanan. Kementerian Kehutanan sendiri telah memplot area pemanfaatan hutan untuk HTR sehingga dapat menjamin lahan bagi HTR. Sektor kehutanan juga telah direncanakan oleh pemerintah kabupaten untuk pengembangan wisata hutan.

4. *Energi dan Sumber Daya Mineral*

Sumber Daya Mineral berupa tambang timah telah menjadi andalan Kabupaten Bangka Barat selama bertahun-tahun. Akan tetapi, dengan semakin terbukanya pemberian izin oleh pemerintah pusat, provinsi serta PT Timah, selaku pemiliki konsesi kepada pihak ketiga, aktivitas penambangan cenderung menjadi tidak teratur dan membabi buta. Hal ini mengakibatkan dampak lingkungan yang cukup parah di Kabupaten Bangka Barat. Rusaknya terumbu karang, bakau, hutan serta pencemaran air sungai yang berakibat pada penurunan kualitas air bersih menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh warga di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 3.29 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang ESDM

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan energi listrik hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan tidak mencukupi apabila ada permintaan energi listrik dalam jumlah besar seperti kebutuhan listrik untuk industri • Adanya pencemaran lingkungan terutama pencemaran air sungai akibat limbah pertambangan berdampak pada penurunan kualitas air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rencana pembangunan sumber pembangkit listrik, yaitu PLTU yang berkapasitas 30 MW di Air Anyir pada tahun 2015 dan PLTG di Tanjung Ular pada tahun 2018 • Rencana pembangunan <i>leading point</i> untuk membantu energi di Kabupaten Bangka Barat direncanakan pada 2017

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Sektor timah sebagai penyumbang perokonomian juga diprediksikan tidak akan bertahan lebih lama dari 50 tahun. Warga yang telah terbiasa mengeksploitasi bahan tambang ini harus mulai dibiasakan kembali mencari pencaharian di sektor yang lain. Ini tentu merupakan potensi konflik di masa mendatang jika tidak segera

direncanakan dan diatasi. Sektor tambang sendiri selama ini sering berkonflik dengan nelayan karena menggusur lahan untuk mencari ikan.

Agar dapat menjalankan roda perekonomian selain tambang, Kabupaten Bangka Barat membutuhkan suplai energi yang tidak sedikit. Sayangnya saat ini ketersediaan listrik di Kabupaten Bangka Barat masih terbatas. Dengan demikian, rencana pengembangan sektor industri, perdagangan dan wisata juga turut mengalami dampaknya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu mengupayakan serta menangkap peluang dari rencana pembangunan PLTU berkapasitas 30 MW di Tanah Anyir di tahun 2015 serta PLTG Tanjung Ular di 2018 sebagai awalan penyediaan energi yang mencukupi. Posisi Pulau Sumatera sendiri sebagai lumbung energi nasional dalam MP3EI juga perlu dimanfaatkan untuk tambahan suplai energi di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini telah didukung oleh PLN melalui rencananya mengkoneksikan jaringan listrik Sumatera dengan Kabupaten Bangka Barat.

5. Pariwisata

Permasalahan utama dalam pengembangan potensi pariwisata adalah keterbatasan lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menunjang sektor wisata. Keterbatasan lahan ini disebabkan karena mayoritas lahan sudah digunakan untuk pertambangan dan perkebunan besar. Dari hasil diskusi grup terfokus yang melibatkan SKPD terkait, diperoleh informasi bahwa perkebunan sawit dan karet serta pertambang telah menghabiskan sedikitnya 60% lahan di Kabupaten Bangka Barat.

Akibat lain dari pemanfaatan lahan untuk pertambangan adalah kerusakan alam dari hasil bekas tambang. Hal ini membuat wisata tidak dimungkinkan hingga reklamasi benar-benar telah selesai dilakukan. Meski Kabupaten Bangkan Barat memiliki pantai terpanjang, namun sebagian besar pantai dan terumbu karangnya telah rusak oleh aktivitas penambangan.

**Tabel 3.30 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan
Bidang Pariwisata**

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan parah di sekitar area tambang yang sulit dimanfaatkan sebagai objek wisata • Kurangnya keterampilan SDM di bidang pariwisata • Kapasitas listrik yang terbatas untuk menunjang hotel berbintang • Di beberapa tempat pembatasan budaya asing yang bertentangan dengan nilai daerah masih sangat tinggi • Akses terhadap transportasi udara masih belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peninggalan budaya sejarah nasional • Masih tingginya toleransi antar masyarakat • Adanya rencana koneksi listrik Sumsel-Pulau Bangka • Adanya rencana jalur perhubungan Tanjung Api-Api ke Tanjung Kelian

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Keterbatasan infrastruktur utama seperti listrik juga menjadi kendala, sebab membuat investasi di bidang hotel menjauh. Hitungan biaya operasional hotel menjadi lebih besar karena harus mengandalkan jenset. Pada sisi lain, SDM yang dapat dimanfaatkan sebagai pekerja sektor wisata juga masih terbatas. Jarak dari bandara yang cukup jauh juga membuat wisatawan lebih memilih untuk menginap di Kota Pangkal Pinang dari pada di Kabupaten Bangka Barat.

Agar dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata, Kabupaten Bangka Barat perlu memanfaatkan potensi wisata budaya dan sejarah sambil tetap memperbaiki kondisi lingkungan untuk menunjang wisata bahari. Kabupaten Bangka Barat memiliki Pesangrahan Menumbing, tempat pengasingan para *founding father* Republik Indonesia selama agresi militer Belanda yang dapat menjadi daya tarik wisata. Selain itu, perpaduan etnis tiong hoa dan melayu di Kabupaten Bangka Barat juga dapat dimunculkan melalui artefak-artefak budaya seperti bangunan bersejarah yang melambangkan keragaman budaya di Kabupaten Bangka Barat.

Untuk mendukung potensi wisatanya, Kabupaten Bangka Barat perlu mendukung penambahan pembangkit listrik di Muntok yang telah direncanakan PT PLN, serta rencana menghubungkan jaringan listrik antara Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka. Dari sisi konektivitas, rencana pemerintah provinsi untuk membuka jalur laut antara Tanjung Api-Api dengan Tanjung Kelian juga perlu didukung. Tanjung

Api-Api sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi di Pulau Sumatera. Pesona wisata Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu menarik limpahan wisatawan dari pusat ekonomi ini.

6. *Industri*

Ketersediaan listrik saat ini masih menjadi kendala utama bagi pengembangan industri di Kabupaten Bangka Barat. Kapasitas yang masih terbatas ini membuat pembangunan pabrik menjadi sulit, sebab masing-masing industri terpaksa menyediakan sumber listrik cadangan yang cukup besar.

Tabel 3.31 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Industri

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kapasitas energi terhadap pengembangan industri masih rendah • Ketiadaan pergudangan yang memadai • Ketersediaan lahan pengembangan industri yang terbatas • Kurangnya keterampilan SDM di bidang industri • SDM pemerintah belum siap menyambut tingginya potensi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya keberadaan bahan baku berupa timah, karet, dan sawit. • Adanya rencana pengembangan kawasan industri terpadu Tanjung Ular • Adanya rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap • Adanya rencana penyambungan koneksi listrik Sumatera Selatan – Pulau Bangka

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Selain listrik, permasalahan lain yang menghambat pengembangan industri di Kabupaten Bangka Barat adalah ketersediaan lahan yang sebagian besar telah dialokasikan untuk pertambangan dan perkebunan. Selain itu, ketersediaan pergudangan yang memadai serta Sumber Daya Manusia. Khusus untuk SDM, saat ini Kabupaten Bangka Barat belum menyediakan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga terampil secara memadai, selain itu masyarakat di Kabupaten Bangka Barat lebih menikmati pekerjaan di pertambangan rakyat karena memberi penghasilan yang besar dalam tempo cepat.

Masalah bahan baku juga cukup krusial sebab mendatangkan bahan baku dari luar pulau masih memakan biaya yang cukup besar. Agar dapat bersaing, Bangka Barat harus mampu mengoptimalkan bahan baku yang tersedia di Bangka Barat sendiri, yakni hasil tambang, sawit, karet dan pala. Oleh sebab itu, industri yang

dikembangkan sebisa mungkin merupakan industri pemberi nilai tambah bagi komoditas yang selama ini dihasilkan oleh Kabupaten Bangka Barat.

Kunci Kabupaten Bangka Barat untuk mengembangkan industrinya terletak pada rencana penambahan pembangkit listrik di Muntok serta penambahan listrik melalui koneksi listrik Sumatera-Pulau Bangka. Selain itu, Kabupaten Bangka Barat perlu segera merealisasikan adanya kawasan industri terpadu yang telah direncanakan di Tanjung Ular. Kawasan ini dapat memudahkan investasi yang hendak masuk karena adanya infrastruktur pendukung yang lengkap.

7. *Perdagangan*

Perdagangan merupakan sektor yang belum berkembang meskipun Kabupaten Bangka Barat memiliki dua pelabuhan, Muntok dan Tanjung Kelian. Fenomena ini terjadi karena kurangnya dukungan infrastruktur di perdagangan berupa sarana pergudangan yang lengkap. Barang yang masuk melalui pelabuhan di Kabupaten Bangka Barat selama ini baru bisa ditangkap oleh Kota Pangkal Pinang karena sudah mendukung untuk perdagangan grosir.

Tabel 3.32 Permasalahan dan Faktor Pendukung Keberhasilan Pembangunan Bidang Perdagangan

Permasalahan Pembangunan	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan
<ul style="list-style-type: none"> • Ketiadaan pergudangan yang memadai • Ketiadaan <i>cold storage</i>/pabrik es dalam mendukung pengembangan perikanan • Kapasitas pelabuhan masih terbatas • Belum adanya perdagangan grosir di Bangka Barat • Inflasi yang dipengaruhi iklim laut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dua pelabuhan, Muntok dan Tanjung Kelian di Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur transportasi • Adanya rencana pengembangan Tanjung Ular sebagai pusat kawasan industri

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Untuk bisa mengembangkan pusat grosir sendiri agar dapat mendorong perdagangan, maka Bangka Barat perlu memperbaiki pergudangan. Salah satu yang menghambat adanya pergudangan besar kembali pada masalah lahan dan listrik. Listrik juga menjadi kunci bagi Bangka Barat untuk mengembangkan *cold storage*. *Cold storage* ini bisa membuka peluang perdagangan komoditas segar seperti ikan, sayur mayur, bahan pangan yang lebih besar lagi.

Berdasarkan penjabaran permasalahan pembangunan dan juga faktor-faktor pendukung keberhasilan pembangunan dari bidang fokus urusan pilihan, terdapat beberapa masalah penting yang disoroti, yang dimungkinkan akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunan. Bidang-bidang yang menjadi fokus urusan pilihan pemerintah mencakup bidang (1) kelautan dan perikanan, (2) pertanian, (3) kehutanan, (4) energi dan sumber daya mineral, (5) pariwisata, (6) industri, dan (7) perdagangan. Permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Bangka Barat disajikan dalam tabel berikut ini.

3.2 Isu Strategis

3.2.1 Penelaahan Isu-isu Strategis Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.33 Isu Strategis Internasional, Nasional, dan Provinsi

No.	Isu Strategis		
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Kebijakan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1	Pada akhir tahun 2015, dunia akan bersama-sama menilai ketercapaian MDGs sebagai salah satu indikator pencapaian pembangunan	Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam	Rencana 2018 akan ada pembangunan PLTG di Tj. Ular.
2	Pasca MDGs akan disusun kembali Post-2015 Development Agenda, Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu turut mengambil bagian dalam mengadaptasi perubahan ini	Pemenuhan pasokan energi listrik	Arahan Kabupaten Bangka Barat untuk memanfaatkan potensi wisata alamnya secara optimal.
3	Pada awal tahun 2015 akan digulirkan ASEAN Economic Community (AEC) yang memberikan kesempatan bagi pasar barang, jasa, dan tenaga kerja untuk bebas beredar di seluruh negara ASEAN	Pengembangan pariwisata berbasis keindahan alam bahari	Salah satu potensi terbesar pasca timah Kabupaten Bangka Barat adalah sektor perikanan dengan garis pantai yang terpanjang dibanding kabupaten lain.
4	Dengan keberadaan AEC, maka dituntut adanya transformasi birokrasi dan iklim usaha. Perlu modernisasi dan transparansi dalam pengelolannya	Pengembangan pariwisata berbasis budaya	Terkait dengan dukungan pihak provinsi dalam pembangunan kabupaten bangka barat berupa Rencana pembangunan infrastruktur di kawasan wisata menumbing, tanjung kalian dan wisma ranggam di tahun 2015.
5	Konektivitas produk antara lokasi semakin kental, masyarakat ekonomi dunia mengenal pendekatan <i>Global Value Chain</i> yang memberikan antara lokasi/regional menghubungkan proses produksi produk hingga ke konsumen akhir	Pengolahan bahan tambang tidak terbarukan, tidak dijual langsung	Masalah perizinan pertambangan masih simpang siur.

No.	Isu Strategis		
	Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Kebijakan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	Pasca RIO 20+, publik dunia semakin peka dan responsif terhadap lingkungan, terutama dalam hal isu dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan	Pengalihan hasil tambang tidak terbarukan dengan sumber ekonomi berkelanjutan	Pengembangan Tanjung Ular yaitu provinsi dan kementerian perhubungan laut.
7	Isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi jargon tersendiri dan kuat bagi masyarakat internasional.	Modernisasi, efisiensi, dan nilai tambah sektor pertanian	Tingginya biaya transportasi untuk pemasaran yang menyebabkan nilai jual produk menjadi tinggi sehingga daya saing produk menjadi kurang.
8	Pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang bersifat partisipatif dan mampu mengelola potensi lokal dengan tepat. Pembangunan bersifat <i>bottom-up</i> .	Pengembangan infrastruktur untuk menciptakan keterkaitan	Tingginya inflasi di Bangka Belitung disebabkan oleh banyaknya barang yang didatangkan dari luar.
9		Implementasi UU Desa dimulai tahun 2015	

Sumber: Hasil Analisis, 2014

1. Isu Strategis Internasional

A. Millenium Development Goals (2015) dan Post-2015 Development Agenda

MDGs akan segera menemui tenggat waktunya di tahun 2015, artinya, Kabupaten Bangka Barat perlu memulai untuk menghitung pencapaian MDGs yang telah mampu di capai oleh Kabupaten Bangka Barat. Dunia saat ini mendorong untuk merampungkan Post-2015 Development Agenda yang mengedepankan keberlanjutan/*sustainability* dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan. Keberlanjutan ini akan menjadi terminologi yang menantang bagi Kabupaten Bangka Barat, karena kita masih melihat masih banyak kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas ekonomi yang berlangsung. Rendahnya kualitas SDM dan infrastruktur pendidikan juga akan menjadi catatan tersendiri bagi Kabupaten Bangka Barat. Kini dunia internasional akan semakin sensitif terhadap pembangunan ekonomi yang mengorbankan kualitas keseimbangan ekosistem alam dan lingkungan.

Dalam dokumen pendahuluan Post-2015 Development Agenda, terdapat beberapa isu sentral yang menjadi pembahasan dan perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat kedepan:

- Keberlanjutan Pembangunan
- Pendidikan dan Tenaga Kerja Terampil
- Ketahanan Pangan dan Malnutrisi
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Kesehatan dan Kematian Ibu dan Bayi
- Ketimpangan Pembangunan
- Pembangunan Inklusif
- Migrasi dan Perpindahan Manusia
- Keamanan dan Ketertiban Umum
- Dinamika Kependudukan / demografi

B. ASEAN Economic Community

ASEAN Economic Community (AEC) memberikan kesempatan konektivitas dan pasar bebas bagi seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. Secara efektif, AEC akan dimulai pada bulan Desember 2015; perubahan kesepakatan perdagangan antara negara ASEAN ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu ancaman dan peluang.

Ancaman dalam artian, bila Kabupaten Bangka Barat tidak menyiapkan diri (kualitas SDM, jalur distribusi logistik, dan kekuatan pelabuhan); maka bukan tidak mungkin, Kabupaten Bangka Barat hanya akan berperan sebagai penonton dalam arus perdagangan skala regional ini. Lebih lanjut, perubahan ini juga memungkinkan perusahaan asing untuk melakukan investasi langsung ke daerah (*Foreign Direct Investment*) terhadap sektor-sektor strategis di Kabupaten Bangka Barat seperti Timah, Kelapa Sawit, Karet, dan Lada Putih.

Peluang dalam artian, bila Kabupaten Bangka Barat menyiapkan dengan baik diri (kualitas SDM, perusahaan daerah, jalur distribusi logistik, dan kekuatan pelabuhan), maka sangat mungkin Kabupaten Bangka Barat menjadi pemain penting. Kabupaten Bangka Barat dapat mengambil peran sebagai *hub* perdagangan laut dengan mengekstensi daya jangkau pelabuhannya; apakah dengan meningkatkan skala pelabuhan atau dengan membuat *floating dock* di perairan jauh sehingga Kapal Besar bisa melakukan *loading/unloading* barang di lokasi tersebut. Selain itu, Kabupaten Bangka Barat kiranya perlu memperkuat BUMD nya agar memiliki kemampuan pengelolaan sektor-sektor strategis. Sehingga, para investor asing yang akan masuk ke Kabupaten Bangka Barat dapat melalui BUMD yang ada.

AEC akan mendorong pasar bebas, baik barang maupun manusia. Selain itu, AEC juga diharapkan mampu mendorong transparansi keuangan dengan memanfaatkan instrument *e-commerce* dan *e-procurement*. Penerbangan udara dan laut pun sangat memungkinkan semakin terbuka.

2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan penelaahan dokumen RPJP Nasional dan MP3EI serta hasil diskusi terfokus, ditemukanlah isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Kabupaten Bangka Barat dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat. Adapun isu strategis tersebut antara lain :

a. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya.

Peningkatan nilai tambah menjadi isu utama yang diangkat dalam kebijakan pembangunan nasional. Telah sekian lama, Indonesia hanya sanggup menjadi penyuplai bahan mentah yang diekspor langsung ke luar negeri. Untuk mendorong pengolahan bahan mentah di tanah air, pemerintah pusat telah mengupayakan beberapa hal, mulai dari pelarangan ekspor langsung bahan tambang hingga insentif bagi industri hilir. Bangka Barat memiliki potensi Kelapa Sawit dan Karet yang perlu dioptimalkan pengolahannya sebelum dikirim ke luar.

b. Pemenuhan pasokan energi listrik

Salah satu problem utama yang muncul dalam diskusi grup terfokus di Kabupaten Bangka Barat adalah kurangnya suplai listrik yang cukup untuk menggerakkan industri pengolahan maupun pariwisata. Isu pasokan energi juga telah masuk dalam kebijakan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri di Indonesia. Kawasan Sumatera sendiri telah diarahkan sebagai lumbung energi nasional, dengan memanfaatkan pasokan besar batubara yang banyak tersedia di Sumatera sebagai bahan bakar. Kabupaten Bangka Barat membutuhkan tambahan pembangkit listrik baru dalam jaringan Bangka-Belitung serta koneksi listrik melalui laut dengan Sumatera.

c. Pengembangan pariwisata berbasis keindahan alam bahari.

Pemerintah pusat menyadari potensi Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Oleh sebab itu, perlu ada upaya untuk mengoptimalkan arus wisatawan yang berbasis alam bahari. Akan tetapi, kerusakan alam yang disebabkan penambangan lepas pantai di Kabupaten

Bangka Barat turut merusak keindahan alam bahari yang seharusnya bisa dijual sebagai objek wisata. Oleh sebab itu, permasalahan konervasi alam bahari harus lebih dulu diupayakn untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari Kabupaten Bangka Barat.

d. Pengembangan pariwisata berbasis budaya bangsa.

Keanekaragaman budaya Indonesia menjadi daya tarik wisata tersendiri. Hal ini disadari sebagai potensi wisata yang tak ternilai harganya. Dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025, salah satu poin pengembangan wisata selain berbasis keindahan alam adalah budaya bangsa. Kabupaten Bangka Barat sendiri memiliki kekayaan budaya yang berasal dari akulturasi budaya Melayu dan Tionghoa yang cukup kental. Hal ini telah berkembang sejak lama dan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu, posisi Kabupaten Bangka Barat juga sangat istimewa karena memiliki sejarah penting dalam pendirian negara kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bangka Barat menjadi tempat pengasingan para *founding father* selama agresi militer belanda kedua.

e. Pengolahan bahan tambang tak terbarukan

Kebijakan nasional terhadap bahan tambang secara umum adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini ditegaskan dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 serta adanya pelarangan ekspor bahan baku secara langsung melalui Undang Undang Minerba. Hal ini dapat dimanfaatkan Kabupaten Bangka Barat untuk menyediakan industri hilir bagi pengolahan timah yang selama ini menjadi andalan. Dengan demikian, timah dapat menghasilkan nilai tambah yang dapat dinikmati Kabupaten Bangka Barat.

f. Pengalihan hasil tambang dengan sumber ekonomi berkelanjutan

Dalam RPJP Nasional, pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada ekonomi berkelanjutan. Keterbatasan sektor tambang tidak terbarukan mulai diantisipasi dengan melakukan investasi di sektor berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga perlu mulai mengarahkan investasi ke sektor-sektor terbarukan. Tentu hal ini tidak akan berjalan mudah, sebab warga telah demikian bergantung dengan timah.

g. Modernisasi, efisiensi dan nilai tambah sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang semakin tergerus oleh sektor industri dan pertambangan. Padahal sektor ini sangat penting untuk menunjang ketahanan pangan. Agar meningkatkan sektor ini supaya tidak terus digerus, perlu ada upaya modernisasi, efisiensi sektor ini. Dengan demikian, pekerja sektor ini dapat memiliki nilai tambah dari produk pertanian. Kabupaten Bangka Barat dalam sektor ini terus tertinggal, sebab budaya menambang sangat kental dan menghasilkan uang dalam waktu singkat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi Kabupaten Bangka Barat.

h. Pengembangan infrastruktur untuk menciptakan keterkaitan

Infrastruktur merupakan salah satu kendala yang selama ini menghambat daya saing produk Kabupaten Bangka Barat. Hal ini juga ditemukan di berbagai daerah lain dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Perbaikan infrastruktur secara nasional diarahkan untuk peningkatan daya saing dan memperkuat keterkaitan antar sektor. Wilayah Sumatera sendiri diunggulkan sebagai lumbung energi nasional dan sentra produksi hasil bumi. Hasil bumi yang diunggulkan meliputi : kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan dan besi baja. Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi kelapa sawit dan karet, yang dapat dikembangkan lebih jauh dengan memperbaiki infrastruktur.

i. Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimulai tahun 2015

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang telah di sahkan memberikan kesempatan bagi desa untuk bisa merencanakan, mengusulkan, memutuskan, menjalankan, dan mengendalikan pembangunannya secara mandiri. Desa, akan didukung dengan suntikan dana yang diperkirakan mencapai 1 Milyar Rupiah setiap tahunnya. Kesempatan ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mendorong pembangunan inklusif di perdesaan.

j. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur paradigma baru tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa hal perubahan signifikan terjadi pada kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Terkait dengan implementasi Undang-Undang tersebut, Pemkab. Bangka Barat perlu memperhatikan fokus urusan yang secara kewenangan sudah beralih ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tersebut agar secara berkelanjutan memiliki arah dan tujuan selaras dengan kondisi yang diharapkan di Kabupaten Bangka Barat antara lain:

1. Penambahan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemkab. Bangka Barat perlu untuk mendorong penambahan sekolah kejuruan, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pihak yang berwenang menyelenggarakan pengelolaan sekolah menengah serta juga berkoordinasi dengan Pemerintah pusat terkait pembentukan akademi/ perguruan tinggi di Bangka Barat, sebagai upaya mengakomodir peserta didik yang ingin segera masuk ke dunia kerja sehingga penduduk Bangka Barat memiliki daya saing yang cukup untuk menghadapi persaingan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Senada dengan kewenangan pemerintah provinsi di urusan pengelolaan sekolah menengah, Pemkab. Bangka Barat juga perlu mendorong pemenuhan angka partisipasi murni (APM) untuk SMU sebagai bagian sasaran terwujudnya kualitas masyarakat yang cerdas dengan rencana capaian indikator 60% di akhir tahun 2025, dan selaras dengan harapan Bangka Barat untuk merealisasikan angka rata-rata lama sekolah 10 tahun dapat tercapai.
2. Moratorium pembukaan tambang baru. Pemkab. Bangka Barat perlu mendorong moratorium pembukaan tambang baru sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan di wilayah Bangka Barat dengan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat terkait dengan pemberian izin aktivitas penambangan timah serta penambangan lainnya.
3. Penambahan daya listrik untuk mendukung investasi ekonomi dari kondisi saat ini (21 MW) menjadi minimal 150 MW. Sesuai dengan paparan pihak PLN

pada saat konsultasi publik, PLN merencanakan penambahan listrik menjadi 150 MW sebagai dukungan investasi di wilayah Bangka Belitung khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Rencana tersebut perlu didukung dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan banyak pihak, agar sumberdaya energi tersebut dapat menjadi jaminan ketersediaan infrastruktur investasi ekonomi di Bangka Barat.

4. Selain angka 1 sampai dengan angka 3 diatas, pengalihan kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah kabupaten/kota dan beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, antara lain kehutanan dan pengawasan ketenagakerjaan, tetap perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi yang erat dengan pihak pemerintah provinsi sehingga pengelolaan urusan kehutanan dan pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Barat dapat terlaksana sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

3. *Isu Strategis Provinsi*

Terdapat beberapa isu-isu strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai memberikan pengaruh bagi pembangunan Kabupaten Bangka Barat kedepan. Isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rencana 2018 akan ada pembangunan PLTG di Tj. Ular. Selain itu, Karena Sumsel surplus maka nanti akan dibangun leading point untuk membantu energi di Babar direncanakan pada 2017
- b. Arahkan Kabupaten Bangka Barat untuk memanfaatkan potensinya secara optimal.
- c. Dari pihak perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa salah satu potensi terbesar pasca timah Kabupaten Bangka Barat adalah sektor perikanan dengan garis pantai yang terpanjang dibanding kabupaten lain. Namun, data produksi perikanan Bangka Barat paling kecil (data BPS), sekitar 6% di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (zona laut bangka barat 0-4 mil).
- d. Terkait dengan dukungan pihak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat berupa Rencana pembangunan

infrastruktur di kawasan wisata menumbing, tanjung kalian dan wisma ranggam di tahun 2015.

- e. Masalah perizinan pertambangan masih simpang siur. Dari 12 perusahaan tambang kapal isap, hanya 1 perusahaan yang memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, 11 izin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Pengembangan Tanjung Ular direncanakan akan dilaksanakan oleh pihak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- g. Terkait dengan harga, jika kita membuat suatu produk maka jika dibawa keluar harga menjadi tinggi dikarenakan tenaga kerja yang mahal.
- h. Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tinggi hal ini dikarenakan banyaknya barang yang didatangkan dari luar.

3.2.2 Penelaahan RPJP Nasional dan MP3EI

Kebijakan nasional sebagai bahan referensi pembuatan RPJPD Kabupaten Bangka Barat terangkum dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025 serta dokumen *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dari kedua dokumen tersebut, paling tidak terdapat kata kunci yang bisa diperhatikan oleh Kabupaten Bangka Barat, yakni : industri hilir, konektivitas, pasokan energi dan pariwisata. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut kebijakan nasional yang dapat dikaitkan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 3.34 Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Dokumen Kebijakan Nasional	
	RPJPN	MP3EI
1	Perekonomian dikembangkan berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar	Koridor Ekonomi Sumatera mempunyai tema “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”,
2	Pengembangan industri yang mengolah secara efisien dan rasional sumber daya alam, dengan memperhatikan daya dukungnya	secara geostrategic diharapkan menjadi “Gerbang Ekonomi Nasional ke Pasar Eropa, Afrika, Asia Selatan, Asia Timur dan Australia”

No.	Dokumen Kebijakan Nasional	
	RPJPN	MP3EI
3	Pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika globalisasi	Di dalam strategi pembangunan ekonominya, Koridor Sumatera berfokus pada enam kegiatan ekonomi utama, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan dan Besi Baja.
4	Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur keterkaitan antar-industri ke depan	Peningkatan kepastian tata ruang untuk pengembangan kegiatan hulu kepala sawit serta perbaikan regulasi, insentif, serta disinsentif untuk pengembangan pasar hilir industri kelapa sawit
5	Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas dikelola dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan	Melakukan peninjauan kebijakan pemerintah tentang jenis bahan olah dan produk yang tidak boleh diekspor
6	Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional nasional sebagai wilayah bahari terluas di dunia serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa	Meningkatkan produktivitas hulu perkebunan karet rakyat dengan melakukan penanaman kembali tanam karet rakyat secara besar-besaran dan bertahap
7	Pengembangan UKM menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan agroindustri, khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM	Membentuk badan karet yang dapat berguna sebagai pusat riset dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk bahanolah karet sehingga terjadi efisiensi pengolahan karet selanjutnya dari pedagang dan perantara
8	Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain, khususnya pelabuhan, lapangan terbang, kereta api, dan jalan raya dalam sistem jaringan inter dan antar-moda, baik antarnegara tetangga maupun dalam dan antar-wilayah NKRI dengan tingkat keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar internasional	Menyusun strategi hilirisasi industri karet, dengan memperhatikan insentif disinsentif, domestic market obligation (DMO), jenis industri dan ketersediaan bahan baku dan bahan bantu yang dapat memperkuat daya saing di industri hilir karet
9	Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi	Menyediakan kemudahan bagi investor untuk melakukan investasi di sektor industri hilir karet.

No.	Dokumen Kebijakan Nasional	
	RPJPN	MP3EI
	perdesaan dapat terpenuhi	
10	Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas	Pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mendukung industri karet, baik hulu maupun hilir
11	Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik nasional dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan nasional yang memadai melalui rehabilitasi dan <i>repowering</i> pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru terutama pembangkit listrik non BBM	Penambahan kapasitas listrik yang saat ini dirasakan kurang memadai untuk mendukung industri karet di Sumatera.
12	Diversifikasi energi untuk pembangkit listrik; terutama panas bumi, hidro, gas dan batu bara, juga mulai dapat diterapkannya pembangkit listrik tenaga surya dan nuklir dalam skala besar	Pengembangan jaringan logistic darat antara lokasi perkebunan, sentra pengolahan dan akses ke pelabuhan.
13	Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan	
14	pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi	Pengaturan kebijakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk tenaga listrik di Sumatera.
15	Pengembangan kapasitas pemerintah daerah terus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; penguatan lembaga legislatif.	Meningkatkan jumlah dan kemampuan industri galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal ;
16	Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	Memprioritaskan pembuatan dan perbaikan di dalam negeri untuk

No.	Dokumen Kebijakan Nasional	
	RPJPN	MP3EI
	diarahkan untuk diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang	kapal sampai dengan kapasitas 50.000 SWT
17	Sumber daya alam yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi dikelola secara berkelanjutan dengan tidak mengkonsumsi langsung, melainkan memperlakukannya sebagai input untuk proses produksi berikutnya yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal	Pengembangan Kawasan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Pulau Sumatera
18	Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif khususnya dalam upaya untuk menghasilkan inovasi dan kreativitas pengelolaan sumber daya alam bagi keberlanjutan ekonomi nasional, dan untuk upaya rehabilitasi, penyelamatan dan konservasi kawasan tertentu, serta untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber energi alternati	
19	Mengingat cakupan dan prospek sumber daya kelautan yang sangat luas, maka arah pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan multisektor agar dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan keberlanjutan sumber daya tersebut tetap terjaga kelestariannya	
20	Pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan sehingga pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan dapat dikendalikan, serta diarahkan pula pada pengembangan ekonomi yang lebih memanfaatkan jasa lingkungan	
21	Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan	

Sumber: Hasil Analisis, 2014

3.2.3 Penelaahan RPJP Daerah Lain

Tabel 3.35 Telaah Kebijakan RPJP Daerah Lain

No.	Isu Strategis		
	RPJP Daerah	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
1	Kabupaten Bangka	Tahun 2005-2025	Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB
			Pengembangan industri dengan konsep pengembangan klaster
			Rencana dibukanya pelabuhan di daerah Belinyu
			Pengembangan Koperasi dan UKM yang berbasis penguasaan teknologi sehingga memiliki daya saing tinggi.
			Penanaman modal yang diarahkan untuk mengoptimalkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut.
			Sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi komoditas karet, kelapa sawit, dan lada.
			Sektor Perdagangan diarahkan pada upaya-upaya untuk memperlancar arus masuk produk-produk dan jasa ke Kabupaten Bangka maupun keluar dari Kabupaten Bangka. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembukaan dan memperluas jalur-jalur lokal, nasional, dan internasional dan pembukaan akses-akses perdagangan yang dititikberatkan pada pelabuhan-pelabuhan
			Arah pengembangan Kota Belinyu sebagai pusat wilayah pengembangan di Kabupaten Bangka
2.	Kabupaten Banyuasin	Tahun 2006-2025	Sumber daya wisata Calon Taman Nasional (CTN) Sembilang.
			Rencana pembangunan pelabuhan Samudera Tanjung Api-api
			Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pembangunan

No.	Isu Strategis		
	RPJP Daerah	Periode RPJPD	Kebijakan Terkait
3.	Kota Palembang	Tahun 2005-2025	Peran Kota Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mengutamakan pengembangan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa serta industri
			Keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi yaitu wilayah Musi Rawas dan Lubuk Linggau
			Rencana peningkatan hubungan eksternal Kota Palembang dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera Selatan
			Rencana pembagian wilayah pembangunan Pusat Kota yang berperan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Palembang skala regional, nasional, bahkan internasional serta pusat kegiatan sosial budaya serta pariwisata
			Rencana pembagian wilayah pembangunan Kertapati yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan wilayah Kota Palembang dengan wilayah lain di sekitarnya, mengingat keberadaan terminal "Multimoda Kertapati" serta kegiatan perdagangan regional
4.	Provinsi Sumatera Selatan	Tahun 2005-2025	Rencana pengembangan pusat pertumbuhan wilayah Metropolitan Palembang (Palembang-Betung-Indralaya atau Patungraya) yang merupakan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai pusat pertumbuhan utama di Provinsi Sumatera Selatan
			Rencana pengembangan kawasan kerja sama regional BELAJASUMBA (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung) dengan memantapkan pusat pengembangan regional Metropolitan Palembang yang didukung oleh sistem transportasi regional serta infrastruktur wilayah (prasarana energi dan telekomunikasi)
			Prioritas pengembangan perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jaringan rel Palembang – Tanjung Api-api

Sumber: Hasil Analisis, 2014

3.2.4 Isu-isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

Isu Strategis Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2010-2015

1. Kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan masih kurang dari 60% terhadap total kapasitas keuangan daerah. Adanya kecenderungan penurunan sumbangan PAD terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat.
2. Masih terbatasnya kualitas pelayanan pendidikan jenjang menengah pertama dan jenjang menengah atas jika dibandingkan dengan target SPM pada 2014.
3. Masih terbatasnya kualitas pelayanan dasar kesehatan jika dibandingkan dengan target SPM.
4. Kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.
5. Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan wilayah yang disebabkan oleh ketersediaan energi listrik.
6. Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan wilayah yang disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah dalam penyiapan lahan dan kebijakan yang masih berbelit-belit.
7. Belum optimalnya peran dan daya saing koperasi dan UKM dalam perekonomian.
8. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang RTRW yang menjadi acuan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Masih lemahnya kesadaran pihak swasta khususnya perkebunan besar dalam menerapkan perkebunan plasma.
10. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi, dan informasi dalam menunjang pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan serta membangun jaringan ekonomi lintas kabupaten dan antar provinsi.
11. Masih terbatasnya kualitas pelayanan air bersih, listrik, dan sanitasi jika dibandingkan dengan target nasional 2014.

Isu Strategis Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014-2034

1. Peningkatan dan melengkapi sarana dan prasarana pada pusat-pusat pelayanan yang meliputi PKW Muntok, PKL Kelapa, PKL Parittiga.

2. Peningkatan dan pengembangan Jalan Khusus Wisata yang meliputi 8 ruas, diantaranya Ruas jalan Jebus-Sungai Buluh- Unar-Bembang, Ruas jalan Mayang-Rambat, Ruas jalan Parittiga-Penganak, Dusun Sika – Tanjung Persang, Ruas Jalan Parittiga-Siangau, Ruas Jalan Tungau, dan Ruas Jalan Mentok Asin-Batu Rakit.
3. Pembangunan ruas jalan lingkar Kecamatan Muntok (Tanjung Kalian-Kadur).
4. Pembangunan Jaringan Jalan Lingkar Utara di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Bangka Barat.
5. Pembangunan dan pengembangan terminal angkutan penumpang tipe B di Muntok.
6. Peningkatan pelabuhan penyeberangan antar wilayah (Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kelian).
7. Pembangunan PLTU dan PLTD di Kecamatan Muntok.
8. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung.
9. Pembangunan Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Strategis Provinsi : KIPT (Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu) Tanjung Ular.

Tabel 3.36 Sinkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Regional, dan Kabupaten Bangka Barat

No.	Subsektor	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
1	Daya Saing				
1.1	Dinamika Ekonomi	Pada awal tahun 2015 akan digulirkan ASEAN Economic Community (AEC) yang memberikan kesempatan bagi pasar barang, jasa, dan tenaga kerja untuk bebas beredar	Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam dan Modernisasi, efisiensi, dan nilai tambah sektor pertanian	Tingginya inflasi di Bangka Belitung disebabkan oleh banyaknya barang yang didatangkan dari luar.	Belum optimalnya peran dan daya saing koperasi dan UKM dalam perekonomian.
		Konektivitas produk antara lokasi semakin kental, masyarakat ekonomi dunia mengenal pendekatan <i>Global Value Chain</i>	Pengembangan pariwisata berbasis budaya		pariwisata berbasis budaya dan sejarah
			Pengolahan bahan tambang tidak terbarukan, tidak dijual langsung dan Pengalihan hasil tambang tidak terbarukan dengan sumber ekonomi berkelanjutan		Ketergantungan pada sektor ekonomi tambang (timah)
1.2	Sumber Daya Alam	Kampanye pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan	Pengembangan pariwisata berbasis keindahan alam bahari	Arahan Kabupaten Bangka Barat untuk memanfaatkan potensi wisata alamnya secara optimal.	Potensi sumber daya alam seperti pertanian (karet, kelapa sawit, dan lada putih), perikanan dan maritim.
				Salah satu potensi terbesar pasca timah Kabupaten Bangka Barat adalah sektor perikanan dengan garis pantai yang terpanjang dibanding kabupaten lain.	Kerusakan potensi perikanan dan maritim dikarenakan pengolahan Timah
1.3	Tenaga Kerja	Standarisasi ketenagakerjaan di tingkat ASEAN	Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan dari tenaga kerja		Tingginya upah tenaga kerja lokal Kabupaten Bangka Barat.
1.4	Pengembangan Perdesaan	Pembangunan inklusif, yaitu pembangunan yang bersifat partisipatif dan mampu mengelola potensi lokal dengan tepat. Pembangunan bersifat <i>bottom-up</i> .	Implementasi UU Desa dimulai tahun 2015	UU Pemda yang baru disahkan memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengalokasikan 5% dari APBD nya untuk keperluan pengembangan Kelurahan	Program Desa Mandiri yang telah dapat menjadi program unggulan jangka panjang
2	Kesejahteraan Masyarakat				

No.	Subsektor	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
2.1	Pendidikan	Pemberantasan Buta Huruf dan Kesetaraan Gender dalam Akses Menempuh Pendidikan	Wajib Belajar 12 Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf		Masih terbatasnya kualitas pelayanan pendidikan jenjang menengah pertama dan jenjang menengah atas jika dibandingkan dengan target SPM pada 2014.
2.2	Kesehatan	Pengurangan angka kematian Ibu dan Bayi	Mendorong Puskesmas sebagai garda terdepan kesehatan rakyat		Terbatasnya kualitas sarana-prasarana dan akses kesehatan
		Pemberantasan HIV/AIDS dan Penyakit-penyakit menular	Pengurangan angka kematian Ibu dan Bayi		Minimnya kesadaran keluarga untuk memberikan perhatian bagi Bayi
2.3	Kesejahteraan	Pada akhir tahun 2015, dunia akan bersama-sama menilai ketercapaian MDGs sebagai salah satu indikator pencapaian pembangunan	Meningkatkan standard ekonomi masyarakat Indonesia	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung dengan tanpa tergantung hanya pada pertambangan (timah)	Mempersiapkan sumber kehidupan alternatif bagi rakyat selain pertambangan (timah)
		Pasca MDGs akan disusun kembali Post-2015 Development Agenda, Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari masyarakat internasional perlu turut mengambil bagian dalam mengadaptasi perubahan ini	Mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan		
3	Pelayanan Umum				
3.1	Pemerintah	Dengan keberadaan AEC, maka dituntut adanya transformasi birokrasi dan iklim usaha. Perlu modernisasi dan transparansi dalam pengelolannya	Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD	Masalah perizinan pertambangan masih simpang siur.	Kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan masih kurang dari 60% terhadap total kapasitas keuangan daerah. Adanya kecenderungan penurunan sumbangan PAD terhadap APBD.
			Desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin berkembang	Peran Provinsi semakin berkurang dan memberikan kekuasaan lebih besar kepada Kabupaten/Kota	Kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal yang menyebabkan Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan
3.2	Infrastruktur	Peluang Investasi Asing melalui skema Public Private Partnership	Pengembangan infrastruktur untuk menciptakan keterkaitan antar daerah di Indonesia	Terkait dengan dukungan pihak provinsi dalam pembangua kabupaten bangka barat berupa Rencana pembangunan infrastruktur di kawasan wisata	Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi, dan informasi dalam menunjang pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, dan

No.	Subsektor	Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten
				menumbing, tanjung kalian dan wisma ranggam di tahun 2015.	perdagangan serta membangun jaringan ekonomi lintas kabupaten dan antarprovinsi.
			Program MP3EI	Pengembangan Tanjung Ular yaitu provinsi dan kementerian perhubungan laut.	Masih terbatasnya kualitas pelayanan air bersih, listrik, dan sanitasi jika dibandingkan dengan target nasional 2014.
			Pengembangan Poros Maritim	Tingginya biaya transportasi untuk pemasaran yang menyebabkan nilai jual produk menjadi tinggi sehingga daya saing produk menjadi kurang.	Peningkatan dan melengkapi sarana dan prasarana pada pusat-pusat pelayanan yang meliputi PKW Muntok, PKL Kelapa, PKL Parittiga.
				Pembangunan Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Strategis Provinsi : KIPT (Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu) Tanjung Ular.	Peningkatan dan pengembangan Jalan Khusus Wisata, Pembangunan ruas jalan lingkaran Kota Muntok, Pembangunan Jaringan Jalan Lingkaran Utara Bangka Barat
3.3	Energi		Pemenuhan pasokan energi listrik nasional	Rencana 2018 akan ada pembangunan PLTG di Tanjung Ular.	Masih kurangnya arus investasi bagi percepatan pembangunan wilayah yang disebabkan oleh ketersediaan energi listrik.
					Pembangunan PLTU dan PLTD di Muntok.
4	Demografi dan Geografi				
4.1	Kependudukan	Pengaturan Jumlah Penduduk dunia	Baby-boomers yang sedang berlangsung yang akan memberikan bonus demografi bagi Indonesia	Peningkatan penduduk yang diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pertumbuhan penduduk yang relatif lambat dan belum baiknya sarana penunjang peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Bangka Barat
4.2	Lingkungan	Pasca RIO 20+, publik dunia semakin peka dan responsif terhadap lingkungan, terutama dalam hal isu dampak pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan	Pemerintah menjaga dengan baik sumber/potensi 'paru-paru' dunia	Pertambahan yang ramah lingkungan	Masih lemahnya kesadaran pihak swasta khususnya perkebunan besar dalam menerapkan perkebunan plasma.
		Isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi jargon tersendiri dan kuat bagi masyarakat internasional.			Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan

Sumber: Hasil Analisis, 2014

3.2.5 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan daerah selayaknya dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek-aspek pembangunan. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap memerlukan adanya pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan aspek-aspek apa saja yang menjadi prioritas pembangunan dalam kurun waktu atau tahap tertentu. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis dinamika lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis pembangunan dilakukan untuk mempermudah penentuan arah pembangunan supaya pembangunan yang dilakukan dapat secara efektif menyelesaikan masalah yang terjadi. Dari permasalahan dan faktor pendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat serta isu-isu regional, nasional, maupun internasional yang sedang berkembang yang telah dijabarkan sebelumnya kemudian dilakukan analisis potensi dan permasalahan. Berdasarkan penjabaran permasalahan dan faktor pendukung keberhasilan pembangunan serta isu-isu pembangunan wilayah, diperoleh simpulan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut ini.

A. Permasalahan Lingkungan Akibat Aktivitas Ekonomi

Pertambangan yang masih menjadi mata pencaharian utama di Kabupaten Bangka Barat sangat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Jika kegiatan ini terus-menerus dilakukan maka kerusakan lingkungan akan semakin tidak terkendali yang berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di dalamnya. Sedangkan di sisi lain nilai ekonomi dari pertambangan pun akan semakin menurun seiring dengan menurunnya cadangan timah di kabupaten ini. Oleh karena itu alternatif kegiatan ekonomi non pertambangan perlu dipacu agar pertumbuhan ekonomi semakin baik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga tidak merusak lingkungan.

B. Permasalahan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

Derasnya arus globalisasi membawa dampak yang signifikan dengan semakin meningkatnya persaingan di segala bidang, terutama penyediaan sumber daya

manusia yang berkualitas. Untuk itu penyediaan dan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Terutama peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bangka Barat.

C. Permasalahan Pelayanan dan Perizinan Publik

Adanya komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki iklim investasi perlu didukung dengan perbaikan kualitas pelayanan publik serta penyederhanaan prosedur perijinan melalui penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu untuk memperlancar aktivitas investasi. Infrastruktur yang memadai pun menjadi salah satu faktor dalam menarik preferensi investor. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan dalam perbaikan pelayanan dan perijinan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena SDM yang berkualitas akan mampu menyumbangkan produktivitas dan kreativitas yang baik. Untuk itu peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara terus menerus sebagai modal dasar keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kualitas SDM juga memberikan efek yang positif bagi peningkatan kinerja dan etika sehingga secara otomatis akan mampu menekan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan daerah.

BAB 4

VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA BARAT

4.1 Metodologi Perumusan Visi dan Misi

Dalam proses penyusunan visi dan misi perubahan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2015 – 2025 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) penelaahan dan evaluasi terhadap RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005 – 2025 dan dokumen lain yang terkait; (2) observasi lapangan dan analisis data; (3) *focus group discussion* (FGD) tematik yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, LSM, organisasi masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan materi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi dan misi; (4) menstrukturkan data, fakta, dan analisis yang ada; dan (5) merumuskan visi dan misi.

1. Penelaahan dan evaluasi RPJPD 2005 – 2025 dan dokumen lain yang terkait

Langkah pertama yang dilakukan adalah telaah dan evaluasi dokumen perencanaan yang telah ada; terutama RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005 – 2025 yang akan di revisi. Berdasarkan dokumen perencanaan yang ada, kami melihat bahwa perlu ada perubahan mendasar mengenai RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005 – 2025 yang ada menimbang beberapa hal, antara lain; (1) perubahan sistem peraturan pemerintah dalam sistem perencanaan, dan kebijakan lain yang pengaruhi perencanaan pembangunan; dan (2) dinamika transformasi Indonesia dan juga perubahan iklim daya saing global. Berlandaskan dua hal mendasar inilah perlu ada sebuah aktivitas revisi dokumen RPJPD yang ada agar proses perencanaan dapat adaptif terhadap perubahan.

2. Observasi Lapangan dan Analisis Data

Tim melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan gambaran *riil* mengenai Kabupaten Bangka Barat, melalui proses ini telah tertangkap berbagai harapan dan ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan kedepan. Selain itu, tim juga menganalisis secara mendalam mengenai data-data sekunder yang telah tersedia; semua data yang digunakan untuk analisis dapat dilihat pada BAB II. Data ini

ditelaah, dilihat *trend* perubahan, serta dilakukan proyeksi hingga 2025 untuk memetakan kemungkinan perubahan yang akan terjadi.

3. *Focus Group Discussion*

FGD dilakukan secara tematik berdasarkan panduan pengerjaan RPJPD yang telah ada meliputi aspek daya saing, geografi dan demografi, pelayanan umum, dan kesejahteraan masyarakat. Proses FGD dilakukan secara interaktif sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan ide-ide tentang pembangunan secara tajam. Peserta juga di dorong untuk aktif terlibat agar informasi yang didapatkan benar-benar berguna untuk proses analisis. Selain itu, tim juga menyebarkan kuesioner tertulis untuk mengakomodasi pesan dan ide yang belum tersampaikan dalam diskusi.

4. Menstrukturkan informasi

Proses menstrukturkan informasi dilakukan dengan pembahasan mendalam pada internal tim penyusun. Dengan menstrukturkan informasi ini, tim mencoba menemukan titik temu arah pembangunan RPJPD agar dapat menjawab tantangan daerah dan juga Indonesia.

5. Perumusan Visi dan Misi

Dalam merumuskan visi dan misi, melanjutkan proses menstrukturkan informasi; tim penyusun membuat tabel matriks berikut untuk menemukan titik temu keterkaitan tantangan pembangunan kedepan.

Tabel 4.1 Matriks Visi dan Misi

Visi Misi	Bersih	Mandiri	Makmur
Good Governance	<ul style="list-style-type: none"> - Transparan - Anti korupsi - Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional - Kompeten - Efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Merit based</i>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Legal / Taat asas 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Growth</i> - Kompetitif (berdaya saing) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan (pengurangan ketimpangan antar-

Visi	Bersih	Mandiri	Makmur
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Ramah Lingkungan (<i>green & sustainable economy</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komparatif (keunikan wilayah) - Peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik - Pembangunan sumberdaya energi 	<ul style="list-style-type: none"> daerah) - Pembangunan inklusif (<i>Pro-poor, Pro-job</i>) - <i>Profitable</i>
Manusia berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Imtaq - Berakhlak - Disiplin - Amanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Cerdas (pendidikan) - Sehat (kesehatan) - Terampil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan membuka lapangan kerja - Makmur - Kerjasama
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Asri dan alami (ramah lingkungan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat peduli lingkungan - Orientasi pembangunan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Green & sustainable economy</i>

4.2 Perumusan Visi

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu pada tahun 2025. Visi adalah komitmen dan tekad untuk melakukan perubahan dalam upaya menggapai tujuan yang disepakati dalam kalimat visi yang dituangkan. Visi harus mampu menyesuaikan dengan kondisi terkini dan juga mampu menangkap peluang dan tantangan masa mendatang, serta realistis untuk bisa diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Bangka Barat dirumuskan dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan daerah, karena pada dasarnya visi merupakan landasan bagi para pemangku kepentingan pembangunan di Bangka Barat untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan rencana kegiatan yang lebih rinci. Perumusan visi ini mengacu pada pertimbangan data dan fakta analisis Kabupaten Bangka Barat dan analisis permasalahan dan isu strategis yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Hasil perumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perumusan Visi

No.	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi	Pernyataan visi
1.	Bersih	Keadaan masyarakat dan daerah yang bersih manusia, sistem, dan lingkungannya.	Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025
2.	Mandiri	Keadaan masyarakat cerdas dan daerah Kabupaten Bangka Barat yang mampu mendayagunakan potensi untuk menjawab tantangan yang dihadapi.	
3.	Makmur	Keadaan masyarakat dan daerah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang.	

Terkait dengan visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yaitu;

Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025

4.3 Perumusan Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembanguna daerah. Misi merupakan hal yan penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan misi yang jelas, pemimpin daerah dapat menentukan arah pembangunan tahunan dengan jerlas dan terarah. Dalam menyusun misi, perlu juga dipertimbangkan mengenai peran masing-masing aktor yang berperan dalam pembangunan; yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tabel berikut menjelaskan proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat melalui proses korelasi pokok-pokok visi. Berikut ini adalah rumusan misi dalam mewujudkan Bangka Barat bersih, mandiri, dan makmur tahun 2025.

Tabel 4.3 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat

MISI	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
2.	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi
3.	Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas
4.	Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan

Tabel 4.4 Perumusan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

No	Misi	Stakeholder Pembangunan			Poin Pokok-pokok Visi
		Masyarakat	Pemerintah Daerah	Pelaku Usaha	
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good governance</i>).	Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan tata kelola pemerintahan, dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pemerintah.	Pemerintah yang transparan, profesional, berintegritas, dan terbuka dalam melibatkan stakeholder pembangunan lainnya untuk turut serta membangun Kabupaten Bangka Barat.	Pelaku usaha yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik dengan masyarakat dan pemerintah. Pelaku usaha yang tidak hanya mementingkan keuntungan material semata, melainkan juga memberi kemanfaatan bagi masyarakat.	Bersih
2.	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi.	Masyarakat yang terampil dan mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi yang beragam.	Pemerintah yang mampu menyediakan infrastruktur pendukung serta sanggup menangkap investasi dalam aktivitas ekonomi beragam.	Pelaku usaha yang mampu menghasilkan produk serta layanan yang unggul dan mampu bersaing dengan memanfaatkan potensi Bangka Barat yang beragam.	Mandiri
3.	Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas.	Masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan, serta mengedepankan sikap kerukunan, saling menghormati dan menghargai antar sesama	Pemerintah yang mampu menyediakan kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara merata	Pelaku usaha yang ikut mendukung menyukseskan penyelenggaraan layanan publik bekerja sama dengan pemerintah seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan.	Mandiri
4.	Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan.	Masyarakat yang sadar dan mampu berperan aktif dalam penjagaan lingkungan, terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penambangan, karena pemeliharaan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh elemen yang ada di dalamnya.	Pemerintah yang tegas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pembangunan, terutama pengendalian kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.	Pelaku usaha yang mampu berkooperasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan, dan bersama dengan masyarakat berperan aktif menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Makmur

Sedangkan tabel berikut memberikan gambaran mengenai sinkronisasi misi perubahan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2015 – 2025 dengan RPJPD di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 4.5 Sinkronisasi Misi Jangka Panjang

No.	Misi RPJP Nasional	Misi RPJPD Provinsi Bangka Belitung	Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat
1.	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.	Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas.
2.	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.	Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah.	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi.
3.	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.	Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good governance</i>).
4.	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.		
5.	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan .	Pemerataan pembangunan dan berkeadilan.	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi.
6.	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari .	Penciptaan lingkungan hidup yang asri.	Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan.
7.	Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional.	Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah.	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi.
8.	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional .		

4.3.1 Penjabaran Misi

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang mengedepankan konsep *Good Governance* dengan baik. Pemerintah Daerah sebagai sentral melakukan pelibatan *stakeholder* pembangunan lainnya (pelaku usaha dan masyarakat) untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan tata kelola pemerintah yang baik, maka Kabupaten Bangka Barat akan menerapkan unsur-unsur berikut dalam pemerintahannya ; (1) Partisipasi; (2) Ketaatan Hukum; (3) Transparansi dalam pemerintah; (4) Responsif; (5) Berorientasi pada kesepakatan; (6) Kesetaraan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; dan (9) Visi Strategis.

Dalam pendekatan *Good Governance*, pelaku usaha dan masyarakat merupakan mitra dan subjek pembangun. Bersama pemerintah, tiga *stakeholder* ini melakukan kerjasama strategis dan jangka panjang. Pemerintah juga di tuntut untuk mampu terbuka dan akomodatif terhadap aspirasi yang berkembang dari para *stakeholder*. Di sisi lain, semua *stakeholder* perlu mengedepankan kesetaraan, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan Kabupaten Bangka Barat.

Misi 2 : Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi

Ekonomi berdaya saing tinggi berasal dari kemampuan Kabupaten Bangka Barat mengoptimalkan keunggulan kompetitifnya serta mengupayakan penambahan dalam rantai nilai dari produk maupun layanan yang dihasilkan. Kabupaten Bangka Barat perlu menempatkan diri sebagai daerah kepulauan yang terhubung langsung dengan pusat aktivitas ekonomi nasional di Sumatera Selatan melalui laut. Penguatan infrastruktur yang dapat menguatkan konektivitas dengan pusat ekonomi nasional perlu diupayakan agar Bangka Barat mampu mengambil manfaat ekonomi. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki panjang pantai yang paling besar diantara kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membuatnya lebih memungkinkan untuk mengoptimalkan ekonomi berbasis laut dan pantai bagi sektor pariwisata. Produk Bangka Barat yang selama ini berupa hasil alam mentah perlu diupayakan untuk diolah kembali agar memberi nilai tambah bagi Kabupaten Bangka Barat.

Sampai dengan saat ini ,perekonomian di Kabupaten Bangka Barat masih bergantung pada sektor pertambangan. Pada tahun 2025, Bangka Barat harus dapat meningkatkan kontribusi pada sektor lain terhadap produk domestik bruto. Beberapa sektor strategis yang perlu diupayakan Kabupaten Bangka Barat di masa mendatang dengan melihat potensi yang ada yaitu : (1) Pariwisata, (2) Perkebunan, (3) Perdagangan, (4) Industri pengolahan hasil alam, (5) Pertanian dan perikanan. Pembenahan infrastruktur perlu diupayakan untuk menunjang tumbuhnya sektor lain, diantaranya: pembenahan pelabuhan, kawasan industri, perhubungan serta ketersediaan energi. Pemerintah juga perlu mengupayakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat untuk menunjang aktivitas ekonomi serta membiasakan masyarakat dengan aktivitas ekonomi non tambang.

Upaya menggali komoditas unggulan di Kabupaten Bangka Barat harus dimulai dari pelibatan masyarakat perdesaan sebagai salah satu *stakeholders* pembangunan. Perdesaan harus mampu menghasilkan komoditas unggulan yang memiliki daya saing dengan mengoptimalkan potensi perdesaan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu mendorong konektivitas antar wilayah perdesaan agar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi perdesaan sehingga pembangunan berpihak kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang lemah guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan berkeadilan.

Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas

Manusia sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam pembangunan menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas masyarakat dari aspek kesehatan dan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas. Masyarakat yang berkualitas juga tercermin dari pribadi-pribadi dengan akhlak yang baik serta sikap yang toleran terhadap sesama sehingga tercipta lingkungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Peningkatan kualitas masyarakat dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia. Pewujudan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi sumber daya manusia yang siap bersaing dalam menghadapi tantangan global namun tetap berpegang teguh pada prinsip kebaikan

dan kebenaran. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi maka kegiatan pembangunan akan dapat mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan tenteram.

Misi 4 : Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan kehidupan, dimana pembangunan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia diiringi dengan penjagaan lingkungan hidup yang baik. Aspek lingkungan yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan menjadi faktor pemacu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat. Pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan hidup.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup tercermin dengan terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara sinergis dan seimbang. Selain penjagaan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan pula mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Bencana alam yang berpotensi terjadi daerah tidak dapat dihindari lagi keberadaannya. Akan tetapi, pembangunan dapat diarahkan untuk pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas masyarakat agar resiko bencana yang terjadi dapat ditekan.

BAB 5

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

5.1 Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat adalah:

Bangka Barat Bersih, Mandiri dan Makmur 2025

Berdasarkan visi tersebut dan penurunan misi yang telah dijabarkan, kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Tujuan pokok dijabarkan sesuai dengan misi yang diturunkan dari visi yang ingin dicapai, dan sasaran pokok merupakan langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, untuk membuat rencana yang baik, perlu dilakukan pengukuran ketercapaiannya, sehingga setelah disusun sasaran-sasaran pokok kemudian dibuatlah tolok ukur menggunakan indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang.

Indikator pencapaian kinerja adalah target-target yang ingin dicapai dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dari setiap misi yang telah dirumuskan dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran pokok, yang masing-masing sasaran pokok memiliki satu atau lebih indikator pencapaian kinerja pembangunan. Berikut ini adalah tabel yang secara runut menunjukkan penjabaran dari misi pembangunan hingga indikator pencapaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025.

Tabel 5.1 Misi, Tujuan Jangka Panjang, Sasaran Pokok, dan Indikator Pencapaian Pembangunan

No.	Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good governance</i>)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang (1) Partisipasi; (2) Ketaatan Hukum; (3) Transparansi dalam pemerintah; (4) Responsif; (5) Berorientasi pada kesepakatan; (6) Kesetaraan; (7) Efektif dan Efisien; (8) Akuntabilitas; dan (9) Visi Strategis.	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK WTP • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori A • Penerapan <i>Open Government</i> di setiap SKPD • Penerapan <i>e-procurement</i> • Produk perencanaan berbasis data aktual dan dapat diimplementasikan
			Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan SPM 100% • Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan (Skala A-E) adalah A • Pembuatan sistem monitoring ketercapaian kinerja SKPD
			Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sistem remunerasi • <i>Career Development</i> sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
2	Mengoptimalkan seluruh potensi Kabupaten Bangka Barat dan mewujudkan ekonomi Bangka Barat yang berdaya saing tinggi	Terwujudnya nilai tambah dari produk dan layanan yang berdaya saing tinggi di bidang yang beragam, terutama di sektor : (1) Pariwisata, (2) Perkebunan, (3) Perdagangan, (4) Industri Pengolahan hasil Alam, (5) Pertanian dan Perikanan, (6) Pertambangan.	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan usaha tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku • Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (<i>one stop service</i>). • Kesesuaian dengan tata ruang • Tersedianya pusat informasi investasi. • Tersedianya direktori perusahaan (database)
			Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan PDRB 8% • Laju pertumbuhan investasi sebesar 10%. • Pergeseran struktur ekonomi ke arah

No.	Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator
			komparatif (keunggulan daerah)	perdagangan dan jasa 36% • Pertumbuhan wisatawan dari 9.000 ke 50.000 per tahun pada tahun 2025
			Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik serta pembangunan sumber daya energi	• Persentase Rumah tangga dengan aliran listrik sebesar 100%. • Persentase ketersediaan air bersih 100% • Akses jaringan internet 100% masuk desa • Cakupan jalan berkondisi baik sebesar 90% • Waktu tempuh desa ke kecamatan sekitar 30 menit • Intensitas kedatangan dan keberangkatan kapal laut dan udara
			Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	• Pembukaan lapangan kerja baru di bidang perdagangan dan jasa sebesar 40% • Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi • Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri) • Pembentukan dan penguatan BUMD • Terwujudnya <i>one village one product</i> 50% desa
3	Mewujudkan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat yang diiringi penguatan akhlak dan rasa toleransi terhadap sesama.	Terbentuknya masyarakat yang beriman dan bertaqwa (imtaq), berakhlak mulia, disiplin, dan amanah	• Angka Kriminalitas 0.10% • Angka kejadian konflik antar kelompok masyarakat adalah 0 • Tindak pidana mencapai 0,1
			Terwujudnya kualitas masyarakat yang cerdas (pendidikan), sehat (kesehatan), dan terampil	• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75 • Angka Partisipasi Murni untuk SD 100%, SMP 100% • Angka melek huruf 100%

No.	Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator
				<ul style="list-style-type: none"> • Menang olimpiade science tingkat nasional • Angka Usia Harapan Hidup 72 Tahun • Persentase Balita Gizi Buruk 0 %. • Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai 1:2000
			Terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan membuka lapangan kerja, hidup makmur, dan mampu bekerja sama	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Pengangguran Terbuka 3% • Penambahan UKM dan pengusaha baru akan meningkat 100% pada tahun 2025 • Pendapatan per kapita USD 6.000/tahun pada tahun 2025 • Indeks kebahagiaan meningkat
4	Mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan alam dan lingkungan	Terbentuknya pengelolaan alam dan lingkungan yang baik di setiap kegiatan ekonomi-sosial masyarakat	Terwujudnya lingkungan yang asri dan alami	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pencemaran air, udara, tanah • Normalisasi 100% sungai
			Terbentuknya sikap peduli lingkungan serta berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • 100% cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib AMDAL memiliki dokumen AMDAL • 100% jumlah usaha dan/atau kegiatan lainnya mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
			Terwujudnya konsep <i>green & sustainable economy</i> (kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Daerah (RAD) Green Economy

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pokok pembangunan. Tahapan ini menjelaskan langkah-langkah strategis yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya setiap 5 tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Penekanan prioritas masing-masing tahapan berbeda-beda, akan tetapi harus berkesinambungan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, terdapat 2 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 5.2 Tahapan Kebijakan Revisi Jangka Panjang Kabupaten Bangka Barat 2015-2025

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
1	1.1 Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; komunikasi dan informatika	Belum optimalnya perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas jika ditinjau dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan nilai C dan pemeriksaan keuangan oleh BPK dengan nilai WDP (Wajar dengan pengecualian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun basis sistem keuangan, perizinan, pengadaan, dan administrasi publik secara online, terbuka, dan ramah pengguna 2. Meningkatkan kualitas ASN di Kabupaten Bangka Barat dalam hal administrasi, keuangan, dan anti-korupsi 3. Meningkatkan integritas ASN untuk mendukung Kabupaten Bangka Barat bebas korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan sistem terpadu dalam pengelolaan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan daerah 2. Memperkuat pola komunikasi / pengaduan terbuka antara pemerintah dengan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK WTP • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori A • Penerapan Open Government di setiap SKPD • Penerapan e-procurement • Produk perencanaan berbasis data aktual dan dapat diimplementasikan
	1.2 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; komunikasi dan informatika; statistik; kearsipan	Belum optimalnya pemenuhan SPM terutama pada urusan pelayanan kesehatan; Selain itu, indeks kepuasan layanan masyarakat masin berada pada rentang C dan B atau belum optimal; Kemudian, belum ada sistem monitoring ketercapaian kinerja SKPD pada pelaksanaan harian/mingguan/bulanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pelayanan publik 2. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas dalam pengelolaan SDM pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem pelayanan online dan terpadu untuk perizinan, usaha, dan kependudukan 2. Penguatan kapasitas ASN dalam hal kompetensi dan profesionalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan SPM 100% • Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan (Skala A-E) adalah A • Pembuatan sistem monitoring ketercapaian kinerja SKPD

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
	1.3 Terwujudnya SDM pemerintahan yang berkualitas berdasarkan asas <i>merit-based</i>	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Belum optimalnya usaha meningkatkan kinerja pegawai pemerintahan dengan implementasi <i>reward and consequence</i> dan perbaikan sistem remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem remunerasi ASN di lingkungan Kabupaten Bangka Barat berbasis kinerja dan memperhatikan <i>reward and punishment</i> Dibukanya peluang karir ASN melalui mekanisme inovatif 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas ASN di lingkungan Kabupaten Bangka Barat Penguatan sistem merit-based dalam menilai kinerja dan performa dari ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem remunerasi <i>Career Development</i> sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan
2	2.1 Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Penanaman modal; perdagangan; pertanahan; komunikasi dan informatika	Komitmen masyarakat dan pelaku usaha dinilai masih kurang dalam rangka mematuhi peraturan daerah, serta peran pemerintah daerah sebagai pengawas dan monitoring keberjalanan Perda belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> Membangun pusat perizinan terpadu satu pintu (one stop service) Membangun pusat informasi investasi Mengumpulkan serta mendata secara berkala data usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun sistem perizinan terpadu satu pintu berbasis dalam jaringan (daring/online) Membangun pusat informasi investasi berbasis dalam jaringan. Mengumpulkan serta mendata usaha melalui sistem dalam jaringan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (one stop service) Kesesuaian dengan tata ruang Tersedianya pusat informasi investasi Tersedianya direktori perusahaan (database)
	2.2 Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada <i>growth</i> , kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Perdagangan; pariwisata; kelautan dan perikanan; industri; koperasi dan usaha kecil menengah; komunikasi dan informatika; penanaman modal	Pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan dari pusat dan belum mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pemasukan utama daerah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kontribusi sektor tersier (jasa dan perdagangan) dalam struktur PDRB Meningkatkan arus wisatawan nusantara dan asing melalui perbaikan destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan secara signifikan kontribusi sektor tersier (jasa dan perdagangan) dalam struktur PDRB khususnya yang mendukung sektor pariwisata Meningkatkan secara signifikan arus wisatawan nusantara dan asing melalui diversifikasi produk wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan PDRB 8% Laju pertumbuhan investasi sebesar 10% Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa 36% Pertumbuhan wisatawan dari 9000 ke 50000 per tahun pada tahun 2025

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
	2.3 Terwujudnya peningkatan akses dan konektivitas infrastruktur yang baik serta pembangunan sumber daya energi	Pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; penanaman modal; energi dan sumber daya mineral	Konektivitas antardaerah sudah cukup baik. Akan tetapi, adanya <i>Asean Economic Community</i> dan pengaruh globalisasi lainnya menuntut peningkatan konektivitas antardaerah dalam kabupaten dan antardaerah luar kabupaten; Dari segi sumber daya energi, Kabupaten Bangka Barat memiliki kapasitas pelayanan listrik yang terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan listrik industri; fasilitas internet juga masih minim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penambahan kapasitas energi untuk mendukung pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi rumah tangga 2. Menyediakan pusat akses komunikasi di tiap kecamatan 3. Mengupayakan cakupan jalan berkondisi baik sebesar 85% 4. Mengupayakan akses energi listrik dan air bersih bagi seluruh rumah tangga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan alternatif energi melalui penerapan energi terbarukan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akses jalan, komunikasi, energi listrik dan air bersih untuk seluruh wilayah desa dan kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah tangga dengan aliran listrik sebesar 100% • Persentase ketersediaan air bersih 100% • Akses jaringan internet 100% masuk desa • Cakupan jalan berkondisi baik sebesar 90% • Waktu tempuh desa ke kecamatan sekitar 30 menit • Intensitas kedatangan dan keberangkatan kapal laut dan udara
	2.4 Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job); dan <i>profitable</i> (menguntungkan)	Pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; pemberdayaan masyarakat dan desa; pertanian; perdagangan	Pendapatan per kapita kabupaten menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu 4.000 USD. Akan tetapi hal tersebut jika dilihat pembangunan yang bersifat fisik, maka angka tersebut dinilai belum optimal pemerataannya; Selain itu, pemberdayaan potensi lokal masyarakat dinilai belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan sosialisasi dan pemetaan produk unggulan perdesaan 2. Mengupayakan program one village one product yang meliputi 25% perdesaan 3. Mendorong pelaksanaan UU Desa untuk memperoleh pendanaan program pembangunan desa oleh pusat 4. Mengupayakan pemetaan dan membangun 25% desa berorientasi wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan program one village one product yang meliputi 50% perdesaan 2. Mewujudkan desa berorientasi wisata yang meliputi 50% desa-desa yang menjadi tujuan wisata 3. Mewujudkan BUMD yang mengkoordinasikan promosi potensi serta penjualan produk dan layanan wisata perdesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lapangan kerja baru di bidang perdagangan dan jasa sebesar 40% • Indeks Gini Kab < Prov • Pembangunan desa mandiri • Pembentukan dan penguatan BUMD • Terwujudnya <i>one village one product</i> 50% desa
3	3.1 Terbentuknya masyarakat yang beriman dan	Sosial; budaya; kepemudaan dan olahraga;	Suasana religius dan toleransi dalam kehidupan masyarakat sudah optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas umum dan sosial (termasuk fasilitas ibadah) sesuai dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum dan sosial (termasuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kriminalitas 0.10% • Angka kejadian konflik antar kelompok masyarakat adalah

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
	bertaqwa (imtaq), berakhlak mulia, disiplin, dan amanah	pendidikan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	terbentuk. Namun, nilai-nilai positif tersebut perlu didorong dan diarahkan agar muncul sikap disiplin dan amanah terutama dalam menaati peraturan daerah dan keinginan untuk bersama membangun daerah	<p>kebutuhan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan sistem keamanan berbasis komunitas 3. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan tokoh masyarakat setempat dalam mencegah dan meredam potensi konflik yang mungkin muncul di lingkungannya 4. Menciptakan sistem sanksi sosial bagi pelaku korupsi, narkoba, dan pelaku kejahatan lain 5. Membangun sistem tanggap darurat untuk kasus KDRT 	<p>fasilitas ibadah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun call center untuk keamanan dan kondisi gawat darurat yang mencakup seluruh wilayah 3. Menyelenggarakan <i>event-event</i> lintas ras dan agama berupa pesta rakyat atau festival rakyat untuk membangun rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat 	<p>0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana mencapai 0,1
	3.2 Terwujudnya kualitas masyarakat yang cerdas (pendidikan), sehat (kesehatan), dan terampil	Pendidikan; kesehatan; kepemudaan dan olahraga; ketenagakerjaan; pemberdayaan masyarakat dan desa; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Belum optimal nya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan keterbatasan fasilitas kesehatan serta kurangnya tenaga pengajar maupun tenaga ahli kesehatan; Belum optimalnya pembentukan keterampilan khusus SDM dalam memanfaatkan potensi atau keunggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun pendidikan berbasis vokasi (SMK atau Politeknik) yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah 2. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar memenuhi standar pelayanan per jumlah penduduk 3. Mengadakan pelatihan bagi guru (Training for Trainer) secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pengajar 4. Membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan di lokasi baru agar layanan pendidikan dan kesehatan bisa lebih terdistribusi merata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendidikan berbasis vokasi (SMK atau Politeknik) yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah 2. Membangun dan mengembangkan fasilitas-fasilitas olahraga yang terintegrasi dengan fasilitas pendidikan yang ada. 3. Mengadakan program internet masuk sekolah guna meningkatkan wawasan murid sekolah 4. Meningkatkan intensitas dan frekuensi kompetisi pendidikan (olimpiade) pada tingkat daerah untuk meningkatkan daya saing di 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75 • Angka Partisipasi Murni untuk SD 100%, SMP 100% • Angka melek huruf 100% • Menang olimpiade science tingkat nasional • Angka Usia Harapan Hidup 72 Tahun • Persentase Balita Gizi Buruk 0 %. • Rasio Dokter/Tenaga Medis per satuan penduduk mencapai 1:2000

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
				5. Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan di kalangan orang tua anak mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan 6. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan informal di luar sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang putus sekolah 7. Membangun sistem informasi kesehatan mengenai balita gizi buruk agar program-program penanganan bisa lebih tepat sasaran	kancah regional dan nasional	
	3.3 Terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan membuka lapangan kerja, hidup makmur, dan mampu bekerja sama	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil dan menengah; pemberdayaan masyarakat dan desa; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; perdagangan	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja dan minimnya kreativitas SDM lokal untuk mendirikan usaha mandiri	1. Mendorong dan mengarahkan pelaku-pelaku usaha agar lebih banyak membuka peluang kerja bagi SDM lokal 2. Mengadakan pelatihan-pelatihan praktis bagi angkatan kerja di berbagai bidang untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM 3. Memberikan kemudahan perizinan bagi investasi-investasi besar dari luar yang berpotensi membuka lapangan kerja di Kabupaten Bangka Barat 4. Menyediakan beragam insentif bagi para pelaku Usaha Kecil	1. Memperbaiki dan memperkuat peran koperasi dalam membantu perekonomian masyarakat setempat 2. Menyediakan ruang-ruang rekreasi publik seperti taman bermain, taman hijau, <i>open plaza</i> , dan sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Pengangguran Terbuka 3% • Penambahan UKM dan pengusaha baru akan meningkat 100% pada tahun 2025 • Pendapatan per kapita USD 6000/tahun pada tahun 2025 • Indeks kebahagiaan meningkat

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
				Menengah (UKM) berupa kemudahan perizinan, pinjaman lunak, bantuan pemasaran/promosi produk, dan lain sebagainya		
4	4.1 Terwujudnya lingkungan yang asri dan alami	Lingkungan hidup; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kehutanan	Tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kab. Bangka Barat hingga menurunkan kualitas kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi tata ruang dan zonasi daerah yang rentan pencemaran 2. Mengupayakan normalisasi sungai 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan 4. Membuat rencana adaptasi dan mitigasi pengurangan tingkat pencemaran 5. Bekerja sama dengan pemerintah pusat/provinsi dalam mengupayakan reboisasi pada lahan-lahan kritis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan moratorium pembukaan tambang baru 2. Melanjutkan upaya normalisasi sungai 3. Optimalisasi pelaksanaan rencana adaptasi dan mitigasi pengurangan tingkat pencemaran 4. Bekerja sama dengan pemerintah pusat/provinsi dalam melanjutkan upaya reboisasi pada lahan-lahan kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pencemaran air, udara, tanah • Normalisasi 100% sungai
	4.2 Terbentuknya sikap peduli lingkungan serta berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan	Pekerjaan umum; sosial; kebudayaan; pemberdayaan masyarakat dan desa; pertanahan	Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan daerah yang berorientasi pembangunan ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan implementasi dokumen AMDAL dan dokumen lainnya yang mengatur terkait pengurangan pencemaran 2. Mendorong pembangunan yang berorientasi ramah lingkungan 3. Mengupayakan adanya zonasi pemanfaatan wilayah perairan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan 2. Mengoptimalkan penerapan zonasi pemanfaatan wilayah perairan 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% cakupan perusahaan/ Badan Usaha Wajib AMDAL memiliki dokumen AMDAL • 100% jumlah usaha dan/atau kegiatan lainnya mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

No. Misi	Sasaran Pokok	Urusan	Kondisi awal kinerja pembangunan	Tahapan Kebijakan		Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
				2015-2020	2020-2025	
	4.3 Terwujudnya konsep <i>green & sustainable economy</i> (kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan)	Lingkungan hidup; industri; kelautan dan perikanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; perdagangan	Rendahnya kesadaran para pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan ekonomi jangka panjang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penyusunan RAD <i>Green Economy</i> dengan melibatkan masyarakat (bottom-up) 2. Mengupayakan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi seperti pada pertanian dan industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Implementasi RAD Green Economy 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Daerah (RAD) <i>Green Economy</i>

BAB 6

KAIDAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.1 Prinsip Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Bangka Barat berlaku tahun 2005–2025 sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, pada dasarnya merupakan pedoman bagi seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005–2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai pedoman dalam beberapa hal, yaitu:

1. Penyusunan Visi, Misi, dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025 merupakan pedoman RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD, serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Barat;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui Bappeda Kabupaten Bangka Barat menyebarluaskan dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025 kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah sehingga seluruh elemen pembangunan daerah dapat mengetahui arah pembangunan daerah dan dapat menyelaraskannya;
2. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan didukung oleh instansi vertikal di Kabupaten Bangka Barat, serta masyarakat dan dunia

usaha atau sektor privat, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Barat harus berpedoman RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 dalam menyusun visi dan misi daerah;

3. Sekretaris daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tahun 2005-2025;
4. Bupati Kabupaten Bangka Barat berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya ke dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten, dan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan, pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan memanfaatkan semua potensi dan kekuatan daerah;
5. DPRD Kabupaten Bangka Barat berkewajiban menetapkan dan melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
6. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025, yang selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program beserta pendanaan;
7. Hasil pelaksanaan pengawasan internal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terhadap implementasi rencana pembangunan dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
8. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, pelaku usaha, dan organisasi lainnya memiliki peran penting dalam proses pembangunan Kabupaten Bangka Barat. Oleh karenanya diharapkan seluruh elemen ini turut bertanggung jawab dalam menjadikan

acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya sampai dengan tahun 2025 yang akan datang.

6.2 Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

6.2.1 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2005-2025 meliputi:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat;
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025;
3. Pemantauan dan supervisi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 harus dapat menjamin sasaran pokok, dan dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat telah berpedoman pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat;
4. Hasil pemantauan dan supervisi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten Bangka Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;

6. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 kepada Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat.

6.2.2 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Bangka Barat

Mekanisme evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Bangka Barat meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;
2. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025;
3. Penilaian digunakan untuk mengetahui;
 - a. Realisasi antara sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 dengan capaian sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat.
 - b. Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bangka Barat dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional;
5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD Kabupaten Bangka Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025. Jika dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
7. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Bangka Barat untuk periode berikutnya;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Barat melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 kepada Bupati Bangka Barat;
9. Bupati Bangka Barat menyampaikan laporan kepada Gubernur.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Daerah Kabupaten Bangka Barat bergantung pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005-2025 ini perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

BUPATI BANGKA BARAT,



Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI